



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGUKURAN ELASTISITAS DAN BUOYANCY PENERIMAAN  
PAJAK DAERAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2001-2006**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi**

**Reza Fauzi Tri Anugrah  
0706299441**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH  
Depok  
Juli 2009**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGUKURAN ELASTISITAS DAN BUOYANCY PENERIMAAN  
PAJAK DAERAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2001-2006**

**TESIS**

**REZA FAUZI TRI ANUGRAH  
0706299441**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK  
DEPOK  
JULI 2009**



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Reza Fauzi TA

NPM : 0706299441

Tanda Tangan : 

Tanggal : 21-7-2009



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Reza Fauzi Tri Anugrah  
NPM : 0706299441  
Program Studi : Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah  
Judul Tesis : Pengukuran Elastisitas dan Buoyancy Penerimaan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2001-2006

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Magister Ekonomi pada Program Pasca Sarjana Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Heru Subiyantoro, Ph.D. (  )

Penguji : Ringoringo H. Achmadi, M.Soc.Sc. (  )

Penguji : Iman Rozani, M.Soc.Sc. (  )

Ditetapkan di : Depok,  
Tanggal : 21 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas kasih dan sayang serta pertunjuk-Nya ke jalan yang lurus, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam saya sampaikan kepada Rasulullah SAW. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Ekonomi pada MPKP FEUI. Saya menyadari bahwa berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan saya dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Heru Subiyantoro selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Para dosen pengajar di MPKP FEUI khususnya konsentrasi Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah (EKND) terutama Bapak Iman Rozani yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dalam penyusunan tesis ini.
3. Istri saya tercinta Novie Kusumawati yang telah sangat setia mendampingi saya dan telah melahirkan putra saya tersayang Hafizh Karim Fauzi. Semoga kelahiran keturunan kami kedua nanti dapat berlangsung lancar.
4. Orang tua dan semua keluarga baik kakak dan adik di Depok, Sidoarjo, dan Lamongan yang telah mendukung saya sejak masa perkuliahan sampai menyelesaikan tesis ini.
5. Rekan-rekan angkatan XVII PD yang telah mengisi banyak hal selama dua tahun terakhir

Akhir kata saya berharap Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu tetapi tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Mei 2009



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Reza Fauzi Tri Amugrah  
NPM : 0706299441  
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan dan Publik  
Departemen : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Skripsi/Tesis/Disertasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exklusif Royalty Free Righth)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengukuran Elastisitas dan Buoyancy Penerimaan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2001-2006

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di :

Pada Tanggal :

Yang Menyatakan



(Reza Fauzi Tri Amugrah)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAM PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4. Hipotesis	4
1.5. Metodologi Penelitian	4
1.6. Ruang Lingkup Penelitian	5
1.7. Sistematika Penulisan	5
II KAJIAN LITERATUR	7
2.1. Pajak dan Retribusi Daerah	7
2.2. Pajak Daerah Provinsi	8
2.3. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diantas Air	8
2.4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diantas Air	9
2.5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10
2.6. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	10
2.7. Produk Domestik Bruto	11
2.8. Tax Ratio	11
2.9. Basis Pajak	12
2.10. Elastisitas Pajak	13
2.11. Elastisitas dan Buoyancy	15
2.12. Elastisitas Basis Pajak	17
2.13. Elastisitas Pajak di Indonesia	18
III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1. Spesifikasi Model	21
3.2. Jenis dan Sumber Data	23
3.3. Definisi Operasional Variabel-Variabel	25
3.3.1. Jumlah Kendaraan Bermotor	25
3.3.2. Penjualan Kendaraan Bermotor	26
3.3.3. Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26
3.3.4. Produk Domestik Regional Bruto	27
3.3.5. Dummy Variabel	27
3.4. Metode Pengolahan Data	28

3.5.	Metode Analisis Data	29
IV	GAMBARAN UMUM	31
4.1.	Penerimaan Pajak Daerah Provinsi	31
4.2.	Rasio Pajak Daerah Provinsi terhadap PAD	32
4.3.	Rasio PAD terhadap Penerimaan Provinsi	32
4.4.	Rasio Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB	36
V	PERUBAHAN UNDANG-UNDANG	37
5.1.	Latar Belakang Perubahan	37
5.2.	Pokok-Pokok Perubahan	37
VI	PEMBAHASAN	40
6.1.	Perhitungan Elastisitas dan Buoyancy se-Indonesia	40
6.1.1	Buoyancy Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB	40
6.1.2.	Elastisitas Basis Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB	43
6.1.3.	Buoyancy Pajak Daerah Provinsi terhadap Basis Pajak Daerah Provinsi	51
6.1.4.	Elastisitas Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB	54
6.1.5.	Elastisitas Pajak Daerah Provinsi terhadap Basis Pajak Daerah Provinsi	56
6.2.	Buoyancy dan Elastisitas Total	58
6.3.	Perhitungan Elastisitas dan Buoyancy per Provinsi dan per Wilayah	61
6.3.1.	Buoyancy Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB	62
6.3.2.	Elastisitas Basis Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB	66
6.3.3	Buoyancy Pajak Daerah Provinsi terhadap Basis Pajak Daerah Provinsi	68
VII	KESIMPULAN DAN SARAN	71
7.1.	Kesimpulan	71
7.2.	Saran	72
	DAFTAR REFERENSI	74

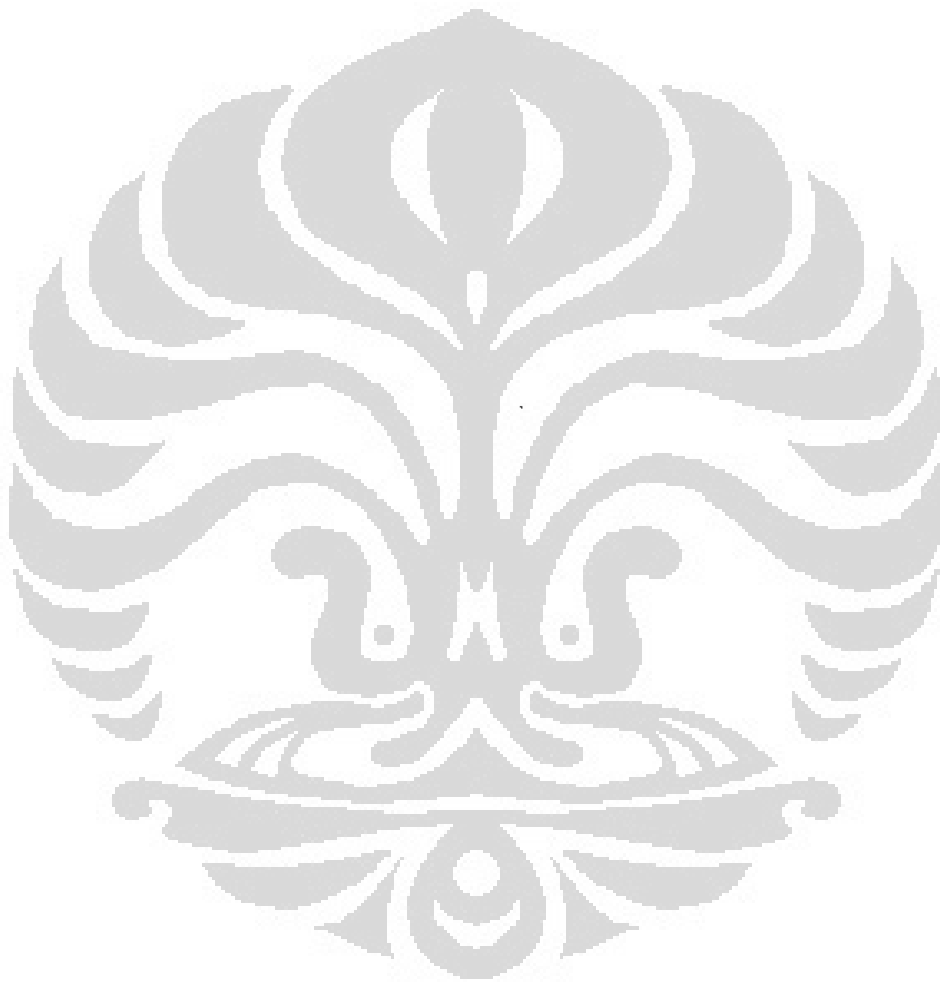


## DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Penerimaan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2001-2006	3
2.1. Proksi Basis Pajak	13
3.1. Jenis dan Sumber Data	24
3.2. Dummy Variabel	28
4.1. Penerimaan Pajak Daerah Provinsi (per provinsi dalam milyar Rp)	31
4.2. Penerimaan Pajak Daerah Provinsi (per wilayah dalam milyar Rp)	32
4.3. Rasio Pajak Daerah Provinsi terhadap PAD (per provinsi dalam %)	33
4.4. Rasio Pajak Daerah Provinsi terhadap PAD (per wilayah dalam %)	33
4.5. Rasio PAD terhadap Penerimaan Provinsi (per provinsi dalam %)	34
4.6. Rasio PAD terhadap Penerimaan Provinsi (per wilayah dalam %)	34
4.7. Rasio Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB (per provinsi dalam %)	35
4.8. Rasio Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB (per provinsi dalam %)	36
5.1. Perbedaan UU No. 18 tahun 1997 dengan UU No. 34 tahun 2000	38
6.1. Penerimaan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia (per jenis pajak)	40
6.2. Prosentase Penerimaan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia (per jenis pajak)	40
6.3. Prosentase Pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia	41
6.4. <i>Buoyancy</i> Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB	42
6.5. Perkembangan Basis Pajak PKB	43
6.6. Pertumbuhan Basis Pajak PKB	44
6.7. Perkembangan Basis Pajak BBNKB	45
6.8. Pertumbuhan Basis Pajak BBNKB	46
6.9. Perkembangan Basis Pajak PBBKB	46
6.10. Pertumbuhan Basis Pajak PBBKB	47
6.11. Elastisitas Basis Pajak PKB terhadap PDRB	48
6.12. Elastisitas Basis Pajak BBNKB terhadap PDRB	49
6.13. Elastisitas Basis Pajak PBBKB terhadap PDRB	50
6.14. <i>Buoyancy</i> Penerimaan PKB terhadap Basis Pajak PKB	52
6.15. <i>Buoyancy</i> Penerimaan BBNKB terhadap Basis Pajak BBNKB	52
6.16. <i>Buoyancy</i> Penerimaan PBBKB terhadap Basis Pajak PBBKB	53
6.17. Elastisitas dan <i>Buoyancy</i> Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB	55
6.18. Elastisitas dan <i>Buoyancy</i> Penerimaan Pajak Daerah terhadap Basis Pajak	57
6.19. <i>Buoyancy</i> Total PKB	59
6.20. <i>Buoyancy</i> Total BBNKB	59
6.21. <i>Buoyancy</i> Total PBBKB	60
6.22. Elastisitas Total PBBKB	60
6.23. <i>Buoyancy</i> Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB per Provinsi/Wilayah	62
6.24. <i>Buoyancy</i> Basis Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB per Provinsi/Wilayah	62
6.25. Elastisitas Pajak Daerah Provinsi terhadap Basis Pajak Daerah Provinsi per Provinsi/Wilayah	66

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran Data Penerimaan Pajak Daerah Provinsi dan PDRB Provinsi	L1-L7
Lampiran Data Basis Pajak Daerah Provinsi	B1-B10
Lampiran Hasil Regresi	R1-R71



## ABSTRAK

Nama : Reza Fauzi Tri Anugrah

Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik

Judul : Pengukuran Elastisitas dan Bouyancy Penerimaan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2001-2006

Tesis ini meneliti tentang pertumbuhan penerimaan pajak daerah provinsi di Indonesia diantara tahun 2001-2006. Jenis pajak yang diteliti ialah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pemanfaatan dan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan. Metode yang digunakan ialah menghitung elastisitas dan buoyancy pajak daerah terhadap PDRB dan basis pajaknya serta elastisitas basis pajak terhadap PDRB. Hal ini untuk melihat faktor mana yang lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan apakah pertumbuhan basis pajak atau peningkatan kinerja pemungut pajak. Faktor lainnya yang diperhitungkan ialah adanya kebijakan diskresi yang mempengaruhi penerimaan yaitu perubahan undang-undang pajak dan retribusi daerah. Hasil penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah provinsi tumbuh lebih cepat daripada produk domestik bruto. Meskipun demikian pertumbuhan itu lebih disebabkan oleh pertumbuhan basis pajaknya ketimbang peningkatan kinerja pemungut pajak. Perubahan undang-undang pajak dan retribusi daerah memberikan pengaruh positif hanya terhadap pertumbuhan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sementara itu nilai elastisitas dan buoyancy juga bervariasi antar wilayah dan antar provinsi.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Provinsi, Elastisitas, Buoyancy, Pertumbuhan

## ABSTRACT

Name : Reza Fauzi Tri Anugrah

Study Program : Master of Public Planning & Policy

Judul : Elasticity and Bouyancy Esytimation of Provincial Tax Revenue  
in Indonesia between 2001-2006

This thesis studies the growth of provincial government tax revenue in Indonesia between 2001 and 2006. Types of tax examined here are motor vehicle tax, motor vehicle ownership transfer excise, motor vehicle gasoline tax, and underground and surface water acquiring and using tax. The method used is estimating the tax bases and regional income elasticity and buoyancy of tax revenue and also regional income elasticity of tax bases. It is implemented to find which factor is more decisive to the revenue growth weather the growth of tax bases or the increase of fiscus performance. Other factor analyze here is the revenue influential discretionary change which is the amendment of local tax and retribution law. The result of this research is that the growth of provincial government tax revenue is faster than gross domestic product. However the growth is more influenced by the tax bases than the fiscus performance that it should be. The amendment is positively correlated only to the growth of motor vehicle gasoline tax. Elasticity and buoyancy variation is occurred inter region and province.

Keyword: Local Taxes, Province, Elasticity, Buoyancy, Growth

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kelahiran UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengawali era otonomi daerah di Indonesia<sup>1</sup>. Kedua UU itu memberi wewenang besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya. Menurut Musgrave (1989) tiga fungsi pemerintah ialah stabilisasi, distribusi, dan alokasi. Sebelum otonomi ketiga fungsi tersebut dijalankan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebatas menjalankan garis besar yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Setelah otonomi pemerintah daerah diberi bagian wewenang untuk menjalankan fungsi alokasi. Dengan demikian pemerintah daerah wajib mengalokasikan sumber daya secara optimal. Ini karena pemerintah daerah dianggap yang paling dekat dengan rakyat sehingga lebih mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Berbagai sektor telah diserahkan kepada pemerintah daerah kecuali hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum, kebijakan fiskal dan moneter, dan agama yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat.

Besarnya wewenang yang diberikan tersebut tentu saja dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu melalui UU No. 34 tahun 2000 yang merevisi UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota diberi kewenangan memungut jenis-jenis pajak dan retribusi tertentu di wilayahnya. Jauh sebelum UU tersebut pemerintah pusat memang sudah diberi kewenangan memungut pajak dan retribusi di wilayahnya. Namun berbagai peraturan sebagai dasar hukumnya terpisah-pisah dan jenis-jenis pajaknya terlalu banyak.

Untuk itulah melalui UU tersebut pemerintah menyederhanakan jenis pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah. Bagi pemerintah provinsi jenis pajak yang boleh dipungut antara lain pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas

---

<sup>1</sup> Sudah direvisi dengan masing-masing dengan UU No. 32 dan UU No. 33 tahun 2004

air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan bagi pemerintah kabupaten dan kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Meskipun demikian sampai saat ini pendapatan asli daerah (PAD) masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan keuangan daerah. Menurut Simanjuntak (dalam Romdony, 2006) untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata bagian PAD mencapai 6% dari total pendapatan. Sementara itu untuk pemerintah provinsi menurut data dari Ditjen Perimbangan Keuangan Depkeu<sup>2</sup> pada tahun 2007 rata-rata bagian PAD mencapai 45% dari total penerimaan. Meskipun presentase tersebut lebih besar dari pemerintah kabupaten/kota namun masih tidak merata. Tiga besar provinsi yang bagian PAD-nya terbesar ialah Jawa Barat yaitu 70% dari total pendapatan, disusul oleh Banten dan Jawa Timur yang masing-masing 69% dan 68%. Sementara tiga provinsi terbawah yaitu Papua dan Papua Barat yang bagian PAD keduanya hanya 4% dari pendapatan serta Maluku Utara yaitu 9%. Meskipun demikian sektor pajak daerah sendiri masih memegang peranan yang paling utama yaitu mencapai 84% dari total PAD Provinsi. Dibawah ini adalah perkembangan penerimaan pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten di Indonesia dari tahun 2001-2006.

Tabel 1.1. Penerimaan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia antara tahun 2001-2006

Jenis Pajak	Penerimaan Pajak Tahun (juta rupiah)					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Provinsi	7.863.784	10.918.678	13.914.916	18.506.909	22.760.866	23.920.767

Secara nominal penerimaan pajak daerah provinsi tersebut telah mengalami pertumbuhan yang pesat antara tahun 2001 dan 2006. Mengenai pertumbuhan penerimaan pajak itu sendiri dapat disebabkan adanya pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan PDRB menyebabkan basis pajaknya

<sup>2</sup> Profil Pendapatan APBD Provinsi tahun Anggaran 2007, pada [www.dipk.depkeu.go.id](http://www.dipk.depkeu.go.id)

berkembang sehingga potensi pajaknya meningkat. Hal lain yang mempengaruhi ialah adanya kebijakan diskresi yaitu perluasan basis pajak, kenaikan tarif, dan perubahan peraturan. Pertumbuhan pajak juga dapat terjadi karena peningkatan kemampuan memungut pajak atau kapasitas pajak oleh pemerintah daerah. Sarana, prasarana, dan SDM yang lebih baik dapat meningkatkan kapasitas pajak dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak

## 1.2. Perumusan Masalah

Pengukuran elastisitas pajak ini baik elastisitas pajak terhadap basis pajak maupun elastisitas basis pajak terhadap produk domestik bruto sudah lama dilakukan untuk menganalisa penerimaan pajak. Analisa ini penting dilakukan karena kebutuhan fiskal pemerintah daerah provinsi yang besar memerlukan pemahaman yang mendalam akan faktor-faktor penentu penerimaan pajak tersebut. Sebagai contoh apabila basis pajak tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan produk domestik bruto maka basis pajak akan menyediakan sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan.

Sedangkan perubahan UU tersebut yaitu dari UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000 perlu dicari pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah provinsi. Sejauh mana pertumbuhan penerimaan pajak daerah tersebut menambah penerimaan pajak ataukah perkembangan basis pajaknya yang lebih berperan.

Sehubungan uraian diatas maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan penerimaan pajak daerah provinsi terhadap basis pajak daerah provinsi di Indonesia
2. Bagaimanakah hubungan basis pajak daerah provinsi terhadap PDRB provinsi di Indonesia.
3. Bagaimanakah hubungan penerimaan pajak daerah provinsi terhadap PDRB provinsi di Indonesia.
4. Bagaimanakah pengaruh revisi UU No. 18 tahun 1997 melalui UU No. 34 tahun 2000 yang terhadap penerimaan pajak daerah provinsi di Indonesia

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab dari pertumbuhan penerimaan pajak daerah provinsi tersebut apakah karena pertumbuhan PDRB atau pengaruh kebijakan diskresi tersebut. Apabila hal tersebut dapat diketahui maka dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi lebih lanjut bagi para pemerintah daerah provinsi guna semakin meningkatkan penerimaan pajaknya dan juga berguna untuk merancang sebuah kebijakan yang berguna bagi peningkatan penerimaan pajak daerah provinsi.

### 1.4. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka didapatkan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pajak provinsi yang tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan basis pajaknya dan terdapat pajak provinsi yang tumbuh lebih lambat daripada basis pajaknya.
2. Terdapat basis pajak provinsi yang tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan PDRB dan terdapat basis pajak provinsi yang tumbuh lebih lambat daripada PDRB.
3. Terdapat pajak provinsi yang tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan PDRB dan terdapat pajak provinsi yang tumbuh lebih lambat daripada PDRB.
4. Revisi UU No. 18 tahun 1997 melalui UU No. 34 tahun 2000 berpengaruh positif meningkatkan penerimaan pajak daerah provinsi.

### 1.5. Metodologi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan diatas maka dilakukan:

1. Perhitungan buoyancy penerimaan pajak daerah provinsi terhadap PDRB, buoyancy penerimaan pajak daerah provinsi terhadap basis pajak, dan elastisitas basis pajak daerah provinsi terhadap PDRB untuk menjawab permasalahan nomor 1, 2, dan 3.



2. Perhitungan elastisitas penerimaan pajak daerah provinsi terhadap PDRB, elastisitas penerimaan pajak daerah provinsi terhadap basis pajak, dan selisih masing-masing dengan buoyancynya untuk menjawab permasalahan nomor 4.

#### 1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini ialah penerimaan pajak daerah provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pemanfaatan dan pengambilan air bawah tanah dan permukaan. Penelitian tidak membahas pajak daerah kabupaten/kota dan pajak pemerintah pusat. Penelitian ini juga hanya menganalisa pengaruh basis pajak dan produk domestik bruto terhadap penerimaan pajak.

Tahun yang akan diteliti mulai tahun 2001 sampai 2006 saja. Sehubungan terdapat provinsi baru yang dibentuk diantara periode tersebut maka analisa pajak daerah provinsi baru itu masih digabungkan dengan provinsi induk yang sudah ada pada tahun 2001. Sehingga jumlah provinsi yang diteliti berjumlah 26 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia.

#### 1.7. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, hipotesis, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

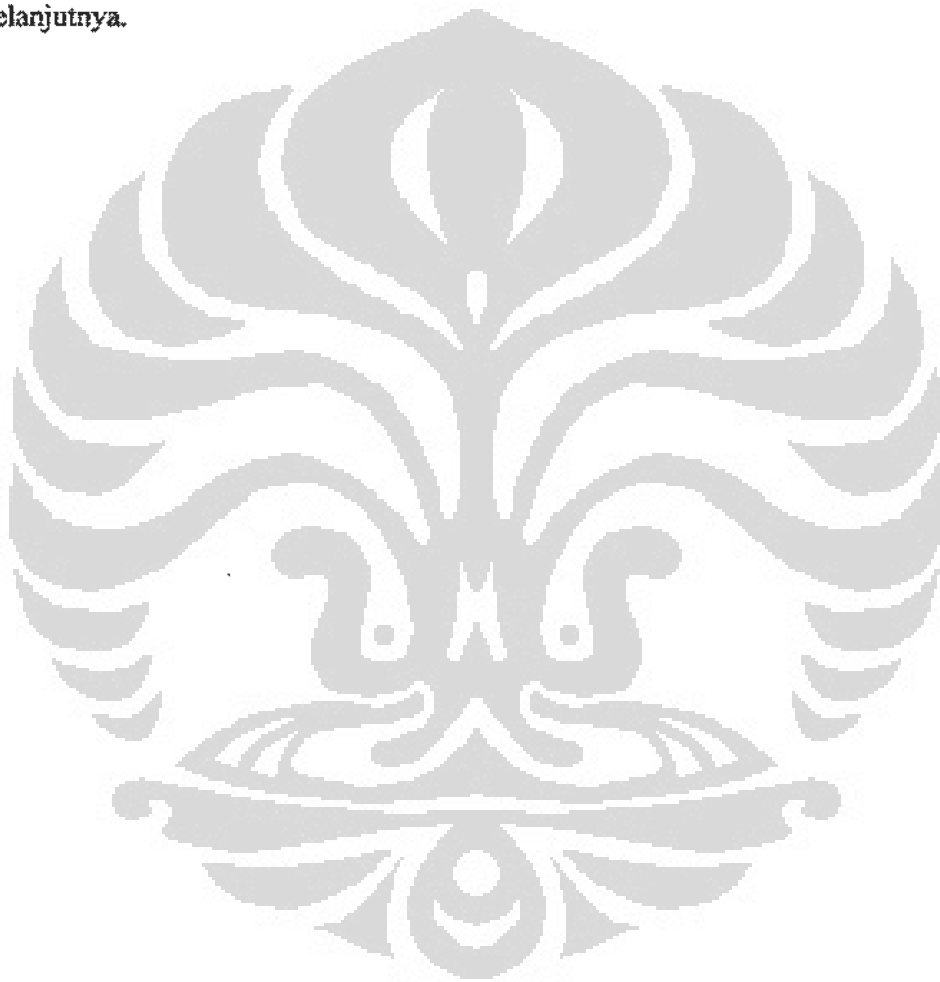
Bab II berisi tentang tinjauan literatur yang membahas kajian teoritis berdasarkan literatur mengenai pajak daerah provinsi, basis pajak, PDRB, dan hubungan antara ketiganya.

Bab III memuat metodologi penelitian yang membahas tentang model yang dipergunakan dan juga identifikasi atas model tersebut. Hal lain yang dibahas ialah metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab IV tentang gambaran umum penelitian yaitu penerimaan pajak daerah provinsi-provinsi diseluruh Indonesia dan membandingkannya dengan total pendapatan asli daerah dan PDRB.

Bab V memuat pembahasan yang berisi hasil pengujian ekonometrika terhadap model sehingga dapat diketahui hubungan antara provinsi, basis pajak, dan PDRB.

Bab VI memuat kesimpulan dan saran yang merupakan penutup dari keseluruhan penulisan tesis. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran sebagai bahan masukan kepada pengambil kebijakan. Hal lain ialah keterbatasan dari penelitian ini yang dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.



## Bab II TINJAUAN LITERATUR

### 2.1 Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang kini diserahkan kepada daerah maka pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota membutuhkan sumber dana yang cukup. Tentu saja sumber dana tersebut sebaiknya berasal dari potensi daerah itu sendiri. Namun karena tidak semua daerah mempunyai potensi pendapatan asli daerah yang memadai, pemerintah pusat melalui UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah mengatur pemberian dana perimbangan untuk mencukupi kebutuhan dana daerah. Dana perimbangan itu berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Akan tetapi dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat jumlahnya terbatas. Untuk DAU misalnya jumlah minimal yang diberikan hanya sebesar gaji PNS yang harus dibayarkan<sup>3</sup>. Meskipun masih akan ditambah agar kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terpenuhi, para kepala daerah merasa dana itu belum cukup<sup>4</sup>. Penggunaan dana perimbangan tersebut juga diatur sedemikian rupa oleh pemerintah pusat sehingga daerah merasa tidak leluasa untuk menggunakannya<sup>5</sup>. Oleh karena itu daerah harus menggenjot pendapatan asli daerahnya.

Pendapatan asli daerah ialah bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD tersebut berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selain PAD juga terdapat pendapatan daerah lainnya. Dari beberapa sumber pendapatan itu pajak daerah merupakan sumber pembiayaan yang terpenting<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Lihat [www.djpk.depkeu.go.id/leaflet/leaflet\\_dau.pdf](http://www.djpk.depkeu.go.id/leaflet/leaflet_dau.pdf)

<sup>4</sup> Lihat <http://kaltimbkd.info/index.php>

<sup>5</sup> Lihat <http://autos.okezone.com/index.php/ReadStory>

<sup>6</sup> Berdasarkan data EPS tahun 2006 untuk daerah provinsi 88% pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah.

Pajak daerah, sebagaimana layaknya jenis pajak yang lain, ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemda tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan pribadi orang atau badan. Perbedaan pajak dan retribusi disini ialah ada atau tidaknya imbalan langsung. Pada pajak imbalan langsung itu tidak seimbang atau bahkan tidak ada. Sedangkan pada retribusi imbalan langsungnya ada yaitu berupa jasa atau pemberian izin dari penerima kepada pembayar retribusi.

Untuk pajak daerah sebagaimana telah disinggung pada pendahuluan jumlahnya ada 11 (sebelas) buah. 4 (empat) untuk daerah provinsi dan 7 (tujuh) untuk daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk retribusi baik untuk kabupaten maupun kota terbagi berdasarkan obyeknya menjadi 3 (tiga) yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

## 2.2 Pajak Daerah Provinsi

Seperti yang sudah dijelaskan diatas pemerintah daerah provinsi berhak memungut 4 (empat) jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (PABTAPU). Menurut UU No. 34 tahun 2000 pemerintah daerah provinsi memang diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak jenis baru asalkan dengan kriteria tertentu<sup>7</sup>. Meskipun demikian 4 (empat) jenis pajak diatas tetap mendominasi perolehan PAD daerah provinsi.

## 2.3 Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air

Berdasarkan UU No. 18 tahun 1997 yang telah dirubah dengan UU No. 34 tahun 2000 yang dimaksud dengan PKB ialah pajak yang dipungut atas

---

<sup>7</sup> Lihat Sidik (2002)

orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dan/atau kendaraan bermotor di atas air. Secara umum dasar pengenaan PKB ialah nilai jual kendaraan bermotor. Kecuali kendaraan bermotor diatas air juga dihitung bobot kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan diatas air, 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Dikecualikan dari pengenaan PKB ialah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah; kedutaan, konsulat, perwakilan negara-negara asing dan perwakilan negara-negara internasional dengan asas timbal balik; dan subyek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Khusus untuk kendaraan diatas air ditambah dengan kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan diatas air perintis.

#### 2.4 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air

Berdasarkan UU No. 18 tahun 1997 yang telah dirubah dengan UU No. 34 tahun 2000 yang dimaksud dengan BBNKB ialah pajak yang dipungut atas orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan bermotor di atas air. Dasar pengenaan BBNKB ialah nilai jual kendaraan bermotor.

Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum, 5% (lima persen) untuk kendaraan diatas air, 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum, dan 3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Sedangkan untuk penyerahan kedua dan selanjutnya tarifnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum, kendaraan diatas air, dan kendaraan bermotor umum serta 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Sementara itu untuk penyerahan karena warisan tarifnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum, kendaraan diatas air, dan kendaraan bermotor umum serta 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Dikecualikan dari pengenaan BBNKB ialah penyerahan kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah; kedutaan, konsulat, perwakilan negara-negara asing dan perwakilan negara-negara internasional dengan asas timbal balik; dan subyek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Khusus untuk kendaraan diatas air ditambah dengan penyerahan atas kendaraan diatas air perintis.

## 2.5 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdasarkan UU No. 18 tahun 1997 yang telah dirubah dengan UU No. 34 tahun 2000 yang dimaksud dengan PBBKB ialah pajak yang dipungut atas orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Yang dimaksud bahan bakar disini ialah bensin, solar, dan bahan bakar gas. Dasar pengenaan PBBKB ialah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5% (lima persen) Jenis pajak ini baru pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui UU No. 18 tahun 1997.

## 2.6 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Berdasarkan UU No. 18 tahun 1997 yang telah dirubah dengan UU No. 34 tahun 2000 yang dimaksud dengan PABTAPU ialah pajak yang dipungut atas orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Dasar pengenaan PPABT-APU ialah nilai perolehan air. Tarif PPABT-AU ditetapkan sebesar 20% untuk air bawah tanah dan 10% untuk air permukaan.

Dikecualikan dari pengenaan PABT-APU ialah pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan: oleh pemerintah pusat atau daerah; oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk mendirikan usaha eksploitasi dan pemeliharaan

pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air; untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat; untuk keperluan dasar rumah tangga; dan lain-lain yang diatur oleh peraturan daerah.

## 2.7 Produk Domestik Bruto

Menurut Blancard (1997) Produk Domestik Bruto (PDB) ialah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDB berbeda dari produk nasional bruto (PNB) karena PDB menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau luar negeri. Sebaliknya PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.. PDB nominal ialah nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.

PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Penghitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran rumusnya:  $Y = C + I + G + (X-M)$ , dimana  $Y =$  PDB,  $C =$  Konsumsi,  $I =$  Investasi,  $G =$  Pengeluaran Pemerintah,  $X =$  Ekspor, dan  $M =$  Impor. Sedangkan penghitungan PDB dengan pendekatan pendapatan rumusnya:  $Y =$  Sewa + Upah + Bunga + Laba.

## 2.8 Tax Ratio

Menurut Setiyaji (2007) yang dimaksud dengan *tax ratio* ialah perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto. Semakin besar *tax ratio* maka semakin besar penerimaan pajak pemerintah suatu negara karena *tax coverage* semakin luas. Namun terdapat beberapa masalah yang menurut Setiyaji membuat *tax ratio* cukup diperdebatkan.

Yang pertama ialah penerimaan pajak. Apakah yang dihitung dalam *tax ratio* hanya pajak-pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak saja atau mencakup juga jenis pajak lain seperti bea masuk dan cukai yang diurus oleh Direktorat Jenderal Bea & Cukai. Kemudian juga apakah

hanya pajak pemerintah pusat apataukah juga meliputi pajak pemerintah daerah.

Yang kedua adalah produk domestik bruto. PDB sebagai pembagi ini apakah yang dihitung dengan harga konstan atau dengan harga berlaku. Apabila PDB yang digunakan adalah PDB dengan harga konstan, tahun manakah sebagai dasarnya.

Dua masalah tersebut membuat *tax ratio* masih kurang sempurna untuk melihat efektifitas pemajakan oleh pemerintah karena hasil penghitungannya harus melalui asumsi-asumsi.

## 2.9 Basis Pajak

Secara umum dikenal istilah *tax base* yang menurut Berne & Schramm (1986) ialah sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai dasar penarikan pajak. Basis itu antara lain nilai dari properti untuk dasar pajak properti (PBB) dan gaji atau upah untuk dasar pajak penghasilan.

Lantas bagaimana menentukan basis pajak yang sesuai. Menurut Shome (1988) yang paling penting dilakukan ialah mendefinisikan suatu basis pajak yang paling mendekati sumber pemajakan tersebut. Pada prakteknya basis pajak tersebut kadang-kadang sulit didapat. Untuk itulah sebuah basis proksi (*proxy bases*) secara teoritis dapat digunakan. Pada tabel di halaman berikut berisi basis proksi yang dicontohkan oleh Shome untuk beberapa jenis pajak.

Sementara itu Mahi (2005) dalam penelitiannya tentang pajak daerah kabupaten/kota menjelaskan beberapa hal yang bisa digunakan sebagai proksi pajak daerah kabupaten/kota, yaitu:

1. Jumlah Hotel
2. Jumlah Restoran
3. Konsumsi Makanan
4. Konsumsi Bukan Makanan
5. Konsumsi Perumahan
6. Konsumsi Listrik



Tabel 2.1. Proksi Basis Pajak

Tax	Proxy Tax Base
Personal Income Tax	Personal Income Net of Agricultural Value Added
Wage Income	Domestic (net of agricultural) wages and salaries
Interest Income	Interest paid to household
Other	Interest from property (net of farm rent) plus professional and unincorporated enterprise income received by households
Corporate Income Tax	Corporate profits
Excise Duties	Consumption of all components
Soft Drink	Consumption of non-alcoholic beverage
Spirits	Consumption of alcoholic beverage
Petroleum	Consumption of fuel and related product
Tobacco	Consumption of tobacco and tobacco product
General Sales Taxes	Value added of domestic goods and service
Import-based Taxes	
Import Duties	CIF value of dutiable imports

### 2.10 Elastisitas Pajak

Topik-topik mengenai elastisitas pajak telah banyak dibahas dalam berbagai artikel. Salah satu artikel awal yang membahas masalah ini ditulis oleh Groves dan Kahn pada tahun 1952<sup>8</sup> (dalam van den Berg, 2006). Mereka menghitung elastisitas pajak dengan suatu model yang sederhana yaitu  $\ln(T) = \alpha + \beta \ln(Y)$ , dimana T ialah penerimaan pajak, Y ialah pendapatan masyarakat dalam hal ini PDB, dan  $\beta$  ialah elastisitas pajak. Penerimaan pajak yang elastisitasnya lebih tinggi dari pada satu berarti tumbuh lebih cepat daripada pendapatan atau disebut *highly income elastic tax revenue*. Sebaliknya penerimaan pajak yang elastisitasnya lebih rendah dari pada satu berarti tumbuh lebih lambat daripada pendapatan atau disebut *low income elastic tax revenue*. Namun mereka memperkirakan adanya *trade-off* antara pertumbuhan dan kestabilan. Saat ekonomi sedang resesi dimana pertumbuhan ekonomi menurun atau malah minus penerimaan pajak yang *highly income elastic* juga akan melorot dengan cepat sehingga dapat dikatakan tidak stabil. Sebaliknya penerimaan pajak yang *low income elastic*

<sup>8</sup> Groves & Kahn. (1952). The Stability of State and Local Tax Yield. *American Economic Review*. Vol 42 No. 1.

tidak terlalu terpengaruh oleh siklus perekonomian sehingga dapat dikatakan stabil.

Aquah dan Gerald (2008) menggunakan dua buah model untuk menghitung tingkat kestabilan tersebut yaitu  $\Delta \ln(R_t) = \alpha + \beta \Delta \ln(Y_t) + \varepsilon_t$  dan  $\Delta \ln(R_t) = \alpha + \beta \Delta \ln(Y_t) + \mu_{t-1} + \varepsilon_t$ . Model yang pertama yaitu *regular change model (RCM)* memperkirakan elastisitas jangka pendek dengan meregresi perbedaan (*first difference*)  $\ln$  dari penerimaan pajak dan perbedaan  $\ln$  dari PDB. Sedangkan pada model yang kedua yaitu *error corection model (ECM)* ditambah koefisien  $\mu_{t-1}$  untuk mengoreksi kesalahan yang ditimbulkan karena perbedaan waktu atau *time lag*. Koreksi ini perlu dilakukan karena sifat dari penerimaan pajak itu sendiri, terutama pajak penghasilan, dimana pembayaran pajak tahun ini didasarkan atas laba bersih yang diperoleh tahun lalu. Apabila  $\beta$  lebih dari satu maka penerimaan pajak tidak stabil, sebaliknya jika kurang dari satu maka penerimaan pajak stabil.

Sedangkan untuk jenis datanya Ram (1991) mencoba mengembangkan dengan data *cross section*. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang menggunakan data *time series*, Ram menganalisa data penerimaan pajak dari 50 (limapuluh) negara bagian yang ada di Amerika dari tahun 1981 sampai tahun 1987. Menurut Ram data *cross section* biasanya lebih mudah didapat dan analisisnya lebih tidak rumit dibandingkan dengan data *time series*. Dalam analisisnya Ram hanya membatasinya dengan pajak penghasilan saja. Analisa menggunakan elastisitas pajak penghasilan menggunakan data *cross section* juga dilakukan oleh Grossman, Lasilla, dan Wiggins (2002). Bedanya data *cross section* disini ialah membaginya menjadi tiap-tiap wilayah di Amerika yaitu New England, Mideast, Great Lakes, Plains, Southeast, Southwest, Rocky Mountain, dan Far West.

Peneliti lain seperti Hewett dan Stephenson (1983) menambahkan unsur pesaingan pajak antar negara bagian. Hal ini karena sebagai negara federal Amerika membebaskan masing-masing negara bagian untuk mencari berbagai macam sumber pendapatan seluas mungkin. Kedua penelitian tersebut menganalisa dua jenis pajak yaitu pajak penghasilan dan pajak

penjualan. Sedangkan Auten dan Robb (1976) menambahkan beberapa jenis pajak komoditas antara lain tembakau, alkohol, dan bahan bakar.

Khusus untuk pajak bahan bakar penelitian awal dilakukan oleh Davies pada tahun 1965. Menurut Davies *motor fuel taxes* pertama kali diterapkan oleh negara bagian Oregon pada tahun 1919. Pajak ini kemudian berkembang sangat pesat. Sepuluh tahun kemudian semua negara bagian sudah menerapkannya. Penerimaan pajak dari hanya 1 juta dollar di tahun 1919 melonjak menjadi 4 milyar dolar di tahun 1964. Davies berargumen hal tersebut disebabkan oleh pajak bahan bakar mudah diadministrasikan, tidak memberatkan konsumen, biaya pengumpulan rendah, dan sumber pembiayaan jalan raya. Namun ternyata dari hasil estimasi elastisitas tiap-tiap negara bagian mempunyai tingkat kestabilan penerimaan yang berbeda-beda.

Prosentase pajak bahan bakar sendiri berbeda-beda untuk masing-masing negara<sup>9</sup>. Pajak bahan bakar di dua negara Amerika Utara yaitu Amerika Serikat dan Kanada lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Hal itu karena kedua negara tersebut memiliki wilayah yang luas sehingga masyarakat sering berkendara jarak jauh. Pajak yang tinggi memberatkan pengguna jalan raya. Berbeda dengan di Eropa dimana pemerintah berusaha mengurangi polusi dengan membangun sarana transportasi publik yang sangat baik. Pajak bahan bakar yang sangat tinggi, sehingga harga bensin mencapai 1,22 euro atau Rp. 18.300 perliter di Jerman pada Maret 2009 diharapkan dapat membuat warga meninggalkan mobil mereka.

### 2.11 Elastisitas vs Buoyancy

Menurut Osoro (2005) yang meneliti elastisitas penerimaan cukai di Tanzania untuk mengevaluasi kinerja dan potensi dari cukai maka perlu dimengerti dulu konsep tentang buoyancy dan elastisitas. Buoyancy pajak berarti menghitung perubahan penerimaan pajak dalam persen baik terhadap basis pajak maupun GDP yang tidak mengkoreksi terlebih dulu penerimaan akibat *discretionary change*. Sedangkan untuk elastisitas dilakukan terlebih

<sup>9</sup> Lihat [http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel\\_Tax](http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_Tax)

dulu menghilangkan penerimaan atas kebijakan diskresi tersebut. *Discretionary change* tersebut antara lain *tax rates*, *tax base*, dan *tax legislation*. Oleh peneliti negara maju perubahan tersebut ditambahkan sebagai variabel lain dalam model seperti yang dilakukan oleh Ledger dan Shapiro<sup>10</sup> (1968, dalam van den Berg, 2006). Mereka menambahkan pendapatan per kapita, indeks harga, dan tarif pajak sebagai variabel selain pendapatan.

Dalam penelitiannya Osoro menggunakan cara *proportional adjustment* untuk menyesuaikan penerimaan karena *discretionary change*.

$$\text{Formulanya ialah } T_{ij} = \frac{T_{j-1,j}}{T_{j-1}} \cdot \frac{T_{j-2,j-1} \dots T_{2,3}}{T_3} \cdot \frac{T_{1,2}}{T_2}$$

dimana  $T_j$  ialah penerimaan pajak aktual pada tahun  $j$ ;  $T_{i,j}$  ialah penerimaan pajak aktual pada tahun  $j$  yang telah disesuaikan dengan struktur pajak yang ada pada tahun  $i$ ;  $T_{j-1,j} = T_j - D_j$  dimana  $D$  adalah efek penerimaan karena kebijakan diskresi baik itu positif maupun negatif.

Cara lain untuk menyesuaikan adanya *discretionary change* adalah *constant rate structure methods*. Namun cara ini hanya untuk perubahan diskresi yang berupa perubahan tarif saja tidak merubah lapisan tarif (*tax brackets*). Metode ini dilakukan oleh Choudry (1975) untuk menghitung elastisitas pajak penghasilan Malaysia. Formulanya ialah  $T_{ip}(t)$  = penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan  $Y_i(t)$  = penghasilan yang dilaporkan. Baik  $T_{ip}(t)$  dan  $Y_i(t)$  adalah untuk tiap-tiap lapisan tarif ke- $i$  pada periode  $t$ . Sedangkan  $T_p(t) = \sum T_{ip}(t)$  = total penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada periode  $t$  dan  $Y(t) = \sum Y_i(t)$  = agregat penghasilan yang dilaporkan. Dihitung juga tarif pajak efektif pada tahun yang dijadikan referensi ( $r$ ) yaitu tahun sebelum kebijakan diskresi itu dilakukan sebagai berikut:  $t_i(r) = T_{ip}(r) / Y_i(r)$ , sehingga total penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun  $r$  adalah  $T_p(r) = \sum t_i(r) Y_i(r)$ . Pada tahun-tahun lain penerimaan pajak dihitung berdasarkan tarif tahun  $r$  yaitu  $T_p(t) = \sum t_i(r) Y_i(t)$ ,  $t = 1, \dots, n$ .

<sup>10</sup> Ledger & Shapiro. (1968). The Responsiveness of State Tax Revenue on Economics Growth. *National Tax Journal*. Vol 21 No. 1.

Cara lain yang bisa dilakukan ialah menggunakan dummy variable<sup>11</sup>. Dengan metode ini penghitungan elastisitas ditambah lagi satu variable sehingga menjadi berikut ini  $\ln(T) = \alpha + \beta_1 \ln(Y) + \beta_2 \text{Dum}$ . Dummy disini 0 pada periode sebelum kebijakan diskresi dilakukan dan 1 setelah kebijakan diskresi diterapkan.

Menurut Choudry (1979) cara-cara diatas mempunyai kelemahan-kelemahan. Cara *proportional adjustment* sering tidak dapat dilakukan karena ketiadaan data yang lengkap tentang berapakah perubahan penerimaan karena perubahan kebijakan. Sedangkan metode *constant rate structure* tidak bisa digunakan apabila lapisan tarif juga berubah. Sementara itu metode dummy variable tidak bisa dipergunakan apabila perubahan kebijakan tersebut terjadi terlalu sering.

Karena itulah Choudry berusaha membuat sebuah metode baru yang ia rasa lebih mudah yaitu metode yang tidak perlu adjustment untuk menghilangkan efek dari kebijakan diskresi. Metode tersebut diberi nama *Divisia Index*. Ada tiga langkah yang dilakukan oleh Choudry disini. Yang pertama ialah efek kebijakan diskresi pada penerimaan diestimasi dengan menggunakan indeks yang memisahkan pertumbuhan otomatis dari pertumbuhan total. Yang kedua menghitung buoyancy dengan metode standar yang sudah dikenal. Ketiga bouancy yang didapat pada langkah kedua kemudian di sesuaikan dengan transformasi indeks dari penerimaan diskresi pada langkah pertama untuk mendapatkan elastisitasnya. Formula ialah  $r = \mu - [\log D(n) / \log (x_n/x_0)]$  dimana  $\mu$  ialah buoyancy dari penerimaan pajak yang didapat dengan meregresi  $\text{Log } T(t) = \alpha + \mu \log x(t)$  dan  $\log D(n) = \log T(n)/T(0) - \sum [(T(t)-T(t-1) / T(t)) * x(t)/x(t-1)]$ .

## 2.12 Elastisitas Basis Pajak

Semisal dalam suatu perekonomian elastisitas penerimaan cukai rokok terhadap PDB adalah 1, yang artinya apabila PDB naik 1% maka penerimaan cukai rokok naik 1% juga. Sepintas dengan elastisitas 1 ini

<sup>11</sup> Bagian ini dari bahan kuliah DFKD: Elastisitas vs Bouyansi Pajak: Konsep dan Cara Pengukuran oleh Iman Rozani (2008).

otoritas cukai berkinerja cukup baik. Namun harus dilihat juga bagaimana elastisitas penjualan rokok, sebagai basis pajak penerimaan cukai rokok, terhadap PDB yang misalnya mencapai 2, yang artinya apabila PDB naik 2% maka penjualan rokok naik 2%. Dengan demikian pertumbuhan penerimaan cukai hanya setengah dari pertumbuhan penjualan rokok.

Karena itulah Shome (1988) dalam kerangka penghitungan buoyancy dan elastisitas menawarkan konsep sebagai berikut:

$b_1$  : tax to base buoyancy :  $\ln(\text{tax}) = a_1 + b_1 \ln(\text{base})$

$b_2$  : adjusted tax-to-base elasticity:  $\ln(\text{tax adjusted for discretionary change}) = a_2 + b_2 \ln(\text{base})$

$b_3$  : base-to-GDP elasticity:  $\ln(\text{base}) = a_3 + b_3 \ln(\text{GDP})$

Overall Buoyancy:  $(b_1) \times (b_3)$

Overall Elasticity:  $(b_2) \times (b_3)$

Jadi menurut Shome penerimaan pajak tidak langsung diregres dengan GDP-nya tetapi dengan basenya, baru kemudian dikalikan dengan hasil regresi antara base dengan GDP, sehingga tercipta buoyancy/elastisitas total.

Namun menurut Dye (2004) menyatakan tidaklah mudah untuk menentukan basis pajak yang sangat mendekati. Kadang-kadang peneliti dihadapkan proksi yang masih kasar sehingga harus diolah lagi. Hal tersebut sering terjadi terutama untuk jenis pajak langsung seperti PPh, sedangkan untuk pajak tidak langsung seperti contoh cukai diatas proksi tersebut lebih mudah dicari.

### 2.13 Elastisitas Pajak di Indonesia

Penelitian-penelitian tentang elastisitas pajak di Indonesia sudah beberapa kali dilakukan. Wahyu (2007) melakukan penelitian tentang elastisitas dan buoyancy pajak daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2001-2005. Jenis pajak yang dilakukan penelitian yaitu pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Metode yang digunakan untuk buoyancy ialah meregres penerimaan tersebut dengan produk domestik regional bruto. Produk domestik regional bruto yang diregres ialah untuk sektor tersier. Sedangkan metode penghitungan elastisitasnya ialah dengan menggunakan *dummy variabel*. Variabel boneka yang diambil disini ialah

perubahan kebijakan yaitu adanya peraturan pemerintah baru tentang pajak-pajak tersebut. Hasil dari penelitian tersebut baik *buoyancy* maupun elastisitas dari pajak daerah kurang dari 1. Artinya pertumbuhan pajak daerah kabupaten dan kota berada dibawah pertumbuhan PDRB. Karena itulah Wahyu menyarankan agar pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur lebih giat dan serius dalam menggali potensi pajak daerah.

Puspasari (2008) meneliti elastisitas dan *buoyancy* pajak penghasilan di Indonesia mulai tahun 1983 sampai 2007. Metode yang digunakan untuk menghitung elastisitas ialah metode divisia yang diperkenalkan oleh Choudry<sup>12</sup>. Hasil dari penelitian ini ialah elastisitas pajak penghasilan di Indonesia ialah 1, sedangkan *buoyancy* 1,32.

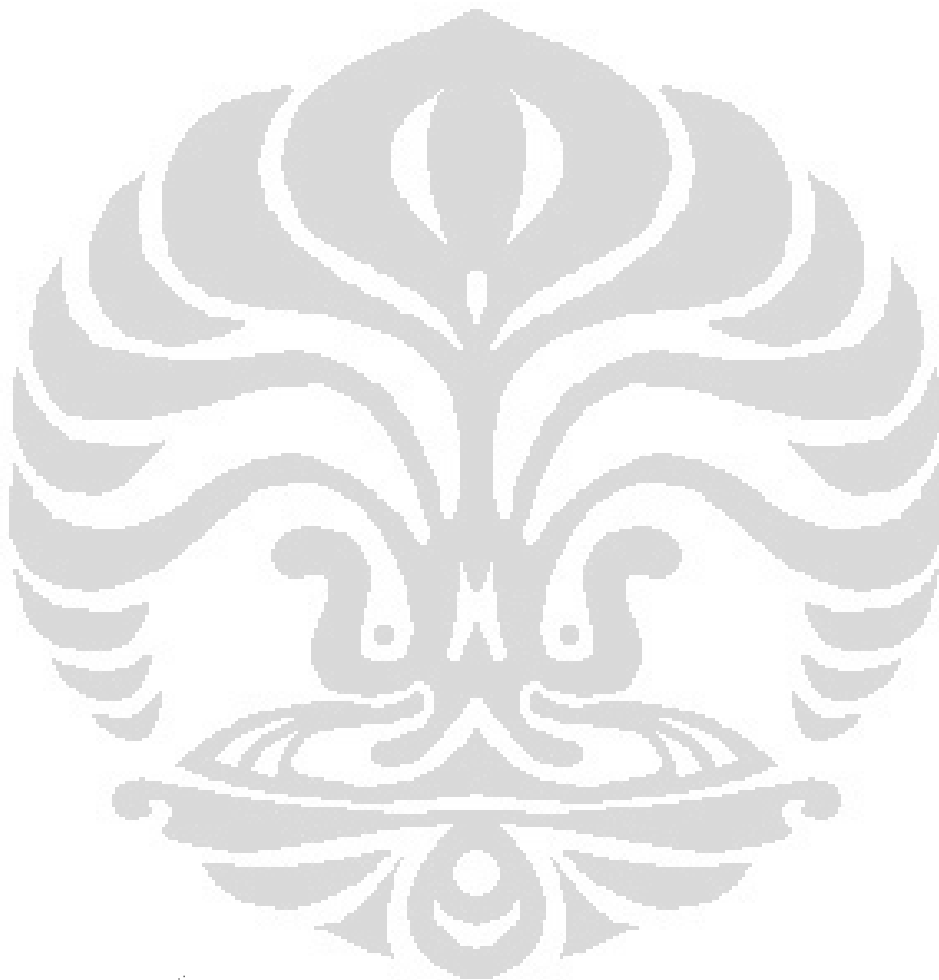
Tresnawati (2006) melakukan penelitian tentang hubungan antara kebijakan fiskal dengan *tax ratio* daerah provinsi di Indonesia antara tahun 1995-2004. Kebijakan fiskal yang digunakan ialah subsidi dalam bentuk dana alokasi umum dan pengeluaran rutin. Penggunaan DAU didasarkan atas pertimbangan bahwa subsidi ini diberikan kepada semua daerah otonom sementara pengeluaran rutin digunakan karena merupakan komponen terbesar pengeluaran daerah sehingga akan mempengaruhi *tax ratio*. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berpengaruh pada *tax ratio*. Faktor lain yang berpengaruh ialah kepadatan penduduk, perkembangan sektor manufaktur dan transportasi serta variabel *dummy* sebelum dan sesudah desentralisasi. Sedangkan yang mempunyai pengaruh negatif ialah PDRB perkapita, *degree of openness*, dan *shadow variable*.

Sementara Syafrudin (2003) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta antara tahun 1997 sampai 2001. Metode yang digunakan bukan ekonometrika tetapi statistik deskriptif. Faktor-faktor yang dianalisa antara lain jumlah penduduk, produk domestik bruto dan jumlah dan jenis kendaraan. Hasil dari penelitian tersebut ialah adanya temuan bahwa pemprov ternyata dinilai belum optimal karena banyak kendaraan yang belum membayar PKB.

---

<sup>12</sup> Lihat Choudry (1979)

Khusus untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Taufiq (2003) menjelaskan bahwa jenis pajak ini, yang mulai berlaku berdasarkan UU No. 19 tahun 1997, memang mampu menggantikan berbagai pajak daerah yang dihilangkan. Akan tetapi proses administrasinya masih mengalami kendala yaitu proses pencairannya yang mengalami keterlambatan.





**BAB III**  
**METODOLOGI PENELITIAN**

**3.1. Spesifikasi Model**

Analisa pertama ialah melihat perbandingan pertumbuhan penerimaan tiap-tiap jenis pajak daerah provinsi. Karena masing-masing jenis pajak daerah mempunyai basis pajak yang berbeda-beda maka yang digunakan sebagai proksi basis pajak ialah produk domestik regional bruto atau *tax to GDP buoyancy*. Model yang digunakan adalah sebagai berikut;

**1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air**

$$\ln PKB_{it} = \alpha_1 + \beta_1 \ln(PDRB_{it}) \dots \dots \dots (3.1)$$

PKB = penerimaan PKB

PDRB = produk domestik regional bruto

**2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air**

$$\ln BBNKB_{it} = \alpha_1 + \beta_1 \ln(PDRB_{it}) \dots \dots \dots (3.2)$$

BBNKB = penerimaan BBNKB

PDRB = produk domestik regional bruto

**3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....(3.3)**

$$\ln PBBKB_{it} = \alpha_1 + \beta_1 \ln(PDRB_{it})$$

PBBKB = penerimaan PBBKB

PDRB = produk domestik regional bruto

**4. Pajak Penggunaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan**

$$\ln PABTAPU_{it} = \alpha_1 + \beta_1 \ln(PDRB_{it}) \dots \dots \dots (3.4)$$

PABTAPU = penerimaan PABPAPU

PDRB = produk domestik regional bruto

Berikutnya dianalisa pertumbuhan tiap-tiap jenis basis pajak daerah provinsi dengan PDRB masing-masing atau *Base to GDP Elasticity*. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

**1. Jumlah Kendaraan Bermotor**

$$\ln JKB_{it} = \alpha_2 + \beta_2 \ln(PDRB_{it}) \dots \dots \dots (3.5)$$

JKB = Jumlah Kendaraan Bermotor

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

## 2. Penjualan Kendaraan Bermotor

$$\ln KBB_{it} = \alpha_2 + \beta_2 \ln(PDRB_{it}) \dots \dots \dots (3.6)$$

KBB = Penjualan Kendaraan Bermotor

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

## 3. Konsumsi Premium

$$\ln KPRE_{it} = \alpha_2 + \beta_2 \ln(PDRB_{it}) \dots \dots \dots (3.7)$$

KPRE = Konsumsi Premium

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

Setelah itu dianalisa pertumbuhan penerimaan tiap-tiap jenis pajak daerah provinsi terhadap basis pajaknya masing-masing atau *Tax to Base Buoyancy*. Khusus untuk PABTAPU, karena tidak diketemukan basis pajak yang sesuai analisa ini tidak dilakukan. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

## 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air

$$\ln PKB_{it} = \alpha_3 + \beta_3 \ln(JKB_{it}) \dots \dots \dots (3.8)$$

PKB = penerimaan PKB

JKB = jumlah kendaraan bermotor

## 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air

BBNKB = penerimaan BBNKB

$$\ln BBNKB_{it} = \alpha_3 + \beta_3 \ln(KBB_{it}) \dots \dots \dots (3.9)$$

KBB = penjualan kendaraan bermotor

## 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PBBKB = penerimaan PBBKB

$$\ln PBBKB_{it} = \alpha_3 + \beta_3 \ln(KPRE_{it}) \dots \dots \dots (3.10)$$

KPRE = konsumsi premium

Berikutnya dianalisa pertumbuhan penerimaan tiap-tiap jenis pajak daerah provinsi terhadap PDRB masing-masing dengan melihat pengaruh revisi undang-undang atau *Tax to GDP elasticity*. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

## 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air

$$\ln PKB_{it} = \alpha_4 + \beta_4 \ln(PDRB_{it}) + \gamma_4 \text{Dum} \dots \dots \dots (3.11)$$

PKB = penerimaan PKB

PDRB = produk domestik regional bruto

Dum = UU No. 34 tahun 2000

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air

$$\ln \text{BBNKB}_{it} = \alpha_4 + \beta_4 \ln(\text{PDRB}_{it}) + \gamma_4 \text{Dum} \dots \dots \dots (3.12)$$

BBNKB = penerimaan BBNKB

PDRB = produk domestik regional bruto

Dum = UU No. 34 tahun 2000

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

$$\ln \text{PBBKB}_{it} = \alpha_4 + \beta_4 \ln(\text{PDRB}_{it}) + \gamma_4 \text{Dum} \dots \dots \dots (3.13)$$

PBBKB = penerimaan PBBKB

PDRB = produk domestik regional bruto

Dum = UU No. 34 tahun 2000

Pengaruh revisi UU tersebut juga dimasukkan dalam analisa pertumbuhan penerimaan tiap-tiap jenis pajak daerah provinsi atau *tax to GDP elasticity*. Model yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air

$$\ln \text{PKB}_{it} = \alpha_5 + \beta_5 \ln(\text{JKB}_{it}) + \gamma_5 \text{Dum} \dots \dots \dots (3.14)$$

JKB = jumlah kendaraan bermotor

PKB = penerimaan PKB

Dum = UU No. 34 tahun 2000

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air

$$\ln \text{BBNKB}_{it} = \alpha_5 + \beta_5 \ln(\text{JKBB}_{it}) + \gamma_5 \text{Dum} \dots \dots \dots (3.15)$$

BBNKB = penerimaan BBNKB

KBB = penjualan kendaraan bermotor

Dum = UU No. 34 tahun 2000

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PBBKB = penerimaan PBBKB

$$\ln \text{PBBKB}_{it} = \alpha_5 + \beta_5 \ln(\text{KBBM}_{it}) + \gamma_5 \text{Dum} \dots \dots \dots (3.16)$$

KPRE = konsumsi premium

Dum = UU No. 34 tahun 2000

Selisih antara  $\beta_1$  dan  $\beta_4$  serta  $\beta_3$  dan  $\beta_5$  adalah besarnya pengaruh perubahan undang-undang tersebut. Apabila nilai koefisien elastisitas lebih rendah daripada buoyancy maka perubahan tersebut berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah provinsi.

Berbagai data elastisitas diatas kemudian digabungkan untuk mencari elastisitas total dan buoyancy total, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Buoyancy Total} = \beta_3 (\text{tax to base buoyancy}) \times \beta_2 (\text{base to GDP elasticity})$$

$$\text{Elastisitas Total} = \beta_4 (\text{tax to base elasticity}) \times \beta_2 (\text{base to GDP elasticity})$$

Buoyancy total itu kemudian akan dibandingkan *tax to GDP buoyancy* ( $\beta_2$ ) sedangkan elastisitas total itu akan dibandingkan dengan *tax to GDP elasticity* ( $\beta_5$ ).

Tabel 3.1. Jenis dan Sumber Data

Variabel	Definisi	Sumber Data	Terbitan
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air	Buku APBD	DJPK Depkeu
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air	Buku APBD	DJPK Depkeu
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Buku APBD	DJPK Depkeu
PABTAPU	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	Buku APBD	DJPK Depkeu
TPROV	Total Pajak Daerah Provinsi	Buku APBD	DJPK Depkeu
JKB	Jumlah Kendaraan Bermotor	Buku Statistik Perhubungan	BPS
KBB	Kendaraan Bermotor Baru	Buku Statistik Perhubungan	BPS
KBBKB	Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Buku Statistik Energi	BPS
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto	National Account	BPS

### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dari berbagai sumber untuk periode antara tahun 2001 sampai 2006. Masing-masing data untuk 26 (tigapuluh) daerah provinsi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 3.1. diatas.

### 3.3. Definisi Operasional Variabel-Variabel

#### 3.3.1. Jumlah Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor ialah segala jenis alat pengangkutan yang digerakkan oleh mesin. Kendaraan bermotor sangat diperlukan untuk mobilitas manusia dan barang. Karena itulah semua sektor perekonomian membutuhkan kendaraan bermotor dalam melakukan aktivitasnya. Sektor industri manufaktur misalnya membutuhkan truk untuk mengangkut bahan baku ke pabrik dan bahan jadi untuk dipasarkan. Sektor pertanian perlu alat angkut guna mengirim benih dan pupuk ke ladang, sawah, atau kebun. Kemudian hasil panen juga dikirim dengan mobil. Jumlah kendaraan bermotor pasti akan naik seiring dengan pertumbuhan perekonomian.

Dasar pengenaan pajak guna penghitungan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor diatas air (PKB) ialah nilai jual kendaraan bermotor. Khusus untuk kendaraan yang berjalan di darat juga ditimbang dengan bobot kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan tahun pembuatannya. Semakin mahal harga kendaraan maka PKB akan semakin besar. Namun seiring dengan bertambahnya usia kendaraan bermotor yang berakibat menurunnya nilai jual kendaraan maka PKB juga akan turun.

Dalam penghitungan elastisitas dan *buoyancy* PKB, yang paling tepat untuk dijadikan basis pajak ialah nilai jual semua kendaraan bermotor yang ada di tiap-tiap provinsi. Caranya ialah mengkalikan jumlah kendaraan untuk tiap-tiap jenis dan tahun pembuatan dengan harga jualnya. Namun cara ini membutuhkan kunjungan ke Dinas Pendapatan Daerah tiap-tiap provinsi karena data tersebut tidak tersedia di pusat. Karena adanya keterbatasan tersebut maka proksi yang digunakan disini ialah jumlah kendaraan bermotor yang ada di tiap-tiap provinsi di Indonesia menurut BPS. Kendaraan bermotor tersebut hanya yang berjalan di darat tidak termasuk kendaraan bermotor diatas air karena alasan yang sama.

### 3.3.2. Penjualan Kendaraan Bermotor

Dengan adanya perkembangan perekonomian maka penjualan kendaraan bermotor baru akan semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya pendapatan maka masyarakat akan mampu menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk membeli kendaraan bermotor baik sepeda motor atau mobil, baru atau bekas, dan secara kredit atau cash. Begitu juga para pengusaha akan membeli kendaraan niaga baru saat usaha mereka meningkat.

Dasar pengenaan pajak guna penghitungan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor diatas air (BBNKB) ialah nilai jual kendaraan bermotor. Dalam penghitungan elastisitas dan *buoyancy* BBNKB, yang paling tepat untuk dijadikan basis pajak ialah nilai jual semua kendaraan bermotor yang dibaliknamakan di tiap-tiap provinsi. Balik nama disini baik untuk kendaraan baru atau penyerahan pertama maupun kendaraan bekas atau penyerahan kedua dan seterusnya. Namun hal itu menghadapi kendala yaitu untuk penyerahan kendaraan bekas banyak yang tidak dibaliknamakan. Hal lain ialah tidak tersedianya data penjualan mobil bekas di pusat. Seperti untuk tujuan PKB diatas data tersebut membutuhkan kunjungan ke Dinas Pendapatan Daerah tiap-tiap provinsi. Karena adanya keterbatasan tersebut maka selisih jumlah kendaraan bermotor tiap-tiap tahun menurut BPS dijadikan proksi dari basis BBNKB. Kendaraan bermotor tersebut hanya yang berjalan di darat tidak termasuk kendaraan bermotor diatas air karena alasan yang sama.

### 3.3.3. Konsumsi Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Kenaikan jumlah kendaraan bermotor akan menaikkan konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor. Dalam rangka pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), sesuai dengan namanya, yang dipungut ialah bahan bakar untuk kendaraan bermotor yang berjalan di jalan raya, antara lain bensin, solar, dan gas. Karena itulah yang paling tepat untuk dijadikan basis pajak ialah nilai semua bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor di tiap-tiap provinsi di Indonesia.

Caranya ialah mengalikan konsumsi tiap-tiap jenis bahan bakar dengan harga bahan bakar.

Pada data yang tersedia di BPS terdapat konsumsi beberapa jenis bahan bakar kendaraan bermotor. Namun menurut penulis hanya konsumsi bensin yang layak dijadikan proksi basis pajak. Hal tersebut karena konsumsi solar tidak dibedakan antara penggunaan solar untuk kendaraan bermotor di jalan raya dan solar untuk kendaraan jenis lain antara lain kereta api dan kapal serta mesin-mesin pabrik. Begitu juga dengan konsumsi gas tidak dibedakan mana yang untuk rumah tangga, industri, atau kendaraan bermotor.

Konsumsi bensin untuk tiap-tiap provinsi kemudian dikalikan dengan nilai tertimbang harga bensin. Hal itu karena harga bensin mengalami kenaikan dan penurunan tidak pada setiap awal dan akhir tahun.

#### 3.3.4. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto disini ialah PDRB secara agregat dan tidak dibagi menjadi tiap-tiap sektor. Hal ini karena basis pajak daerah yaitu kendaraan dan bahan bakar dipergunakan oleh semua sektor dalam perekonomian.

Sedangkan PDRB yang dipakai ialah PDRB nominal yang menggunakan harga berlaku riil yang menggunakan harga konstan. Hal ini karena penerimaan pajak juga nominal yang tidak disesuaikan dulu dengan faktor perubahan harga atau inflasi dan deflasi.

#### 3.3.5. Dummy Variabel

Dalam analisis regresi seringkali ditemukan variabel terikat dipengaruhi tidak hanya variabel kuantitatif melainkan juga kualitatif. Contoh variabel kualitatif adalah jenis kelamin, ras, warna kulit, lokasi, dan sebagainya. Pada penghitungan elastisitas disini variabel kualitatif tersebut ialah revisi UU No. Tahun 1997 melalui UU No. 34 tahun 2000. Revisi UU tersebut diambil karena berlaku disemua provinsi di Indonesia. Memang terdapat kebijakan diskresi lain yang mungkin dilakukan oleh masing-masing

provinsi di Indonesia. Namun karena penelitian disini bersifat nasional, hal tersebut tidak dimasukkan sebagai variabel.

Karena itulah dummy variable dapat dilihat pada tabel berikut ini dimana 1 untuk sesudah berlakunya UU No. 34 tahun 2000 dan 0 untuk sebelum berlakunya UU No. 34 tahun 2000. Dummy variabel 1 dengan asumsi perubahan undang-undang tersebut berpengaruh langsung pada tahun 2001, dummy variabel 2 dengan asumsi perubahan undang-undang tersebut berpengaruh langsung pada tahun 2001, dan dummy variabel 3 dengan asumsi perubahan undang-undang tersebut berpengaruh langsung pada tahun 2001.

Tabel 3.2. Dummy Variabel

Jenis Pajak	Dummy		
	1	2	3
2001	0	0	0
2002	1	0	0
2003	1	1	0
2004	1	1	1
2005	1	1	1
2006	1	1	1

#### 3.4. Metode Pengolahan Data

Karena data yang digunakan untuk penelitian ialah data sekunder maka tidak terdapat metode pengumpulan data secara khusus. Data yang didapat dari berbagai sumber langsung dapat diolah.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *polled data* atau disebut juga data panel dimana data *time series* atau data *cross section* digabungkan sehingga jumlah observasi menjadi jumlah tahun pajak dikalikan dengan jumlah provinsi. Dengan analisis regresi data panel, dapat menangkap dinamika dengan lebih baik dari hubungan antar variabel.

Data-data yang diperoleh dianalisis secara statistik, ekonometrika, dan ekonomi. Menurut kriteria ekonomi tanda (positif/negatif) dari masing-masing variabel independen sudah benar. Begitu juga tanda elastisitasnya bila menggunakan model log. Sedangkan menurut kriteria statistik pengujian



$t$  untuk masing-masing variabel independen dan pengujian  $F$  untuk keseluruhan variabel harus signifikan. Sedangkan untuk  $R^2$  dari model haruslah mendekati 1 agar garis regresi mendekati data sesungguhnya. Sementara menurut kriteria ekonometrik model tersebut tidak melanggar asumsi baik heteroskedastisitas, multikoleniaritas, maupun autokorelasi.

### 3.5. Metode Analisis Data

Pemodelan dengan menggunakan metode estimasi OLS (*Ordinary Least Square*) dengan asumsi BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*) untuk mendapatkan penyimpangan kesalahan terkecil. Beberapa asumsi klasik yang harus terpenuhi menurut Gujarati (2003) ialah:

1. Model regresi linear
2. Nilai  $X$  adalah tetap, fixed, pada setiap sampel yang diulang
3. Nilai rata-rata residu akan sama dengan nol
4. Homoskedastik atau nilai varian yang konstan dari residu
5. Tidak ada autokorelasi antara residu
6. Kovarian bernilai nol antara  $u_i$  dan  $X_i$  atau  $E_i(u_i X_i) = 0$
7. Jumlah observasi harus lebih besar dari jumlah parameter yang diestimasi
8. Nilai variabel  $X$  harus bervariasi
9. Model Regresi Linear harus teridentifikasi secara tepat
10. Tidak ada hubungan linear yang terjadi secara sempurna

Khusus estimasi dengan data panel Menurut Baltagi (1995) memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Dapat mengendalikan heterogenitas antara individu
2. Dengan mengkombinasikan observasi berdasarkan *time series* dan *cross section*, maka data panel akan memberikan informasi yang relative lengkap, bervariasi, koleniaritas antar antar variabel menjadi berkurang, serta meningkatkan derajat kebebasan sehingga lebih efisien.
3. Dapat meneliti karakteristik individu yang mencerminkan dinamika antar waktu dan masing-masing variabel bebas, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif dan mencakup hal-hal yang mendekati realita.

4. Data panel dapat digunakan dalam membangun dan menguji model perilaku yang lebih kompleks.

Sedangkan kelemahannya menurut Baltagi (1995) sebagai berikut:

1. Masalah pengumpulan data dan desain
2. Kemungkinan distorsi dan kesalahan pengukuran
3. Dimensi seri waktu yang lebih pendek

Untuk data panel struktur intersep dan hubungan slope antar variabel dikelompokkan menjadi tiga (Baltagi, 1995):

1. Metode Estimasi *Common Effect* dimana intersep  $\alpha$  dan  $\beta$  slope sama untuk setiap individu.
2. Metode Estimasi *Fixed Effect* dimana intersep  $\alpha$  berbeda untuk masing-masing individu.
3. Metode Estimasi *Random Effect* dimana untuk intersep  $\alpha$  berbeda untuk masing-masing individu tetapi perbedaannya dikarenakan residual sehingga  $\alpha_i = \bar{\alpha}_0 + u_i$ .

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1. Penerimaan Pajak Daerah Provinsi

Dari tabel 4.1. dibawah ini dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah provinsi di Indonesia antara tahun 2001 dan 2006 mengalami pertumbuhan yang tinggi. Pada tahun 2001 total penerimaan pajak daerah provinsi mencapai Rp. 7,8 trilyun mengalami kenaikan tiga kali lipat lebih menjadi Rp. 23,9 trilyun di tahun 2006.

Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Daerah Provinsi (per provinsi dalam milyar Rp)

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	43	73	87	138	177	310
2	Sumut	388	584	862	1.081	1.301	1.366
3	Sumbar	109	167	219	307	376	409
4	Riau	252	394	539	610	656	765
5	Jambi	72	124	181	246	282	311
6	Sumsel	165	226	310	414	511	650
7	Bengkulu	23	36	52	81	93	116
8	Lampung	110	189	254	351	468	508
9	Babel	0	51	65	107	172	174
10	Kepri	0	0	0	70	162	260
11	Jakarta	2.338	2.832	3.437	4.310	5.066	4.720
12	Jabar	1.127	1.435	2.008	2.688	3.386	3.449
13	Jateng	695	1.024	1.092	1.603	1.996	2.160
14	Yogya	124	176	228	308	360	387
15	Jatim	1.150	1.554	1.910	2.540	3.089	3.257
16	Banten	204	430	603	797	1.038	1.071
17	Bali	285	325	335	509	663	639
18	Kalbar	96	153	176	226	254	315
19	Kalteng	27	54	70	96	128	118
20	Kalsel	96	173	239	331	454	478
21	Kaltim	145	282	388	521	695	788
22	Sulut	60	86	97	120	159	167
23	Sulteng	48	72	84	103	120	135
24	Sulsel	160	260	357	470	565	660
25	Sultra	21	33	54	65	74	85
26	Gorontalo	7	12	25	30	37	45
27	Sulbar	0	0	0	0	20	31
28	NTB	49	74	91	126	147	190
29	NTT	22	41	52	77	86	102
30	Maluku	3	10	26	41	51	49
31	Malut	5	7	14	15	24	24
32	Irjabar	0	0	0	0	12	18
33	Papua	40	43	60	126	136	163
	Jumlah	7.846	10.919	13.915	18.507	22.761	23.921

Dari tabel 4.2 dibawah ini dapat diketahui bahwa bagian terbesar penerimaan pajak daerah provinsi masih dimiliki oleh provinsi-provinsi di pulau Jawa. Meskipun demikian dominasi tersebut semakin menurun. Pada tahun 2001 penerimaan pajak provinsi-provinsi di Jawa mencapai Rp. 5,9 trilyun atau sekitar 75% dari total penerimaan sebesar Rp. 7,8 trilyun. Sedangkan pada tahun 2006 menurun menjadi 65% atau Rp. 15,6 trilyun dari total penerimaan Rp. 23,9.

Tabel 4.2 Penerimaan Pajak Daerah Provinsi (per wilayah dalam milyar Rp)

No	Wilayah	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Sumatera	1,163	1,844	2,568	3,405	4,199	4,869
2	Jawa	5,922	7,775	9,613	12,755	15,599	15,683
3	Kalimantan	364	663	873	1,174	1,531	1,699
4	Timur	414	636	861	1,173	1,432	1,669
	Jumlah	7.846	10.919	13.915	18.507	22.761	23.921

#### 4.2. Rasio Pajak Daerah Provinsi terhadap PAD

Dari tabel 4.3, dan 4.4 dibawah dapat diketahui bahwa rasio penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tinggi. Rata-rata rasio untuk seluruh provinsi di Indonesia selalu diatas 75%. Tidak terdapat perbedaan yang mencolok diantara provinsi-provinsi. Dengan demikian pajak daerah provinsi menjadi sumber utama PAD bagi provinsi-provinsi di Indonesia ketimbang sumber lainnya antara lain retribusi daerah dan keuntungan BUMD.

#### 4.3. Rasio PAD terhadap Penerimaan Provinsi

Dari tabel 4.5 dibawah dapat diketahui bahwa rasio PAD terhadap penerimaan rendah. Rata-rata rasio untuk seluruh provinsi di Indonesia paling tinggi 52% yang dicapai tahun 2004, tetapi kemudian turun lagi menjadi 44% ditahun 2006. Terdapat perbedaan mencolok rasio antara provinsi-provinsi di Jawa dan provinsi-provinsi di luar Jawa.

Tabel 4.3. Rasio Pajak Daerah Provinsi terhadap PAD (per provinsi dalam %)

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	88.92	78.38	83.93	69.68	67.71	64.95
2	Sumut	91.71	95.06	94.90	95.19	95.54	90.94
3	Sumbar	77.70	78.26	77.76	81.93	83.87	82.67
4	Riau	84.15	78.19	81.77	86.37	85.23	79.25
5	Jambi	83.02	82.73	80.15	86.09	81.69	80.78
6	Sumsel	86.53	77.96	72.44	83.88	86.54	87.51
7	Bengkulu	73.59	79.51	75.20	76.86	76.41	70.13
8	Lampung	74.54	79.77	82.75	85.41	85.21	80.38
9	Babel	17.85	86.74	90.28	93.32	91.43	87.59
10	Kepri	0	0	0	100.00	99.53	90.41
11	Jakarta	64.16	62.79	65.31	67.03	66.68	60.52
12	Jabar	93.03	92.49	92.53	94.43	93.93	92.02
13	Jateng	83.60	82.41	73.23	85.92	80.15	82.13
14	Yogya	86.81	87.41	86.66	88.53	89.60	89.31
15	Jatim	87.73	86.46	86.96	88.80	89.16	87.95
16	Banten	98.35	97.65	98.04	97.41	96.98	95.80
17	Bali	71.16	69.84	87.66	90.93	89.29	87.55
18	Kalbar	89.03	91.06	88.73	85.30	85.87	91.90
19	Kalteng	78.97	78.31	78.73	85.53	83.14	54.60
20	Kalsel	73.59	81.79	85.98	90.89	85.72	82.01
21	Kaltim	74.04	60.77	64.25	73.80	77.42	65.80
22	Sulut	77.11	81.78	81.23	81.87	79.99	78.96
23	Sulteng	86.57	85.77	83.78	83.71	84.91	84.26
24	Sulsel	79.73	79.92	80.11	83.46	83.66	85.13
25	Sultra	69.36	69.09	70.59	70.90	73.28	66.50
26	Gorontalo	89.68	86.21	69.85	80.42	81.13	83.27
27	Sulbar	0	0	0	0	98.84	87.79
28	NTB	72.94	70.66	69.97	74.28	74.93	71.87
29	NTT	50.30	50.05	55.59	62.07	60.63	57.71
30	Maluku	23.65	50.51	67.67	70.92	66.11	62.21
31	Malut	86.08	82.17	87.41	80.83	90.84	70.73
32	Irijabar	0	0	0	0	94.36	148.22
33	Papua	63.04	56.67	63.08	77.60	68.62	76.07
	Indonesia	77.47	76.94	78.87	82.02	81.62	78.44

Tabel 4.4. Rasio Pajak Daerah Provinsi terhadap PAD (per wilayah dalam %)

No	Wilayah	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Sumatera	84.87	83.61	84.10	87.42	87.48	83.22
2	Jawa	76.44	76.17	77.65	81.09	80.52	77.78
3	Kalimantan	77.74	72.56	74.66	81.12	81.56	72.64
4	Timur	73.42	73.63	74.72	78.51	78.03	77.83
	Indonesia	77.47	76.94	78.87	82.02	81.62	78.44

Tabel 4.5. Rasio PAD terhadap Penerimaan Provinsi (per provinsi dalam %)

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	9.90	6.12	11.82	14.14	10.78	11.72
2	Sumut	47.90	59.70	65.19	68.89	72.43	65.75
3	Sumbar	34.81	44.15	49.94	55.87	59.11	47.17
4	Riau	19.97	30.13	36.40	36.13	30.14	27.93
5	Jambi	32.91	39.11	43.97	44.58	46.70	38.12
6	Sumsel	34.42	39.78	46.13	46.13	42.89	39.79
7	Bengkulu	17.42	20.77	23.16	30.45	32.46	29.68
8	Lampung	35.11	41.93	43.82	49.99	52.55	48.80
9	Babel	1.90	25.89	26.07	35.30	43.26	37.10
10	Kepri	0	0	0	43.51	40.75	25.38
11	Jakarta	49.73	53.16	53.91	55.79	56.84	54.47
12	Jabar	56.24	61.05	69.59	70.39	74.71	74.27
13	Jateng	48.70	57.67	67.55	70.27	75.52	68.93
14	Yogya	36.83	44.65	52.46	55.08	59.18	49.14
15	Jatim	60.34	65.32	73.78	76.83	79.20	72.90
16	Banten	45.98	47.41	55.31	61.21	67.20	70.61
17	Bali	67.69	68.80	61.76	70.26	73.97	63.37
18	Kalbar	29.63	38.59	37.98	43.28	43.83	33.90
19	Kalteng	11.25	20.62	21.99	24.40	29.26	24.26
20	Kalsel	33.52	42.61	49.93	54.68	57.74	49.52
21	Kaltim	11.32	23.54	27.68	27.86	24.32	25.67
22	Sulut	24.93	26.66	30.57	37.53	41.85	32.32
23	Sulteng	25.02	28.94	27.49	30.34	31.35	23.53
24	Sulsel	38.24	49.35	52.48	55.78	58.64	53.36
25	Sultra	14.99	19.84	23.18	26.30	26.25	21.11
26	Gorontalo	9.99	9.52	15.79	14.77	17.07	11.67
27	Sulbar	0	0	0	0	20.61	11.00
28	NTB	19.58	29.79	31.00	35.64	37.57	35.77
29	NTT	13.04	22.31	23.24	27.03	28.67	25.01
30	Maluku	5.71	8.10	12.39	15.71	19.39	14.20
31	Malut	3.68	4.68	6.57	6.78	8.71	7.98
32	Irjabar	0	0	0	0	4.52	2.29
33	Papua	8.29	3.73	12.75	21.98	22.50	4.38
	<b>Indonesia</b>	<b>39.73</b>	<b>43.08</b>	<b>49.87</b>	<b>52.81</b>	<b>52.95</b>	<b>44.26</b>

Tabel 4.6. Rasio PAD terhadap Penerimaan Provinsi (per wilayah dalam %)

No	Wilayah	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Sumatera	28.51	32.32	41.50	43.08	40.02	33.91
2	Jawa	52.38	56.75	61.00	63.65	66.48	63.25
3	Kalimantan	16.82	28.19	31.90	33.87	32.32	30.21
4	Timur	17.83	17.68	26.87	31.78	32.10	17.83
	<b>Indonesia</b>	<b>39.73</b>	<b>43.08</b>	<b>49.87</b>	<b>52.81</b>	<b>52.95</b>	<b>44.26</b>

Dari table 4.6 diatas dapat diketahui bahwa rasio PAD terhadap total penerimaan provinsi-provinsi di pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan

dengan provinsi-provinsi lainnya. Berturut-turut di bawah Jawa ialah Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Meskipun demikian beberapa provinsi di luar Jawa seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan rasionya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini karena perekonomian di provinsi-provinsi tersebut sudah lebih maju sektor industri dan jasa dibandingkan provinsi-provinsi yang perekonomiannya masih mengandalkan sektor pertanian.

Tabel 4.7. Rasio Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB (per provinsi dalam %)

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	0.12	0.17	0.18	0.27	0.31	0.44
2	Sumut	0.49	0.65	0.83	0.92	0.93	0.85
3	Sumbar	0.42	0.56	0.66	0.82	0.84	0.77
4	Riau	0.23	0.36	0.55	0.53	0.47	0.46
5	Jambi	0.63	0.90	1.13	1.33	1.25	1.19
6	Sumsel	0.35	0.46	0.55	0.64	0.63	0.68
7	Bengkulu	0.42	0.58	0.72	1.00	0.92	1.02
8	Lampung	0.43	0.65	0.78	0.97	1.14	1.03
9	Babel	0.01	0.68	0.63	0.91	1.21	1.09
10	Kepri	0.00	0.00	0.00	0.19	0.39	0.56
11	Jakarta	0.89	0.94	1.03	1.15	1.17	0.94
12	Jabar	0.51	0.59	0.73	0.88	0.87	0.73
13	Jateng	0.52	0.67	0.64	0.83	0.85	0.77
14	Yogya	0.81	1.00	1.16	1.40	1.42	1.32
15	Jatim	0.57	0.58	0.64	0.74	0.77	0.69
16	Banten	0.39	0.71	0.91	1.08	1.23	1.09
17	Bali	1.41	1.36	1.28	1.76	1.95	1.71
18	Kalbar	0.45	0.64	0.68	0.76	0.75	0.84
19	Kalteng	0.22	0.39	0.44	0.53	0.61	0.48
20	Kalsel	0.50	0.83	0.94	1.18	1.43	1.38
21	Kaltim	0.16	0.30	0.36	0.39	0.39	0.39
22	Sulut	0.51	0.67	0.69	0.77	0.85	0.78
23	Sulteng	0.46	0.61	0.65	0.70	0.70	0.70
24	Sulse	0.46	0.67	0.83	0.97	1.09	1.08
25	Sultra	0.30	0.41	0.61	0.63	0.57	0.56
26	Gorontalo	0.38	0.56	1.01	1.09	1.07	1.10
27	Sulbar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.60
28	NTB	0.31	0.45	0.52	0.57	0.57	0.67
29	NTT	0.24	0.40	0.46	0.59	0.58	0.60
30	Maluku	0.10	0.28	0.70	1.00	1.12	0.97
31	Malut	0.24	0.36	0.64	0.61	0.95	0.86
32	Iriabar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.20
33	Papua	0.16	0.16	0.25	0.51	0.31	0.35
	Indonesia	0.52	0.63	0.71	0.84	0.85	0.77

Tabel 4.8. Rasio Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB (per provinsi dalam %)

No	Wilayah	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Sumatera	0.34	0.49	0.59	0.69	0.71	0.70
2	Jawa	0.65	0.73	0.80	0.95	0.97	0.83
3	Kalimantan	0.25	0.43	0.50	0.56	0.57	0.57
4	Timur	0.34	0.48	0.59	0.71	0.69	0.71
	Indonesia	0.52	0.63	0.71	0.84	0.85	0.77

#### 4.4. Rasio Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB

Dari tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa rasio pajak daerah provinsi-provinsi di Jawa adalah yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi di luar Jawa sekaligus melebihi rata-rata nasional. Yang menarik disini ialah rasio provinsi-provinsi di Indonesia Timur melebihi rasio provinsi-provinsi di Kalimantan dan menyamai rasio provinsi-provinsi di Sumatera. Padahal rasio PAD terhadap total penerimaan provinsi-provinsi di Indonesia Timur lebih rendah dari rasio provinsi-provinsi di Kalimantan dan Sumatera. Hal ini karena provinsi-provinsi di Indonesia Timur menerima Dana Perimbangan dari pemerintah pusat yang lebih besar dari wilayah lainnya. Sehingga rasio total penerimaan, dari PAD dan DP, terhadap PDRB lebih tinggi dibanding provinsi yang lainnya.



## BAB V PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

### 5.1. Latar Belakang Perubahan

Seperti yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa selain perkembangan perekonomian yang ditandai dengan kenaikan PDRB, pertumbuhan penerimaan pajak juga bisa dipengaruhi oleh berbagai kebijakan diskret/tertentu antara lain perubahan tarif, penambahan basis pajak, dan juga adanya peraturan perundang-undangan baru di bidang perpajakan.

Sebelum tahun 1997 terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Masing-masing peraturan mengatur sendiri tiap-tiap jenis pajak yang berbeda-beda. Peraturan tersebut antara lain Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934, Ordonansi Pajak Potong 1936, UU No. 12 tahun 1947 tentang Pajak Radio, UU No. 14 tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I, UU Darurat No. 11 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU Darurat No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, UU No. 74 tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing, dan UU No. 74 tahun 1958 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Melalui UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengaturan semua jenis pajak daerah dilaksanakan dalam satu UU.

Pajak daerah provinsi kini menurut UU No. 18 tahun 1997 terdapat tiga jenis, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. PKB dan BBNKB sebelumnya sudah merupakan pajak daerah provinsi, tetapi PBBKB adalah jenis pajak baru yang diperkenalkan dalam UU ini.

### 5.2. Pokok-Pokok Perubahan

Pada tahun 2000 dilakukan perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 melalui UU No. 34 tahun 2000. Perubahan ini disebabkan dengan adanya kebutuhan suatu UU yang sesuai dengan paket UU otonomi daerah yaitu UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Beberapa hal penting yang menjadi perubahan khusus untuk pajak daerah provinsi ialah:

Tabel 5.1. Perbedaan UU No. 18 tahun 1997 dengan UU No. 34 tahun 2000

Pokok Perubahan	UU No. 18 Tahun 1997	UU No. 34 Tahun 2000
1. Jenis Pajak	3 Jenis	4 Jenis (ditambah PABTAPU)
2. Basis Pajak PKB dan BBNKB	Kendaraan Bermotor saja	Ditambah Kendaraan Bermotor di Atas Air
3. Pajak Daerah Baru	Dapat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota maupun Provinsi	Dapat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota saja
4. Bagi Hasil Pajak		
a. PKB	Tidak Dibagihasilkan	30% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
b. BBNKB	Tidak Dibagihasilkan	30% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
c. PBBKB	90% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota	70% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
d. PABTAPU	Belum Ada	70% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

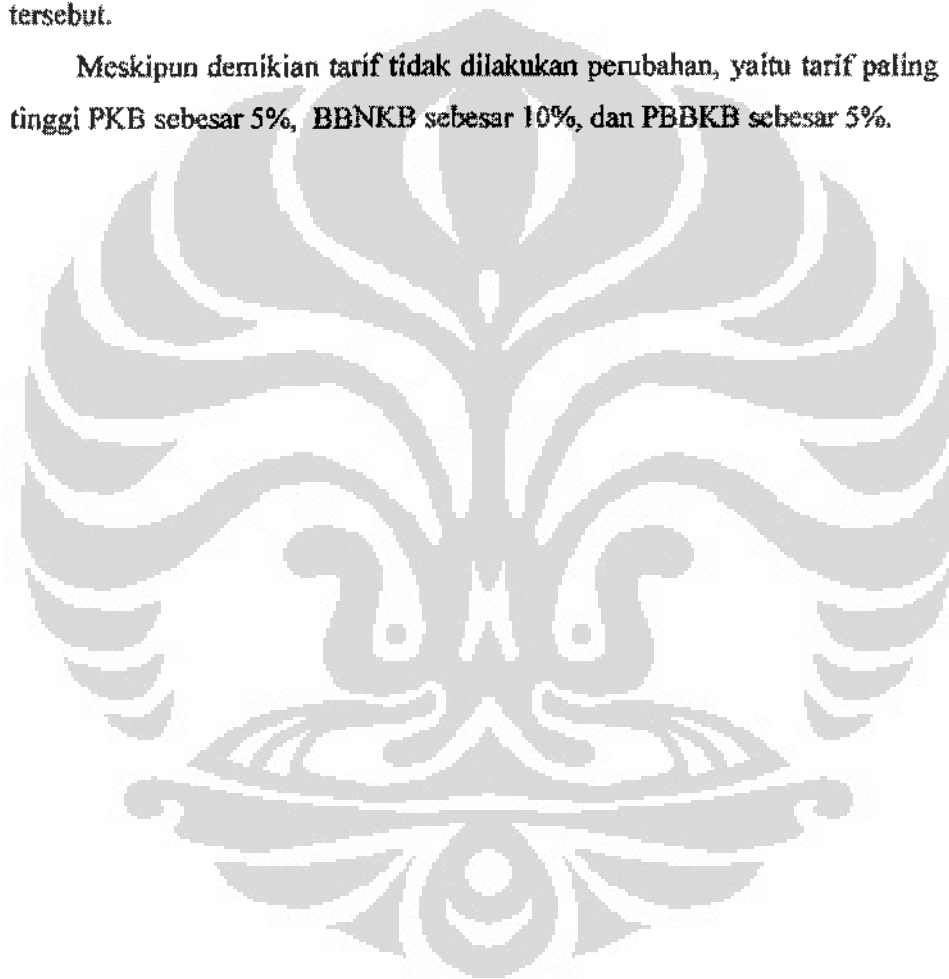
Pengesahan UU tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak tanggal 20 Desember 2000 dan berlaku sejak tanggal tersebut. Akan tetapi berdasarkan pasal 2 ayat 3 ketentuan tentang obyek, subyek, dan dasar pengenaan pajak harus diatur dengan peraturan pemerintah. Sampai akhir tahun 2000 peraturan pemerintah tersebut belum terbit sehingga data penerimaan pajak daerah pada tahun 2001 masih mengacu pada UU No.18 tahun 1997. Baru pada tanggal 21 September 2001 Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah diterbitkan.

Untuk jenis pajak PBBKB peraturan tersebut sudah bisa menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan sehingga UU No. 34 tahun 2000 mulai berlaku efektif tahun 2002. Karena itu penerimaan PBBKB pada tahun 2002 sudah mencerminkan akibat dari perubahan UU tersebut. Namun untuk PKB-KAA dan BBNKB-KAA, berdasarkan Pasal 4 ayat 5, 10 ayat 4, Pasal 16, dan Pasal 18 ayat 1, dasar pengenaan pajaknya harus menunggu terlebih dulu Keputusan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri

tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB akhirnya baru terbit pada tanggal 15 April 2002 melalui Kepmendagri No.11 Tahun 2002. Karena itulah baru pada tahun 2003 penerimaan PKB-KAA dan BBNKB-KAA mencerminkan akibat dari perubahan UU tersebut.

Khusus untuk PABTAPU penulis menanggap tidak perlu disesuaikan lagi sehingga nilai buoyancy sama dengan nilai elastisitas. Hal itu karena PABTAPU adalah jenis pajak yang baru ada sejak revisi undang-undang tersebut.

Meskipun demikian tarif tidak dilakukan perubahan, yaitu tarif paling tinggi PKB sebesar 5%, BBNKB sebesar 10%, dan PBBKB sebesar 5%.



**BAB VI  
PEMBAHASAN**

**6.1. Perhitungan Buoyancy dan Elastisitas Pajak Daerah Provinsi se-Indonesia**

**6.1.1. Buoyancy Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB**

Berdasarkan jenisnya pajak daerah provinsi terbagi menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Penggunaan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABTAPU). Pada tabel 6.1, 6.2, dan 6.3 dapat dilihat perkembangan penerimaan keempat jenis pajak tersebut di Indonesia antara tahun 2001-2006.

**Tabel 6.1. Penerimaan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia (per jenis pajak)**

Jenis Pajak	Penerimaan Pajak Tahun (juta rupiah)					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
PKB	3,086,798	3,738,312	5,019,645	6,591,995	7,859,394	9,081,812
BBNKB	4,586,251	5,527,569	6,712,398	9,146,399	11,334,631	9,033,045
PBBKB	139,372	1,548,684	1,924,092	2,414,881	3,189,915	5,418,298
PABTAPU	51,361	104,112	258,780	353,632	376,924	387,611
PPROV	7.863.784	10.918.678	13.914.916	18.506.909	22.760.866	23.920.767

**Tabel 6.2. Prosentase Penerimaan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia (per jenis pajak)**

Jenis Pajak	Prosentase Penerimaan Pajak Tahun (%)					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
PKB	39,25	34,23	36,07	35,61	34,53	37,96
BBNKB	58,32	50,62	48,23	49,42	49,79	37,76
PBBKB	1,77	14,18	13,82	13,04	14,01	22,65
PABTAPU	0,65	0,95	1,85	1,91	1,65	1,62
PPROV	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 6.3. Prosentase Pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia (per jenis pajak)

Jenis Pajak	Prosentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tahun (%)				
	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
PKB	21,10	34,27	31,32	19,22	15,53
BBNKB	20,52	21,43	36,26	23,92	-20,76
PBBKB	1011,18	24,24	25,50	32,09	69,85
PABTAPU	102,70	148,55	36,65	6,58	2,83
PPROV	38,85	27,44	33,00	22,98	5,09

Dari tabel-tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara nominal apabila dibandingkan dengan jenis pajak lainnya penerimaan BBNKB tertinggi antara tahun 2001 dan 2005. Namun kemudian mengalami penurunan sekitar 20% pada tahun 2006 sehingga dilampaui oleh penerimaan PKB dengan selisih tipis. Penerimaan PKB relatif stabil yaitu selalu berada diantara 35% dan 40% dari total penerimaan pajak daerah provinsi selama tahun 2000-2006. Sedangkan untuk BBNKB mengalami trend penurunan, yaitu 58% dari total penerimaan pada tahun 2001 menjadi 37% pada tahun 2004.

Sedangkan penerimaan PBBKB pada tahun 2001 sangat rendah karena masih belum efektif diterapkan melalui UU No. 18 tahun 1997. Baru setelah dilakukan perubahan yaitu dengan UU No. 34 tahun 2000 yang mulai berlaku tahun 2002, penerimaan BBNKB melonjak drastis pada tahun tersebut. Penerimaan PBBKB terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya tetapi andil PBBKB terhadap total penerimaan pajak daerah antara tahun 2002-2005 tetap berkisar 13% sampai 14%. Namun kenaikan penerimaan pada tahun 2006 sebesar 68% menyebabkan prosentasenya naik menjadi 22% dari total penerimaan pajak daerah. Secara nominal penerimaan tahun 2006 telah mencapai tiga setengah kali lipat apabila dibandingkan dengan tahun 2002. Meskipun demikian penerimaan PBBKB tetap lebih rendah apabila dibandingkan dengan PKB dan BBNKB.

Sementara itu penerimaan PABTAPU secara nominal paling kecil dibanding dengan tiga jenis pajak yang lain. Selain itu trend

pertumbuhannya juga semakin menurun. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya penerimaan PABTAPU tahun 2003 meningkat hampir 150%. Tetapi pertumbuhan tahun 2006 hanya mencapai kurang dari 3%

Setelah dilakukan analisa penerimaan nominal kini dicari hubungan penerimaan pajak daerah tersebut dengan PDRB. PDRB ini dijadikan sebagai proksi karena keempat pajak tersebut mempunyai basis pajak yang berbeda. Analisa awal ini masih belum memasukkan pengaruh kebijakan diskresi sehingga disebut *tax to GDP buoyancy*. Penghitungan *buoyancy* dilakukan dengan menggunakan data panel penerimaan pajak 26 provinsi selama 6 tahun sehingga total data yang dianalisa berjumlah 156. Metode yang digunakan ialah OLS dengan model *double log* dan estimasi *fixed effect*. Model yang digunakan ialah model 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 6.4 berikut ini.

Tabel 6.4. *Buoyancy* Penerimaan Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB.

Jenis Pajak	<i>Buoyancy</i> ( $\beta_1$ )
PKB	1.68
BBNKB	1.50
PBBKB	3.98
PABTAPU	1.75
PPROV	1.89

Dari tabel dibawah dapat diketahui bahwa penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB, PABTAPU, dan PPROV bersifat elastis terhadap PDRB karena *buoyancy* keempat jenis pajak terhadap PDRB diatas 1. Sedangkan bila dilihat satu persatu maka *buoyancy* penerimaan PBBKB tertinggi bila dibandingkan ketiga jenis pajak lainnya. *Buoyancy* PBBKB hampir mencapai 4 yang berarti apabila PDRB naik 1% maka PBBKB naik 4%. Sedangkan untuk ketiga jenis pajak lainnya berkisar diantara 1,5 sampai 1.75. *Buoyancy* PKB mencapai 1.68% yang berarti apabila PDRB naik 1% maka PKB naik 1.68%. *Buoyancy* BBNKB mencapai 1.50% yang berarti apabila PDRB naik 1% maka PKB naik 1.50%. *Buoyancy* PABTAPU

mencapai 1.75% yang berarti apabila PDRB naik 1% maka PKB naik 1.75%. *Buoyancy* PPROV mencapai 1.89% yang berarti apabila PDRB naik 1% maka PPROV naik 1.89%.

Tinggi *buoyancy* tiap-tiap penerimaan pajak daerah provinsi tersebut dapat dimaknai secara positif menjadikan sumber penerimaan daerah yang sangat relevan terhadap tuntutan otonomi daerah yang dimulai pada periode yang sama. Dengan demikian diharapkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam pendanaan APBD akan semakin menurun.

#### 6.1.2. Elastisitas Basis Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB

Pada pembahasan 6.1.1. diatas *buoyancy* keempat jenis pajak daerah dihitung dengan menggunakan PDRB sebagai proksi basis pajak. Namun untuk analisa tiap-tiap jenis pajak perlu dicari basis pajak yang paling sesuai dengan masing-masing pajak.

Pada definisi operasional diatas telah dijelaskan berbagai data basis pajak yang bisa digunakan untuk analisa pajak daerah. Basis pajak ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Basis pajak yang tumbuh lebih cepat daripada PDRB dapat menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih cepat daripada pertumbuhan PDRB. Demikian juga sebaliknya, basis pajak yang tumbuh lebih lambat daripada PDRB dapat menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih lambat daripada pertumbuhan PDRB

Tabel 6.5. Perkembangan Basis Pajak PKB

Basis Pajak PKB	Jumlah (unit)					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Jumlah Kendaraan	20,926,843	22,985,192	26,706,702	30,769,096	38,156,278	45,081,255
Jumlah Sepeda Motor	15,275,074	17,022,140	19,976,376	23,055,834	28,556,498	33,413,222
Jumlah Mobil	5,649,768	5,961,050	6,730,326	7,713,262	9,599,780	11,668,033

Untuk pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air (PKB) data sekunder yang dapat digunakan untuk sebagai proksi basis pajak yaitu:

##### 1. Jumlah Kendaraan

## 2. Jumlah Sepeda Motor

## 3. Jumlah Mobil

Pada tabel 6.5 dan 6.6 diatas disajikan data perkembangan basis pajak PKB di Indonesia antara tahun 2001 dan 2006 yang berasal dari BPS. Disana dapat diketahui bahwa jumlah sepeda motor mendominasi jumlah kendaraan secara keseluruhan. Antara tahun 2001-2006 prosentase jumlah sepeda motor selalu berada diatas 70% dari jumlah kendaraan sedangkan prosentase jumlah mobil berada dibawah 30%.

Hal ini karena harga sepeda motor yang relatif lebih terjangkau bagi masyarakat dibandingkan harga mobil. Namun karena nilai jual mobil lebih tinggi daripada nilai jual sepeda motor, diperkirakan nilai jual seluruh mobil di wilayah provinsi lebih tinggi daripada nilai jual seluruh sepeda motor. Nilai jual kendaraan itu kemudian digunakan sebagai dasar pengenaan PKB sehingga diperkirakan penerimaan PKB dari mobil lebih tinggi daripada sepeda motor.

Tabel 6.6. Pertumbuhan Basis Pajak PKB

Jenis Pajak PKB	Prosentase Pertumbuhan (%)				
	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
Jumlah Kendaraan	9,84	16,19	15,21	24,01	18,15
Jumlah Sepeda Motor	11,44	17,36	15,42	23,86	17,01
Jumlah Mobil	5,51	12,91	14,60	24,46	21,54

Sementara itu pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor cukup tinggi. Namun pertumbuhan ini tidak stabil karena kenaikan pertumbuhan pada satu tahun diikuti penurunan pertumbuhan pada tahun berikutnya.. Antara tahun 2000-2003 pertumbuhan jumlah sepeda motor selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah mobil, tetapi pada tahun 2004-2005 jumlah mobil tumbuh lebih tinggi daripada jumlah sepeda motor.

Sedangkan untuk bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air (BBNKB), data sekunder yang dapat digunakan untuk sebagai proksi basis pajak yaitu:

### 1. Penjualan Kendaraan



## 2. Penjualan Sepeda Motor

## 3. Penjualan Mobil

Pada tabel 6.7 dan 6.8 berikut ini disajikan data perkembangan basis pajak BBNKB di Indonesia antara tahun 2001 dan 2006. yang berasal dari BPS. Data penjualan kendaraan tersebut berasal dari pengolahan data BPS dimana untuk mendapatkan penjualan kendaraan suatu tahun, jumlah kendaraan pada suatu tahun dikurangi jumlah kendaraan pada tahun sebelumnya. Penjualan kendaraan pada tahun 2003 misalnya adalah jumlah kendaraan pada tahun 2003 dikurangi jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2002

Tabel 6.7. Perkembangan Basis Pajak BBNKB

Basis Pajak BBNKB	Jumlah (unit)					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Penjualan Kendaraan	1,949,499	2,058,348	3,723,512	4,062,394	7,387,182	6,924,977
Penjualan Sepeda Motor	1,712,057	1,747,066	2,954,236	3,079,458	5,500,664	4,856,724
Penjualan Mobil	237,442	311,282	769,276	982,936	1,886,518	2,068,253

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya penjualan kendaraan antara tahun 2001 dan 2005 selalu mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2006 mengalami penurunan. Namun khusus untuk penjualan mobil antara tahun 2001 dan 2006 selalu mengalami kenaikan. Penjualan mobil tahun 2006 telah meningkat hampir sepuluh kali lipat dibandingkan dengan tahun 2001. Pada tahun 2001 penjualan sepeda motor mendominasi kendaraan baru yaitu mencapai 88% dibandingkan penjualan mobil yang hanya 12%. Tetapi hal itu menurun setiap tahun sehingga pada tahun 2006 perbandingan penjualan mobil dan penjualan sepeda motor mencapai 74% dan 26%.

Sedangkan pertumbuhan penjualan kendaraan mengalami fluktuasi tajam setiap tahunnya. Pertumbuhan yang tinggi pada satu tahun selalu diikuti penurunan pertumbuhan pada tahun berikutnya. Pertumbuhan penjualan mobil selalu lebih tinggi dari pada pertumbuhan penjualan sepeda motor. Pada tahun 2006 sebagai untuk pertama kalinya penjualan kendaraan mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan penurunan penjualan

sepeda motor sebesar 11%. Meskipun penjualan mobil tetap tumbuh 9% namun penjualan kendaraan secara keseluruhan turun 6%. Hal itu karena penjualan sepeda motor yang masih mendominasi penjualan kendaraan

Tabel 6.8. Pertumbuhan Basis Pajak BBNKB

Basis Pajak BBNKB	Prosentase Pertumbuhan (%)				
	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
Penjualan Kendaraan	5,58	80,90	9,10	81,84	-6,26
Penjualan Sepeda Motor	2,04	69,10	4,24	78,62	-11,71
Penjualan Mobil	31,10	147,13	27,77	91,93	9,63

Sedangkan proksi basis pajak yang bisa digunakan bagi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yaitu:

1. Volume Premium
2. Volume Solar
3. Harga Premium
4. Harga Solar
5. Konsumsi Premium
6. Konsumsi Solar.

Tabel 6.9. Perkembangan Basis Pajak BBNKB

Basis Pajak BBNKB	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Volume Premium (kl It)	8.047.618	8.564.670	8.776.784	11.703.479	16.881.501	18.121.571
Volume Solar (kl It)	22.753.316	23.506.576	20.768.962	27.528.967	32.039.462	34.936.735
Volume BBM (kl It)	30.800.934	32.071.047	29.545.746	39.232.446	48.920.964	53.058.306
Harga Premium (Rp)	1,300	1,673	1,810	1,810	2,827	4,500
Harga Solar (Rp)	1,053	1,319	1,670	1,650	2,575	4,300
Konsumsi Premium (Rp juta)	10.461.904	14.328.694	15.858.979	21.183.298	47.724.005	81.547.073
Konsumsi Solar (Rp juta)	23.959.241	31.004.910	34.684.167	45.422.795	82.501.616	150.227.960
Konsumsi BBM (Rp juta)	34.421.146	45.333.604	50.570.146	66.606.094	130.225.621	231.775.034

Pada tabel 6.9 dan 6.10 diatas disajikan perkembangan basis pajak PBBKB di Indonesia antara tahun 2001 dan 2006 yang berasal dari BPS. Disana diketahui bahwa antara tahun 2001 sampai 2006 volume premium naik dari 8 juta kiloliter menjadi 18 juta kiloliter, volume solar naik dari 22 juta kiloliter menjadi 34 juta kiloliter, dan volume BBM yang merupakan gabungan antara premium dan solar naik 30 juta kiloliter menjadi 53 juta kiloliter. Dengan demikian kenaikan volume premium mencapai 125% atau lebih tinggi dari kenaikan volume solar yang mencapai 54%. Hal ini dikarenakan kenaikan jumlah kendaraan yang juga mencapai 125% pada periode yang sama. Sedangkan solar selain digunakan untuk kendaraan bermotor juga diperlukan untuk sektor lainnya yang pertumbuhannya berbeda dengan pertumbuhan kendaraan bermotor

Hal lain yang terjadi pada periode penelitian ialah adanya kenaikan harga BBM yang cukup signifikan. Pada tahun 2001 harga premium tertimbang Rp. 1.300 naik tiga kali lipat menjadi Rp. 4.500 pada tahun 2006. Begitu juga dengan harga solar dari Rp. 1.053 naik 4 kali lipat menjadi Rp. 4.300.

Tabel 6.10. Pertumbuhan Basis Pajak PBBKB

Basis Pajak PBBKB	Prosentase Pertumbuhan (%)				
	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
Volume Premium	6,42	2,48	33,35	44,24	7,35
Volume Solar	3,31	-11,65	32,55	16,38	9,04
Volume BBM	4,12	7,87	32,79	24,70	8,46
Harga Premium	28,69	8,19	0	59,19	59,18
Harga Solar	25,26	26,61	-1,20	56,06	66,99
Konsumsi Premium	36,96	10,87	33,35	125,29	70,87
Konsumsi Solar	29,41	11,87	30,96	81,63	82,09
Konsumsi BBM	31,70	11,55	31,71	95,51	77,97

Kombinasi kedua kenaikan inilah yang mengakibatkan konsumsi penjualan premium dan solar dalam rupiah yang digunakan sebagai basis pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami kenaikan tajam.

Konsumsi premium naik dari Rp. 10 trilyun pada tahun 2001 menjadi Rp. 81 trilyun pada tahun 2006 atau hampir delapan kali lipatnya. Sedangkan konsumsi solar naik dari Rp. 23 trilyun menjadi Rp. 150 trilyun atau lebih dari enam kali lipatnya.

Berdasarkan data-data diatas kemudian dilakukan penghitungan elastisitas basis pajak daerah provinsi dengan PDRB provinsi. Peghitungan *base to GDP elasticity* tersebut dilakukan dengan menggunakan data panel penerimaan pajak 26 provinsi selama 6 tahun sehingga total data yang dianalisa berjumlah 156. Metode yang digunakan ialah OLS dengan model *double log* dan estimasi *fixed effect*. Model yang digunakan ialah Model 3.5, 3.6, dan 3.7. Hasilnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 6.11. Elastisitas Basis Pajak PKB terhadap PDRB

Basis Pajak	Elastisitas ( $\beta_2$ )
Jumlah Kendaraan	1,24
Jumlah Mobil	1,37
Jumlah Sepeda Motor	1,18

Dari data diatas dapat diketahui bahwa elastisitas ketiga basis pajak PKB terhadap PDRB diatas kesemuanya diatas 1, yang berarti basis pajak PKB tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan GDP. Elastisitas jumlah mobil terhadap PDRB lebih tinggi dari pada elastistitas jumlah sepeda motor terhadap PDRB. Hal ini karena jumlah mobil yang lebih rendah daripada jumlah sepeda motor tetapi tumbuh lebih cepat. Sedangkan elastisitas jumlah kendaraan terhadap PDRB berada diantara sepeda motor dan mobil.

Karena elastisitas basis pajak PKB terhadap PDRB lebih dari 1 maka pemerintah daerah provinsi harus memanfaatkan potensi ini guna menambah penerimaan PKB. Elastisitas penerimaan PKB terhadap basis pajak tersebut haruslah sama atau lebih tinggi dari 1 juga, sehingga pertumbuhan penerimaan PKB akan lebih cepat dari pada pertumbuhan PDRB.

Tingginya kenaikan jumlah kendaraan ini dapat diamati lebih lanjut mengenai jenis kendaraannya. Apabila yang tumbuh dengan pesat ialah

kendaraan jenis niaga seperti angkutan umum seperti truk dan bis maka hal ini bertanda positif karena termasuk dalam kategori investasi dalam penghitungan PDRB. Investasi memiliki dampak yang lebih panjang kedepan karena kendaraan tersebut akan menghasilkan tambahan penghasilan bagi pemiliknya. Hal tersebut berbeda dengan kendaraan pribadi yang hanya konsumsi belaka.

Tabel 6.12. Elastisitas Basis Pajak BBNKB terhadap PDRB

Basis Pajak PBBKB	Elastisitas ( $\beta_2$ )
Penjualan Kendaraan	2,84
Penjualan Mobil	4,00
Penjualan Sepeda Motor	2,44

Dari data diatas dapat diketahui bahwa elastitas basis pajak BBNKB sangat tinggi. Elastisitas jumlah kendaraan bermotor terhadap PDRB jauh diatas 1, yang berarti pertumbuhan penjualan kendaraan jauh melebihi pertumbuhan PDRB. Elastisitas penjualan mobil terhadap PDRB bahkan mencapai 4 yang artinya apabila PDRB tumbuh 1% maka penjualan mobil tumbuh 4%. Sedangkan elastisitas penjualan sepeda motor terhadap PDRB mencapai 2,44. Namun karena jumlah penjualan mobil kurang dari 30% penjualan seluruh kendaraan maka pengaruhnya terhadap elastisitas penjualan seluruh kendaraan kecil. Sehingga elastisitas penjualan kendaraan terhadap PDRB mencapai 2.84.

Penjualan kendaraan yang sangat pesat kemungkinan karena rasio kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia yang masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2006 terdapat 45 juta kendaraan di Indonesia dari jumlah penduduk sekitar 220 juta orang yang berarti kira-kira hanya ada 1 kendaraan untuk 5 penduduk. Karena itulah dengan adanya kenaikan pendapatan, masyarakat lebih memilih membeli kendaraan untuk menunjang mobilisasinya. Hal lain ialah kemudahan mendapatkan kredit dan faktor kemacetan membuat warga beralih dari angkutan umum ke sepeda motor. Tentu saja peningkatan drartis ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pemerintah daerah provinsi

untuk meningkatkan penerimaan BBNKB. Sehingga penerimaan BBNKB dapat meningkat secepat peningkatan basis pajaknya.

Sebelum beranjak ke pembahasan elastisitas basis pajak PBBKB pada pembahasan elastisitas basis pajak PKB dan BBNKB terlihat bahwa elastisitas sepeda motor baik jumlah maupun penjualannya lebih rendah dari pada mobil. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan harga kedua alat transportasi tersebut. Harga mobil jauh lebih tinggi daripada harga sepeda motor. Harga mobil juga jauh diatas pendapatan perkapita pertahun masyarakat Indonesia. Dengan adanya peningkatan pendapatan maka seharusnya yang lebih banyak dibeli ialah sepeda motor, tetapi mengapa malah sebaliknya. Kemungkinannya ialah distribusi pertumbuhan PDRB ini tidak merata dan lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat berpenghasilan tinggi yang mampu membeli mobil.

Tabel 6.13. Elastisitas Basis Pajak PBBKB terhadap PDRB

Basis Pajak PBBKB	Elastisitas ( $\beta_1$ )
Konsumsi Premium	2,81
Konsumsi Solar	2,32
Konsumsi BBM	2.47

Dari data diatas elastisitas basis pajak PBBKB terhadap PDRB sangat tinggi. Hal ini tentu saja dikarenakan kombinasi kenaikan volume BBM dan kenaikan harga BBM pada saat periode penelitian. Elastisitas konsumsi premium, solar, dan BBM terhadap PDRB berturut-turut mencapai 2,81, 2,32, dan 2,47. Hal ini berarti apabila PDRB naik 1% maka konsumsi premium, solar, dan BBM berturut-turut naik 2,81%, 2,32%, dan 2,47%.

Untuk membahas alasan tingginya elastisitas basis pajak bahan bakar ini kita melihat dulu pertumbuhan volume bbm dalam kilo liter. Antara tahun 2001 sampai tahun 2008 volume bbm meningkat dari 8 juta kiloliter menjadi 18 juta kiloliter atau sekitar 125%. Pada masa yang sama jumlah kendaraan naik dari 20 juta unit menjadi 45 juta unit. Presentase peningkatannya 125% atau sama dengan peningkatan volume bbm. Dengan demikian konsumsi bbm di Indonesia meningkat dengan laju yang sama

dengan peningkatan jumlah kendaraan. Dengan demikian tingginya elastisitas di atas murni karena faktor kenaikan harga BBM yang tajam selama periode penelitian.

Tingginya elastisitas ini apabila dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah provinsi akan dapat mendorong penerimaan PBBKB. Namun pemerintah daerah provinsi perlu berhati-hati mengingat harga BBM ditentukan oleh harga minyak mentah dunia dan ditentukan oleh pemerintah pusat.

### 6.1.3. Buoyancy Pajak Daerah Provinsi terhadap Basis Pajak Daerah Provinsi

Pada pembahasan 6.1.2 di atas telah dihitung elastisitas basis pajak daerah terhadap PDRB. Apabila kita menganalisa penerimaan pajak daerah provinsi, basis pajak itu adalah sesuatu yang diluar jangkauan dinas pendapatan daerah sebagai otoritas pemajakan daerah. Perekonomianlah yang menentukan naik turunnya basis pajak tersebut. Sebagai contoh pemerintah provinsi tidak dapat menentukan berapakah kendaraan yang terjual di wilayah provinsi tersebut dalam satu tahun.

Oleh karena itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing provinsi ialah mengusahakan agar semua wajib pajak daerah mematuhi pembayaran pajak daerah. Caranya antara lain memastikan semua kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menghimbau agar semua penerima hak atas kendaraan bermotor melakukan balik nama kendaraan bermotor.

Salah satu cara untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak daerah ialah menghitung buoyancy pajak daerah terhadap basis pajaknya. Dispenda yang baik haruslah mampu mendapatkan pertumbuhan pajak daerah minimal setara dengan pertumbuhan basis pajaknya. Apabila hal ini masih kurang maka kinerja pemda dalam memungut pajak perlu ditingkatkan lagi.

Memang dalam usaha peningkatan penerimaan pajak ini lazim dilakukan penerapan kebijakan diskresi antara lain kenaikan tarif, perluasan basis, dan penerbitan undang-undang baru. Namun pada bagian ini kebijakan diskresi tersebut masih belum dibahas. Sehingga hanya basis pajak saja yang dianggap mempengaruhi..

Peghitungan *tax to base buoyancy* tersebut dilakukan dengan menggunakan data panel penerimaan pajak 26 provinsi selama 6 tahun sehingga total data yang dianalisa berjumlah 156. Metode yang digunakan ialah OLS dengan model *double log* dan estimasi *fixed effect*. Model yang digunakan ialah Model 3.8, 3.9, dan 3.10. Hasilnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 6.14. *Buoyancy* Penerimaan PKB terhadap Basis Pajak PKB

Basis Pajak PKB	<i>Buoyancy</i> ( $\beta_3$ )
Jumlah Kendaraan	1,20
Jumlah Mobil	0,90
Jumlah Sepeda Motor	1,21

Pada tabel 6.14 diatas dapat diketahui bahwa *buoyancy* penerimaan PKB terhadap basis pajaknya sudah cukup baik. Untuk *buoyancy* penerimaan PKB terhadap jumlah kendaraan mencapai 1,2 yang artinya penerimaan PKB tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah. Begitu juga *buoyancy* terhadap jumlah sepeda motor yang sudah diatas 1. Sementara *buoyancy* terhadap jumlah mobil sedikit dibawah 1. Yang bisa kita tangkap dari hal ini ialah kinerja pemajakan daerah provinsi untuk jenis pajak PKB sudah cukup baik.

Tabel 6.15. *Buoyancy* Penerimaan BBNKB terhadap Basis Pajak BBNKB

Basis Pajak BBNKB	<i>Buoyancy</i> ( $\beta_3$ )
Penjualan Kendaraan	0,39
Penjualan Mobil	0,27
Penjualan Sepeda Motor	0,35

Pada tabel 6.15 dapat diketahui bahwa *buoyancy* penerimaan BBNKB terhadap basis pajaknya masih sangat rendah yaitu kesemuanya berada dibawah 0,5. Dengan demikian otoritas pajak daerah provinsi hanya bisa memanfaatkan kurang dari setengah kenaikan penjualan kendaraan bermotor



yang bisa dipungut BBNKB. Karena itulah potensi yang bisa digali masih sangat besar apabila dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebelum melangkah ke PBBKB hasil regresi *buoyancy* penerimaan PKB dan BBNKB terhadap basis pajaknya ini menjadi pertanyaan. Mengapa untuk PKB lebih tinggi daripada satu sedangkan BBNKB kurang dari setengah. Alasannya barangkali diantara tahun 2001-2006 produsen kendaraan bermotor secara nominal tidak banyak menaikkan harga kendaraan yang mereka produksi sehingga secara real harga kendaraan menurun. Kita ingat pada tahun 2001 harga sepeda motor baru yang terendah sekitar Rp. 10 juta sedangkan pada tahun 2006 juga sekitar Rp. 10 juta. Sedangkan untuk mobil pada periode yang sama produsen secara serentak meluncurkan kendaraan ukuran kecil dengan harga lebih terjangkau sekitar Rp. 100 juta. Karena itulah pertumbuhan penerimaan BBNKB kemudian tidak secepat pertumbuhan penjualan kendaraan.

Namun apabila rendahnya *buoyancy* ini karena ketidakmampuan mengelola atau bahkan kebocoran maka patut disayangkan karena elastitas basis pajak BBNKB terhadap PDRB sangat tinggi yaitu hampir mendekati 3. Jika elastisitas penerimaan BBNKB terhadap basis pajaknya bisa mencapai 1 maka penerimaan BBNKB dapat tumbuh 3 kali lebih cepat daripada PDRB.

Tabel 6.16. *Buoyancy* Penerimaan PBBKB terhadap Basis Pajak PBBKB

Basis Pajak PBBKB	<i>Buoyancy</i> ( $\beta_3$ )
Konsumsi Premium	1.13
Konsumsi Solar	1.15
Konsumsi BBM	1.24

Analisa elastisitas penerimaan PBBKB terhadap basis pajaknya memerlukan suatu pemahaman bahwa konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor yang paling besar yaitu bahan bakar minyak jenis premium dan solar. Sedangkan bahan bakar gas relatif kecil. Namun ternyata penggunaan solar banyak juga yang untuk selain kendaraan bermotor antara lain kendaraan di atas air, kereta api, dan mesin-mesin industri.

Pada tabel 6.16 diatas dapat dilihat bahwa elastisitas penerimaan PBBKB terhadap konsumsi solar memang yang paling tinggi. Akan tetapi hal itu kurang menjelaskan hubungannya terhadap penerimaan PBBKB karena memang tidak semua penjualan solar terutang PBBKB. Karena itulah elastisitas penerimaan PBBKB terhadap konsumsi premium yang paling relevan untuk dianalisa. Elastisitas penerimaan PBBKB terhadap konsumsi premium berada diatas 1, yang berarti pertumbuhan konsumsi premium telah dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh otoritas pemungutan PBBKB.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan disini sebenarnya tatacara cara pemungutan PBBKB tersebut dilakukan terpusat oleh distributor bbm seperti Pertamina. Pertamina kemudian membagi-bagi hasil PBBKB keseluruhan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi kemudian membagihasilkan penerimaan tersebut ke daerah. Sehingga peran aktif dispenda pada pajak jenis ini tidak besar seperti jenis pajak PKB dan BBNKB diatas.

#### 6.1.4. Elastisitas Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB

Setelah dilakukan perhitungan buoyancy penerimaan pajak daerah provinsi terhadap PDRB pada subbab 6.1.1, maka kini faktor perubahan UU tersebut dimasukkan untuk menghitung elastisitas penerimaan pajak daerah provinsi terhadap PDRB. Perhitungan *tax to GDP elasticity* tersebut dilakukan dengan menggunakan data panel penerimaan pajak 26 provinsi selama 6 tahun sehingga total data yang dianalisa berjumlah 156. Metode yang digunakan ialah OLS dengan model *double log* dan estimasi *fixed effect*. Model yang digunakan ialah Model 3.11, 3.12, dan 3.13. Sedangkan *dummy variable* seperti yang tercantum pada tabel 3.2.

Pada pembahasan bab 4 dijelaskan bahwa untuk jenis pajak PKB dan BBNKB perubahan UU tersebut dimulai pada tahun 2003 sehingga dummy variabel yang digunakan ialah dummy 2. Namun dummy 1 dan 3 juga akan diregresi sebagai variabel pembanding. Begitu juga untuk jenis pajak PBBKB dimana perubahan UU tersebut dimulai pada tahun 2002 sehingga dummy variabel yang digunakan ialah dummy 1. Namun dummy 2 dan 3 juga akan diregresi sebagai variabel pembanding.

Hal itu untuk melihat apakah perubahan undang-undang tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak. Apabila perubahan undang-undang tersebut berpengaruh pada pertumbuhan penerimaan pajak maka nilai selisih antara buoyancy dan elastisitas tinggi pada tahun dimulainya perubahan tersebut tetapi kemudian menurun pada tahun-tahun sesudahnya. Sedangkan apabila maka nilai selisih antara buoyancy dan elastisitas rendah pada tahun dimulainya perubahan tersebut tetapi kemudian meningkat pada tahun-tahun sesudahnya, maka hal tersebut dapat terjadi karena dua penyebab. Kemungkinan pertama ialah pengaruh UU tersebut masih membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya sehingga tidak hanya satu tahun saja melainkan dua atau tiga tahun. Hal lain ialah ternyata bukan perubahan UU tersebut yang menaikkan pertumbuhan penerimaan pajak melainkan ternyata basis pajaknya. Untuk itulah hasil regresi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.17. Elastisitas dan Buoyancy Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB

Jenis Pajak	Elastisitas ( $\beta_4$ )			Selisih ( $\beta_4 - \beta_1$ )		
	Dum 1	Dum2	Dum 3	Dum 1	Dum2	Dum 3
PKB	1,49	1,24	1,23	0,19	0,44	0,45
BBNKB	1,20	0,89	0,74	0,30	0,61	0,76
PBBKB	2,05	2,70	4,30	1,93	1,28	-0,32

Dari tabel 6.17 dapat diketahui bahwa untuk jenis pajak PKB dan BBNKB nilai selisih antara buoyancy dan elastisitas terus meningkat pada tiap-tiap asumsi waktu mulai berlakunya perubahan undang-undang tersebut. Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan perubahan undang-undang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan PKB dan BBNKB. Pada tabel 6.3 ternyata pada periode penelitian penerimaan PKB dan BBNKB selalu meningkat dengan atau tanpa perubahan undang-undang tersebut. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan basis pajak PKB dan BBNKB pada tabel 6.6 dan 6.8.

Salah satu alasan mengapa perubahan undang-undang tidak berpengaruh besar disini ialah ternyata perubahan itu tidak menyangkut adanya perubahan tarif. Tarif maksimal untuk PKB tetap 5% sedangkan

untuk BBNKB sebesar 10%. Meskipun ada penambahan basis pajak yaitu kendaraan diatas air namun hal tersebut jumlahnya tidak signifikan untuk menaikkan penerimaan pajak.

Namun tidak demikian dengan jenis pajak PBBKB dimana nilai selisih antara buoyancy dan elastisitas dengan menggunakan dummy 1 mencapai 1,93. Pada dua tahun berikutnya dimana perubahan UU sudah berlaku secara penuh maka nilai selisih tersebut semakin menurun bahkan kemudian negatif. Hal ini karena meskipun telah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1997, ternyata belum semua provinsi menerapkannya. Pada tahun 2001 misalnya ada lima provinsi di Indonesia yaitu Sumbar, Yogya, Jatim, Kalsel, dan Papua belum menerapkan PBBKB. Setelah UU No. 34 tahun 2000 mulai berlaku tahun pada tahun 2002 baru semua provinsi menerapkannya sehingga penerimaan PBBKB langsung melonjak dari Rp. 139 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp. 1,5 trilyun pada tahun 2002 atau mencapai lebih dari 1.000 % padahal basis pajak hanya tumbuh 36%. Namun pada tahun-tahun berikutnya kembali menurun diantara 24% sampai 69% sejalan dengan kenaikan basis pajaknya. Dengan demikian perubahan UU tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan PBBKB.

#### 6.1.5. Elastisitas Pajak Daerah Provinsi terhadap Basis Pajak Daerah Provinsi

Setelah dilakukan perhitungan elastisitas penerimaan pajak daerah provinsi terhadap PDRB pada subbab 6.1.4 maka kini dilakukan penghitungan elastisitas penerimaan pajak daerah provinsi terhadap basis pajaknya. Penghitungan *tax to base elasticity* dilakukan dengan menggunakan data panel penerimaan pajak 26 provinsi selama 6 tahun sehingga total data yang dianalisa berjumlah 156. Metode yang digunakan ialah OLS dengan model *double log* dan estimasi *fixed effect*. Model yang digunakan ialah Model 3.11, 3.12, dan 3.13. Sedangkan *dummy variable* yang digunakan sama seperti yang diterapkan pada tabel 6.1.4 diatas. Hasilnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Dari tabel 6.18 dibawah dapat diketahui bahwa nilai selisih antara buoyancy dan elastisitas penerimaan PKB dan BBNKB terhadap basis

pajaknya yaitu jumlah kendaraan dan penjualan kendaraan terus meningkat pada tiap-tiap asumsi waktu mulai berlakunya perubahan undang-undang tersebut. Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan perubahan undang-undang tidak berpengaruh pertumbuhan penerimaan PKB dan BBNKB. Hasil ini sama dengan hasil penghitungan elastisitas penerimaan pajak terhadap PDRB seperti ditunjukkan pada tabel 6.17 diatas.

Alasan yang disampaikan pada pembahasan diatas ialah perubahan undang-undang tidak merubah tarif pajak dan basis. Hal lain yang bisa ditelusuri ialah bahwa PKB dan BBNKB ialah jenis pajak yang sudah lama dipungut oleh pemerintah provinsi. Bahkan jauh sebelum UU No. 18 tahun 1997 mulai berlaku. Dengan demikian adanya perubahan undang-undang tidak memerlukan suatu perubahan struktur organisasi dispenda.

Tabel 6.18. Elastisitas dan Buoyancy Penerimaan Pajak Daerah terhadap Basis Pajak

Jenis Pajak	Basis Pajak	Elastisitas ( $\beta_4$ )			Selisih ( $\beta_4 - \beta_1$ )		
		Dum 1	Dum2	Dum 3	Dum 1	Dum2	Dum 3
PKB	Jumlah Kendaraan	1,00	0,79	0,70	0,20	0,41	0,50
BBNKB	Penjualan Kendaraan	0,29	0,18	0,14	0,10	0,21	0,25
PBBKB	Konsumsi Premium	0,58	0,67	0,87	0,55	0,46	0,26

Namun tidak demikian dengan PBBKB dimana nilai selisih antara buoyancy dan elastisitas dengan menggunakan dummy 1 mencapai 0,55. Pada dua tahun berikutnya dimana perubahan UU sudah berlaku secara penuh maka nilai selisih tersebut semakin menurun. Dengan demikian PBBKB dimana saat diperkenalkan petamakali pada tahun 1997 belum semua provinsi menerapkan maka revisi UU tersebut meningkatkan pertumbuhan hampir dua kali lipat. Nilai elastisitas yang semula mencapai 0,58 sedangkan buoyancy menjadi 1,13 atau naik hampir dua kali lipat. Karena itulah revisi UU memberikan pengaruh positif yang terbesar kepada penerimaan PBBKB.

Salah satu hal lain yang mungkin menyebabkan kenaikan ini ialah bagihasil PBBKB yang mana pada saat sebelum perubahan undang-undang ternyata hasil dari pajak ini ialah 90% dibagikan kepada kabupaten/kota

sehingga pemerintah provinsi hanya memperoleh 10%. Sedangkan setelah perubahan bagihasil menurun menjadi 70% sedangkan bagian pemerintah provinsi naik menjadi 30%. Begitu juga pengelolaanya dimana sebelum perubahan pemerintah provinsi yang berperan aktif menagih ke tiap-tiap SPBU sehingga hasilnya tidak maksimal. Setelah perubahan kini Pertamina yang memungut langsung dan membagikannya kepada pemerintah provinsi. Kedua insentif itulah yang kemudian menyebabkan perubahan undang-undang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBBKB.

## 6.2. Buoyancy dan Elastisitas Total

Perhitungan buoyancy dan elastisitas penerimaan pajak daerah provinsi terhadap PDRB pada subbab 6.1.1 dan 6.1.4 diatas bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh perubahan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah provinsi. Namun cara itu mempunyai dua kelemahan. Yang pertama yaitu masing-masing jenis pajak daerah provinsi mempunyai basis pajak yang berbeda-beda. Yang kedua tidak membedakan pertumbuhan karena peningkatan kinerja fiskus dan pertumbuhan karena kenaikan basis pajak. Sehingga penggunaan PDRB sebagai proksi basis pajak kurang menggambarkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah provinsi.

Oleh karena itu dengan menggunakan kerangka yang disusun oleh Shome<sup>13</sup> penulis berusaha menghitung buoyancy dan elastisitas secara bertahap. Tahap-tahap diatas ialah perhitungan elastisitas basis pajak daerah terhadap PDRB di subbab 6.1.2, buoyancy penerimaan pajak daerah provinsi terhadap basis pajak di subbab 6.1.3, dan kemudian elastisitas penerimaan pajak daerah provinsi terhadap basis pajak di subbab 6.1.5.

Tujuannya ialah untuk membedakan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal pada pertumbuhan pajak. Hal itu karena pertumbuhan basis pajak tidak dapat dipengaruhi oleh fiskus sebaliknya fiskus dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang bisa dicapai. Oleh karena itu pemisahan tersebut berguna untuk membedakan peningkatan kinerja fiskus dan pertumbuhan karena kenaikan basis pajak.

---

<sup>13</sup> Lihat Bab II diatas

Buoyancy dan elastisitas penerimaan pajak terhadap basis pajak itu kemudian dikalikan dengan elastisitas basis daerah terhadap PDRB untuk mendapatkan buoyancy dan elastisitas total. Elastisitas total ini menggabungkan kedua pengaruh internal maupun eksternal tersebut diatas. Menurut Shome meskipun tidak dihitung secara ekonometrik tetapi hanya perkalian bisa, buoyancy dan elastisitas total tetap bisa diasumsikan sebagai pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak. Buoyancy dan elastisitas total ini kemudian dapat dibandingkan dengan perhitungan buoyancy dan elastisitas penerimaan pajak daerah terhadap PDRB secara ekonometrik.

Tabel 6.19. Buoyancy Total PKB

Basis Pajak PKB	$\beta_3$	$\beta_4$	$\beta_3 \times \beta_4$	$\beta_3$
Jumlah Kendaraan	1,20	1,24	1,48	1,68

Pada tabel 6.19 dihitung buoyancy total jenis pajak PKB yang mana terlihat bahwa buoyancy penerimaan PKB terhadap jumlah kendaraan dan elastisitas jumlah kendaraan terhadap PDRB sama-sama diatas 1 yang berarti elastis. Nilainya juga hampir sama yaitu 1,20 dan 1,24. Hal itu berarti kinerja fiskus dalam memungut PKB dan pertumbuhan jumlah kendaraan mempunyai pengaruh yang setara terhadap pertumbuhan penerimaan PKB. Apabila kedua nilai tersebut dikalikan maka didapat buoyancy total sebesar 1,48. Nilai buoyancy total ini dapat diartikan bahwa penerimaan PKB tumbuh hampir satu setengah kali lebih cepat dari pada pertumbuhan PDRB.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan penghitungan buoyancy dan elastisitas penerimaan pajak daerah terhadap PDRB metode ekonometri maka hasilnya sejenis. Hasil regresi menunjukkan buoyancy mencapai 1,68 sedangkan buoyancy total hasil perkalian mencapai 1,48. Meskipun berbeda tetapi tetap berada diatas 1 atau elastis.

Tabel 6.20. Buoyancy Total BBNKB

Basis Pajak PKB	$\beta_3$	$\beta_4$	$\beta_3 \times \beta_4$	$\beta_3$
Penjualan Kendaraan	0,39	2,84	1,10	1,50

Pada tabel 6.20 dihitung buoyancy jenis pajak BBNKB yang mana terlihat bahwa buoyancy penerimaan BBNKB terhadap penjualan kendaraan dan elastisitas jumlah kendaraan terhadap PDRB mempunyai nilai yang sangat berbeda. Buoyancy penerimaan PKB terhadap penjualan kendaraan nilainya sangat rendah yaitu hanya 0,39. Hal itu berarti fiskus hanya bisa memanfaatkan 0.39% dari tiap 1% pertumbuhan penjualan kendaraan. Namun kinerja fiskus yang tidak memuaskan ini tertolong oleh jumlah kendaraan baru ini meningkat pesat 2,84% setiap 1% pertumbuhan GDP. Apabila kedua nilai tersebut dikalikan maka didapat buoyancy total sebesar 1,10. Padahal kalau fiskus mampu memanfaatkan pertumbuhan penjualan kendaraan secara maksimal maka hasilnya bisa jauh lebih baik. Nilai buoyancy total bisa setinggi nilai elastisitas basis pajak.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan penghitungan buoyancy dan elastisitas penerimaan pajak daerah terhadap PDRB metode ekonometri maka hasilnya sejenis. Buoyancy hasil regresi mencapai 1,50 sedangkan buoyancy total hasil perkalian mencapai 1,10. Meskipun berbeda tetapi tetap berada diatas 1 atau elastis.

Tabel 6.21. Buoyancy Total PBBKB

Basis Pajak PKB	$\beta_3$	$\beta_4$	$\beta_3 \times \beta_4$	$\beta_3$
Penjualan Kendaraan	1,13	2,81	3,17	3,98

Tabel 6.22. Elastisitas Total PBBKB

Basis Pajak PKB	$\beta_3$	$\beta_4$	$\beta_3 \times \beta_4$	$\beta_3$
Penjualan Kendaraan	0,58	2,81	1,68	2,05

Pada tabel 6.21 dan 6.22 dihitung buoyancy dan elastisitas total jenis pajak PBBKB. Pada perhitungan disini konsumsi premium dipilih daripada dua basis pajak PKB lainnya karena secara statistik lebih menggambarkan hubungannya dengan PBBKB Disitu terlihat bahwa buoyancy penerimaan PBBKB terhadap konsumsi premium dan elastisitas konsumsi premium terhadap PDRB meskipun sama-sama diatas 1 atau elastis tetapi terpaut



jauh. Buoyancy penerimaan PBBKB terhadap konsumsi premium nilainya 1,13. Hal itu berarti kinerja fiskus sudah baik karena bisa memanfaatkan 1.13% dari tiap 1% pertumbuhan konsumsi premium. Sedangkan konsumsi premium meningkat drastis 2,81% setiap 1% pertumbuhan GDP. Kombinasi dari keduanya menghasilkan buoyancy total yang tinggi yaitu mencapai 3,17. Tentu saja pertumbuhan yang tinggi ini lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan basis pajak dari pada fiskus.

Sedangkan untuk elastisitas PBBKB terhadap konsumsi premium bernilai 0,58 atau lebih rendah dari buoyancy yang bernilai 1,13. Apabila elastisitas PBBKB terhadap konsumsi premium dikalikan dengan elastisitas konsumsi premium terhadap PDRB maka didapat elastisitas total sebesar 1,68. Nilai elastisitas total ini dapat diartikan bahwa tanpa revisi UU penerimaan BBNKB hanya tumbuh 1,68 kali pertumbuhan PDRB.

Apabila buoyancy total yang bernilai 3,17 dan elastisitas total yang bernilai 1,68 dibandingkan maka terlibat revisi UU No. 18 tahun 1997 dengan UU No. 34 tahun 2000 berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penerimaan PBBKB. Selisih diantara keduanya yang mencapai 1,88 merupakan sebagai pertumbuhan karena pengaruh dari revisi UU tersebut. Besarnya selisih dikarenakan saat pertama kali diperkenalkan lewat UU No. 18 tahun 1997 belum semua provinsi menerapkan. Baru setelah direvisi lewat UU No. 34 tahun 2000 semua provinsi menerapkan dan penerimaan meningkat drastis.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan penghitungan buoyancy dan elastisitas penerimaan pajak daerah terhadap PDRB metode ekonometri maka hasilnya sejenis. Buoyancy hasil regresi mencapai 3,98 sedangkan buoyancy total hasil perkalian mencapai 3,17. Meskipun berbeda tetapi tetap berada diatas 3. Elastisitas hasil regresi mencapai 2,05 sedangkan elastisitas total hasil perkalian mencapai 1,68. Meskipun berbeda tetapi tetap berada diatas 1 atau elastis.

### 6.3. Perhitungan Elastisitas dan Buoyancy per Provinsi dan per Wilayah.

Pada pembahasan 6.3. diatas penghitungan elastisitas dan buoyancy dilakukan pada tingkat nasional dimana semua data dari 26 provinsi

digabungkan menjadi satu data panel. Namun perilaku penerimaan pajak daerah provinsi di tiap-tiap provinsi dan wilayah masih belum diketahui. Untuk itu pada pembahasan berikut ini akan disajikan hasil regresi dan analisa untuk tiap-tiap provinsi dan wilayah.

Tabel 6.23. Buoyancy Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB per Provinsi/Wilayah

No	Provinsi	PKB	BBNKB	PBBKB	PABTAPU	PPROV
1	Aceh	1.43	3.43	6.45	0.36	2.81
2	Sumut	1.35	1.66	4.69	7.32	1.77
3	Sumbar	1.69	1.79	1.88	2.28	2.04
4	Riau	1.34	0.30	3.72	1.82	1.27
5	Jambi	1.58	1.41	4.64	2.97	1.76
6	Sumsel	1.71	1.51	4.20	0.35	1.74
7	Bengkulu	1.38	2.29	2.61	1.04	2.15
8	Lampung	1.84	2.06	5.61	1.10	2.37
9	Jakarta	1.49	0.72	3.11	0.38	1.21
10	Jabar	1.51	0.96	3.71	2.21	1.48
11	Jateng	1.51	0.95	4.29	0.44	1.52
12	Yogya	1.93	1.00	2.52	1.41	1.79
13	Jatim	1.29	1.04	1.67	0.23	1.34
14	Bali	1.41	1.06	4.75	1.01	1.54
15	Kalbar	1.95	1.64	2.36	6.30	1.89
16	Kalteng	1.42	2.08	4.49	-0.75	2.11
17	Kalsel	2.14	1.59	3.21	1.22	2.60
18	Kaltim	1.95	1.35	3.21	3.25	1.70
19	Sulut	1.51	1.01	5.27	2.02	1.67
20	Sulteng	1.85	1.29	1.76	0.32	1.58
21	Sulsel	2.08	1.35	6.65	2.55	2.50
22	Sultra	1.40	1.10	4.28	0.90	1.65
23	NTB	1.52	1.42	4.82	1.82	1.88
24	NTT	1.68	1.78	5.85	1.06	2.38
25	Maluku	4.55	4.37	7.21	28.78	5.34
26	Papua	1.66	1.24	1.14	0.84	1.44
27	Indonesia	1.58	1.50	3.98	1.75	1.89
28	Sumatera	1.54	1.84	4.33	2.26	1.99
29	Jawa Bali	1.53	0.96	3.54	1.01	1.47
30	Kalimantan	1.87	1.62	3.38	2.78	2.00
31	Timur	1.86	1.52	4.23	1.34	2.07

### 6.3.1. Buoyancy Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB

Dari tabel 6.23. diatas dapat diketahui bahwa terdapat variasi nilai buoyancy pajak daerah provinsi terhadap PDRB antar provinsi dan antar wilayah. Buoyancy penerimaan pajak daerah provinsi secara nasional mencapai 1,89, akan tetapi buoyancy untuk wilayah Jawa Bali hanya 1,47

atau yang terendah apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada hampir setiap jenis pajak. Buoyancy PKB, BBNKB, dan PABTAPU terhadap PDRB Jawa Bali juga yang terendah. Hanya untuk buoyancy PBBKB, Jawa Bali lebih tinggi dari Kalimantan meski lebih rendah dari Sumatera dan Indonesia Timur.

Pada tabel 4.4 diketahui bahwa pada tahun 2001 nilai Rasio PAD terhadap penerimaan provinsi-provinsi di Jawa Bali lebih tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Rupanya wilayah-wilayah di luar Jawa Bali yang nilai rasio tersebut lebih rendah kemudian tumbuh lebih cepat penerimaan pajak daerahnya dibandingkan dengan Jawa Bali. Sebaliknya Jawa Bali yang nilai rasio tersebut tinggi tetapi kemudian tumbuh lebih lambat penerimaan pajak daerahnya.

Hal tersebut sejalan dengan pembahasan di subbab 4.1 dimana dihitung bahwa pada tahun 2001 penerimaan pajak daerah provinsi di Jawa Bali mencapai 75% dari total penerimaan pajak daerah provinsi se-Indonesia. Tetapi pada tahun 2006 tersebut menurun menjadi 65%. Begitu juga pada tabel 4.6 dimana dapat dilihat dan Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB provinsi-provinsi di luar Jawa Bali pada tahun 2001 jauh lebih rendah daripada Jawa Bali. Tetapi karena pertumbuhan yang tinggi selama periode penelitian nilai rasio tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dan hampir mendekati rasio provinsi-provinsi di Jawa Bali. Nilai rasio Jawa Bali juga meningkat tetapi tidak besar.

Meskipun tumbuh dengan pesat, mengapa pada tahun 2006 nilai Rasio PAD terhadap penerimaan provinsi-provinsi di luar Jawa Bali, tetap pada tingkatan pada tahun 2001. Jawabannya mungkin berada pada tingkatan dana perimbangan yang diperoleh pemerintah. Provinsi-provinsi di luar Jawa Bali terus menerus memperoleh bagi hasil dalam tingkat yang lebih tinggi daripada provinsi-provinsi di Jawa Bali.

Variasi juga terjadi antar provinsi dalam satu wilayah. Wilayah Sumatera untuk jenis pajak PKB buoyancy yang tertinggi Lampung sedangkan yang terendah Riau, BBNKB buoyancy yang tertinggi Aceh sedangkan yang terendah Riau, PBBKB buoyancy yang tertinggi Aceh

sedangkan yang terendah Sumbar, PABTAPU buoyancy yang tertinggi Sumut sedangkan yang terendah Aceh, dan PPROV buoyancy yang tertinggi Aceh sedangkan yang terendah Riau.

Mengapa untuk jenis pajak BBNKB dan PBBKB nilai buoyancy yang tertinggi adalah provinsi Aceh. Untuk menjawabnya kita lihat di Lampiran 2, dimana diketahui bahwa penerimaan BBNKB Aceh pada tahun tahun 2001 hanya mencapai Rp. 13 milyar tetapi kemudian meningkat pada tahun 2006 menjadi Rp. 125 milyar. Sedangkan untuk PBBKB pada tahun 2001 hanya Rp. 614 juta melonjak pada tahun 2006 menjadi Rp. 99 milyar. Tingginya penerimaan ini rupanya terjadi karena setelah terjadi tsunami maka rekonstruksi aceh melibatkan banyak kendaraan baru yang masuk sehingga meningkatkan BBNKB. Kenaikan jumlah kendaraan dan aktivitas proyek rehabilitasi juga meningkatkan kebutuhan BBM sehingga PBBKB juga naik. Akan tetapi buoyancy PKB Aceh bukan yang tertinggi nilai tersebut termasuk kendaraan bermotor sebelum tsunami. Karena itulah buoyancy total penerimaan pajak daerah Aceh terhadap PDRB-nya yang paling tinggi.

Hal lain yang perlu ditelusuri ialah mengapa buoyancy total penerimaan pajak Riau yang terendah. Jawabannya ialah PDRB Riau bagian besar berasal dari migas. Kita tahu bahwa sebagian perusahaan migas tersebut adalah milik asing sehingga keuntungannya setelah dikurangi jatah pemerintah pusat dibawa tidak kembali lagi ke Riau. Begitu juga bagi hasil pemerintah pusat hanya 10% saja. Karena itu boleh dikata hasil kekayaan alam Riau tidak kembali ke masyarakat Riau sehingga mereka tidak membeli banyak kendaraan bermotor dan pada akhirnya tidak mengkonsumsi bbm.

Sedangkan untuk wilayah Jawa Bali untuk jenis pajak PKB buoyancy yang tertinggi Yogya sedangkan yang terendah Jatim, BBNKB buoyancy yang tertinggi Bali sedangkan yang terendah Jakarta, PBBKB buoyancy yang tertinggi Yogya sedangkan yang terendah Jatim, PABTAPU buoyancy yang tertinggi Jabar sedangkan yang terendah Jatim, dan PPROV buoyancy yang tertinggi Yogya sedangkan yang terendah Jakarta.

Untuk wilayah Jawa Bali ini kita ketahui bahwa perekonomiannya sudah tidak lagi tergantung dari sektor primer yaitu pertanian. Sektor sekunder dan tersier yaitu industri dan jasa sudah jauh berkembang dan merupakan bagian terbesar dari perekonomian. Kondisi infrastruktur transportasinya juga jauh lebih baik dari wilayah lainnya. Jadi penyebab utama mengapa buoyancy disini rendah kemungkinan pertumbuhan di sektor-sektor lainnya lebih tinggi dari sektor transportasi. Hal lain ialah tingginya permintaan BBM untuk industri di Jawa Bali yang tidak terutang pajak daerah provinsi sehingga pertumbuhan konsumsi BBM tidak serta merta menaikkan penerimaan PBBKB.

Sementara itu wilayah Kalimantan untuk jenis pajak PKB buoyancy yang tertinggi Kalsel sedangkan yang terendah Kalteng, BBNKB buoyancy yang tertinggi Kalteng sedangkan yang terendah Kaltim, PBBKB buoyancy yang tertinggi Kalteng sedangkan yang terendah Kaltim, PABTAPU buoyancy yang tertinggi Kalbar sedangkan yang terendah Kalteng, dan PPROV buoyancy yang tertinggi Kalsel sedangkan yang terendah Kaltim. Khusus untuk jenis pajak PABTAPU buoyancy Kalteng negatif.

Alasan Kaltim terendah buoyancy penerimaan pajak daerah provinsinya ialah barangkali sama dengan Riau diatas dimana masyarakat Kaltim tidak banyak mendapat berkah dari sumber daya alam yang mereka miliki. Adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat ternyata penerimaan pajaknya lebih dirasakan oleh pemerintah pusat. Kerusakan alam yang terjadi juga mengakibatkan penurunan taraf hidup mereka.

Sedangkan wilayah Indonesia Timur untuk jenis pajak PKB buoyancy yang tertinggi Maluku sedangkan yang terendah Sulawesi Tenggara, BBNKB buoyancy yang tertinggi Maluku sedangkan yang terendah Sulut, PBBKB buoyancy yang tertinggi Sulsel sedangkan yang terendah Papua, PABTAPU buoyancy yang tertinggi Maluku sedangkan yang terendah Sulteng, dan PPROV buoyancy yang tertinggi Maluku sedangkan yang terendah Papua.

Untuk wilayah Indonesia Timur ini yang perlu dilihat ialah buoyancy Maluku dan Papua. Untuk Maluku pada tahun 2001 penerimaan pajak

daerah provinsi pada tahun 2001 hanya kurang dari Rp. 1 milyar tetapi pada tahun 2006 melompat menjadi Rp. 10 milyar. Hal itu menyebabkan buoyancy Maluku yang terbesar di Indonesia Timur. Jawabannya mungkin karena pada awal periode penelitian Maluku masih terkena dampak kerusuhan Ambon. Sehingga pemerintahan belum berjalan normal dan pemungutan pajak tidak dapat dilakukan. Setelah kondisi keamanan stabil maka pemerintah dapat kembali memungut pajak tersebut. Perekonomian yang tumbuh juga mengakibatkan mobilitas meningkat dan pada akhirnya menaikkan penerimaan PBBKB. Sedangkan untuk Papua meskipun terendah tetapi masih berada di atas satu atau elastis sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan.

#### 6.3.2. Elastisitas Basis Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB Provinsi

Dari tabel 6.24 bawah dapat diketahui bahwa elastisitas basis pajak PKB terhadap PDRB Kalimantan tertinggi kemudian diikuti oleh Sumatera, Indonesia Timur, dan Jawa Bali. Elastisitas basis pajak BBNKB terhadap PDRB Indonesia Timur tertinggi kemudian diikuti oleh Kalimantan Sumatera, dan Jawa Bali. Elastisitas basis pajak PBBKB terhadap PDRB Sumatera tertinggi kemudian diikuti oleh Jawa Bali, Kalimantan, dan Indonesia Timur.

Meskipun demikian nilai elastisitas tersebut tidak sama untuk tiap-tiap wilayah. Untuk basis pajak PKB nilai elastisitas terbesar berada di wilayah Kalimantan, kemudian diikuti oleh Sumatera, Indonesia Timur, dan Jawa Bali. Sedangkan untuk basis pajak BBNKB nilai elastisitas terbesar berada di wilayah Kalimantan, kemudian diikuti oleh Sumatera, Indonesia Timur, dan Jawa Bali. Sementara itu untuk basis pajak PBBKB nilai elastisitas terbesar berada di wilayah Sumatera, kemudian diikuti oleh Jawa Bali, Kalimantan, dan Indonesia Timur.

Untuk elastisitas basis pajak daerah PKB dan BBNKB terhadap PDRB pulau Jawa Bali memang disini yang terendah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan buoyancy penerimaan PKB dan BBNKB terhadap PDRB yang juga terendah di Indonesia. Khusus untuk provinsi di Jawa Barat terdapat suatu hasil yang cukup membingungkan yaitu hanya 0,37 paling rendah dengan

selisih mencolok dibanding dengan provinsi yang lain di wilayah tersebut. Padahal justru elastisitas konsumsi premium yang tertinggi. Setelah diamati pada data jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat menurut BPS juga terendah. Hasil penelusuran mendapatkan bahwa BPS mendapatkan data kendaraan bermotor dari Kepolisian Daerah (Polda). Kemungkinan wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat yaitu Kota/Kab Bekasi dan Kota Depok yang merupakan wilayah Polda Metro Jaya, data jumlah kendaraan bermotornya masuk ke Provinsi Jakarta sehingga menjadi rendah nilai bouyancynya.

Tabel 6.24. Elastisitas Basis Pajak Daerah Provinsi terhadap PDRB per Provinsi/Wilayah

No	Provinsi	JKB	KBB	KPRE
1	Aceh	0.82	-0.19	3.42
2	Sumut	1.05	1.99	3.20
3	Sumbar	1.43	2.91	2.94
4	Riau	1.39	1.90	3.73
5	Jambi	1.57	3.11	3.58
6	Sumsel	1.05	4.70	2.29
7	Bengkulu	1.65	4.05	2.11
8	Lampung	1.60	3.02	3.36
9	Jakarta	1.26	2.60	3.02
10	Jabar	0.37	1.86	4.32
11	Jateng	1.18	1.28	1.69
12	Yogya	1.17	2.61	3.90
13	Jatim	0.67	0.68	1.63
14	Bali	1.10	1.64	2.74
15	Kalbar	1.86	3.77	3.24
16	Kalteng	1.85	4.59	3.80
17	Kalsel	1.32	2.80	2.69
18	Kaltim	1.22	2.08	2.05
19	Sulut	1.70	4.74	3.49
20	Sulteng	1.66	5.43	3.43
21	Sulsei	1.19	5.00	3.11
22	Sultra	1.05	1.91	3.20
23	NTB	1.38	3.08	2.84
24	NTT	1.84	6.83	3.27
25	Maluku	1.12	4.81	3.23
26	Papua	0.73	1.37	-0.17
27	Indonesia	1.24	2.84	2.81
28	Sumatera	1.33	2.85	3.02
29	Jawa Bali	0.90	1.68	2.83
30	Kalimantan	1.50	3.09	2.79
31	Timur	1.28	3.69	2.58

Sementara itu untuk hasil regresi negatif yang diperoleh wilayah Aceh dan Papua cukup mengejutkan. Untuk penjualan kendaraan bermotor di Aceh memang mengalami fluktuasi. Fluktuasi itulah yang menyebabkan hasil regresinya negatif. Padahal penerimaan BBNKB-nya selalu naik. Hal yang sama terjadi di Papua. Kemungkinan yang terjadi ialah dispenda provinsi terus menerus menaikkan nilai kendaraan sebagai kompensasi dari penurunan tersebut.

### 6.3.3. Buoyancy Pajak Daerah Provinsi terhadap Basis Pajak Daerah Provinsi

Pada table 5.27 diatas diketahui bahwa buoyancy penerimaan PKB terhadap basis pajak PKB Jawa Bali tertinggi kemudian diikuti oleh Indonesia Timur, Kalimantan, dan Sumatera. Jadi dinas pendapatan daerah provinsi-provinsi di Jawa Bali paling berhasil memanfaatkan pertumbuhan basis pajak PKB untuk direalisasikan penerimaan PKB.

Namun hal tersebut tidak diikuti BBNKB dan PBBKB. Untuk BBNKB buoyancy yang tertinggi ialah Kalimantan, kemudian diikuti oleh Sumatera, Jawa Bali, dan Indonesia Timur. Sedangkan untuk PBBKB buoyancy yang tertinggi ialah Sumatera, kemudian diikuti oleh Indonesia Timur, Kalimantan, dan Jawa Bali.

Variasi juga terjadi antar provinsi dalam satu wilayah. Wilayah Sumatera untuk jenis pajak PKB buoyancy yang tertinggi Aceh sedangkan yang terendah Jambi, BBNKB buoyancy yang tertinggi Lampung sedangkan yang terendah Aceh, dan PBBKB buoyancy yang tertinggi Sumsel sedangkan yang terendah Sumbar.

Wilayah Jawa Bali untuk jenis pajak PKB buoyancy yang tertinggi Jabar sedangkan yang terendah Jakarta, BBNKB buoyancy yang tertinggi Jateng sedangkan yang terendah Jakarta, dan PBBKB buoyancy yang tertinggi Jateng sedangkan yang terendah Jatim

Wilayah Kalimantan untuk jenis pajak PKB buoyancy yang tertinggi Kaltim sedangkan yang terendah Kalteng, BBNKB buoyancy yang tertinggi Kalsel sedangkan yang terendah Kalteng, dan PBBKB buoyancy yang tertinggi Kaltim sedangkan yang terendah Kalbar.



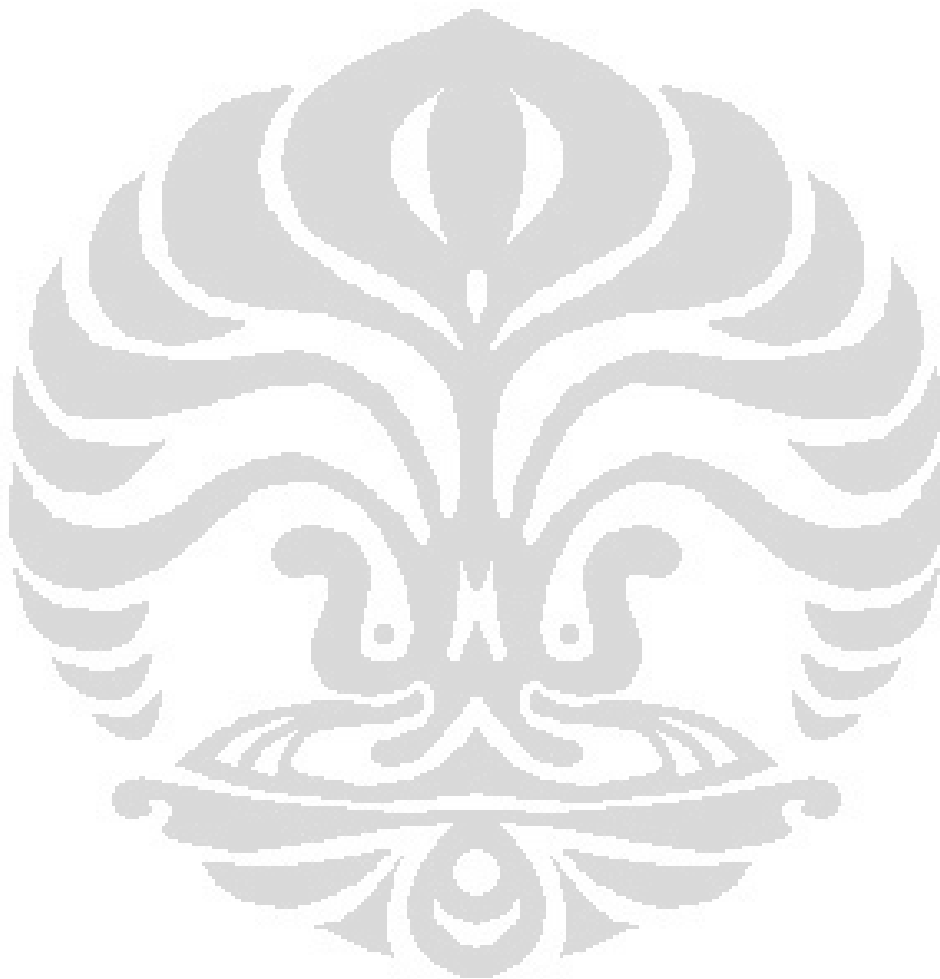
Tabel 6.27. Buoyancy Pajak Daerah Provinsi terhadap Basis Pajak Daerah Provinsi per Provinsi/Wilayah

No	Provinsi	PKB	BBNKB	PBBKB
1	Aceh	1.67	0.25	1.44
2	Sumut	1.28	0.62	1.39
3	Sumbar	1.15	0.57	0.57
4	Riau	1.11	0.42	1.33
5	Jambi	0.92	0.40	1.16
6	Sumsel	1.18	0.29	1.85
7	Bengkulu	1.01	0.55	1.06
8	Lampung	1.14	0.63	1.47
9	Jakarta	1.16	0.24	0.96
10	Jabar	4.33	0.38	0.72
11	Jateng	1.28	0.71	2.07
12	Yogya	1.60	0.38	0.58
13	Jatim	1.95	0.62	0.41
14	Bali	1.28	0.64	1.30
15	Kalbar	1.01	0.39	0.71
16	Kalteng	0.73	0.43	1.04
17	Kalsei	1.46	0.56	0.83
18	Kaltim	1.56	0.19	1.68
19	Sulut	0.81	0.22	1.15
20	Sulteng	1.07	0.23	0.48
21	Sulsel	1.55	0.19	1.59
22	Sultra	1.31	0.52	1.15
23	NTB	1.07	0.43	1.27
24	NTT	0.74	0.21	1.26
25	Maluku	3.50	0.72	1.75
26	Papua	2.37	1.06	-3.97
27	Indonesia	1.20	0.39	1.13
28	Sumatera	1.10	0.45	1.31
29	Jawa Bali	1.48	0.40	0.86
30	Kalimantan	1.12	0.47	1.07
31	Timur	1.24	0.32	1.18

Sedangkan wilayah Indonesia Timur untuk jenis pajak PKB buoyancy yang tertinggi Maluku sedangkan yang terendah NTT, BBNKB buoyancy yang tertinggi Papua sedangkan yang terendah Sulsel, PBBKB buoyancy yang tertinggi Maluku sedangkan yang terendah Papua.

Nilai buoyancy penerimaan pajak terhadap basis pajaknya diatas ialah seberapa besar peningkatan basis pajak tersebut dapat dimanfaatkan penerimaan pajaknya. Dari hasil regresi diatas dapat diketahui bahwa meskipun terjadi selisih jaraknya tidak terlalu besar kecuali Papua yang minus 3.97. Hal itu karena konsumsi premium yang fluktuatif tetapi

penerimaan selalu naik. Oleh karena itu perlu ditelusuri mengenai konsumsi ini apakah benar di konsumsi di Papua atau terjadi penyelundupan ke luar negeri.



## BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

### 7.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab V diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama ialah pertumbuhan penerimaan PBBKB tertinggi dibandingkan pajak-pajak daerah provinsi lainnya. Setelah PBBKB berturut-turut ialah PKB, PABTAPU, dan BBNKB.

Buoyancy PKB, BBNKB, PBBKB, dan PABTAPU terhadap PDRB berturut-turut 1.68, 1.70, 3.98, dan 1.75. Sedangkan elastisitas PKB, BBNKB, dan PBBKB terhadap PDRB berturut-turut mencapai 1.24, 0.89, dan 2.05. Dengan demikian elastisitas lebih rendah dari buoyancy. Sehingga dapat ditarik kesimpulan kedua bahwa revisi UU No. 18 tahun 1997 melalui UU No. 34 tahun 2000 berpengaruh positif meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah provinsi terhadap PDRB.

Kesimpulan ketiga ialah pertumbuhan basis pajak daerah provinsi sangat tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB. Elastisitas basis pajak BBNKB dan PBBKB mendekati 3 yang berarti basis pajak tumbuh hampir 3 kali lipat pertumbuhan PDRB. Sedangkan elastisitas basis pajak PKB mencapai 1,24.

Kesimpulan keempat ialah khusus untuk BBNKB meskipun basis pajak tumbuh dengan pesat namun tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terbukti buoyancy penerimaan BBNKB terhadap basis pajaknya hanya dibawah 0,5 yang berarti hanya setengah dari pertumbuhan basis pajak yang dapat direalisasikan penerimaan BBNKB. Sedangkan untuk PKB dan PBBKB buoyancy masing-masing 1.20 dan 1.13 yang artinya dispenda sudah mampu memanfaatkan pertumbuhan basis pajak secara optimal.

Sedangkan kesimpulan kelima bahwa revisi UU No. 18 tahun 1997 melalui UU No. 34 tahun 2000 berpengaruh positif meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah provinsi untuk jenis PBBKB, tetapi tidak untuk jenis pajak PKB dan BBNKB.

Kesimpulan kelima ialah tingginya pertumbuhan pajak daerah provinsi lebih disebabkan karena pertumbuhan basis pajaknya. Khusus untuk jenis pajak PBBKB hal lain yang berpengaruh positif ialah revisi UU No. 18 tahun 1997 melalui UU No. 34 tahun 2000.

Kesimpulan keenam ialah elastistas dan buoyancy untuk semua jenis pajak bervariasi antar provinsi dan antar wilayah. Secara umum penerimaan pajak di provinsi-provinsi yang rasio penerimaan pajak terhadap PDRB tinggi pertumbuhannya lebih lambat daripada provinsi-provinsi yang rasio penerimaan pajak terhadap PDRB rendah.

## 7.2. Saran

Sehubungan dengan pertumbuhan penerimaan pajak daerah provinsi lebih disebabkan oleh pertumbuhan basis pajak, maka dinas pendapatan daerah provinsi wajib meningkatkan kinerjanya agar semua potensi pajak daerah dapat dimanfaatkan.

Basis pajak sendiri memang masih akan tumbuh dengan pesat karena berkenaan dengan kepemilikan kendaraan bermotor yang mana rasio jumlah kendaraan bermotor di Indonesia masih rendah. Namun penjualan kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Sehingga bervariasi dari tahun ke tahun yang akan juga membuat penerimaan PKB dan BBNKB berubah-ubah.

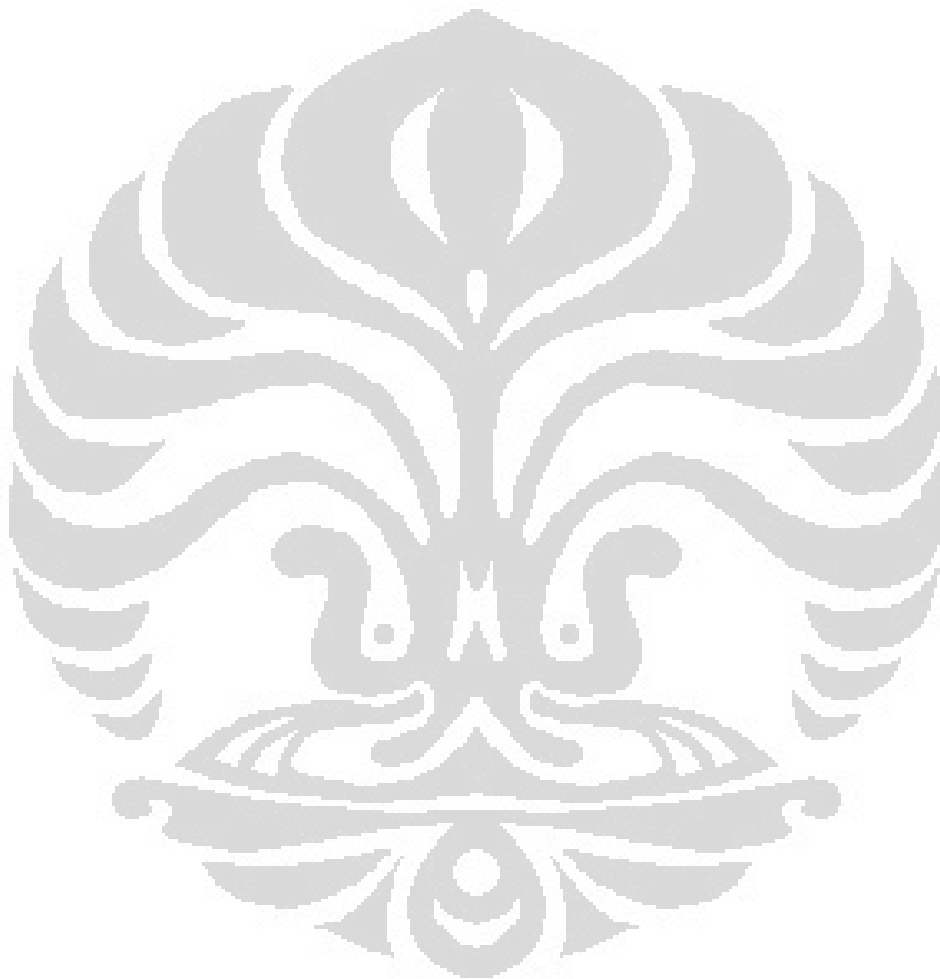
Hal yang sama juga terjadi harga BBM. Memang selama periode penelitian harga BBM mengalami kenaikan drastis. Namun dapat sewaktu-waktu berubah sehingga menyebabkan penerimaan BBM tidak stabil pula.

Basis pajak provinsi sangat menguntungkan provinsi dengan sektor perekonomian sekunder dan tersier yang maju namun tidak bagi provinsi yang masih mengandalkan sektor primer. Hal ini terbukti hanya provinsi yang sektor industri dan jasanya berkembang seperti provinsi-provinsi di pulau Jawa saja yang rasio PAD terhadap keseluruhan penerimaan diatas 50%.

Sementara itu kelemahan dari penelitian ini ialah data penerimaan pajak yang baru belum mencakup 26 dari 33 provinsi di Indonesia. Tahun penelitian juga baru mencapai 6 tahun yaitu dari 2001-2006. Oleh karena itu

penelitian di depan dapat dilakukan penambahan data baik cross section maupun time series.

Hal lain yang menjadi kendala ialah basis pajak PKB dan BBNKB yang paling tepat ialah nilai jual kendaraan bermotor. Namun karena hal tersebut sulit didapat maka peneliti selanjutnya dapat mencari data tersebut.



## DAFTAR REFERENSI

- Aquah, Moses., & Geraldi, Alexander. (2008). The Growth and Stability of Revenues in British Colombia. *Journal of Business and Economic Studies*. Vol. 14 No. 2. pg 39-58.
- Auten, Gerald. dan Robb, (1976). Edward. A General Model for State Tax Revenue Analysis. *National Tax Journal*. Vol 29 No. 4. pg 422-435.
- Badan Pusat Statistik. (Beberapa Tahun). *Statistik Keuangan Daerah*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. (Beberapa Tahun). *Statistik Perhubungan*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. (Beberapa Tahun). *Statistik Energi*. Jakarta: BPS
- Baltagi, Badi H. (2001) *Econometric Analysis for Panel Data*, New York; John Wiley & Sons.
- Berg, Matthew D van den., & Nichols, Mark (2006). *Estimating the Growth and Variability of Gaming Tax Bases*. M.Sc. Thesis. Reno: University of Nevada.
- Berne, Robert. & Schramm, Richard. (1986) *The Financial Analysis of Governments*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- BKD Kaltim. (2008). *DAU Tak Cukup Bayar Gaji PNS*. <http://kaltimbkd.info/index.php>.
- Blanchard, Olivier. (1997). *Macroeconomics*. Upper Saddle River: Prentice Hall
- Davies, David G., (1965). The Secular Income Elasticity and Revenue Stability of Motor Fuel Taxes. *National Tax Journal*. Vol 18 No. 4. pg 380-387.
- Ditjen DJPK Depkeu. (Beberapa Tahun). *Ringkasan Buku APBD Provinsi*. Dalam bentuk soft copy.
- Ditjen DJPK Depkeu. (Tanpa Tahun). *Definisi Dasar Hukum Alokasi DAU: Tahapan Perhitungan dan Formulasi*. [http://www.djpk.depkeu.go.id/leaflet/leaflet\\_dau.pdf](http://www.djpk.depkeu.go.id/leaflet/leaflet_dau.pdf).
- Dye, Richard F. (2004). State Revenue Cyclicity. *National Tax Journal*. Vol 57 No. 1. pg 133-144.
- Choudry, Nurun. (1975). A Study at the Elasticity of the West Malaysian Income Tax System, 1961-1970. *Staff Papers IMF*, Vol 22 No. 2. pg 494-509.
- Choudry, Nurun. (1979). Measuring the Elasticity of Tax Revenue: a Divisia Index Approach. *Staff Papers IMF*, Vol 26 No. 1. pg 88-120.

- Faisal, Syafruddin. (2003). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi DKI Jakarta*. Tesis S-2 Ilmu Administrasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Grossman, S., Lassila, D., & Wiggins, C. (2002). Income Tax Elasticity: A Regional Analysis. *Journal of Business and Economic Studies*. Vol. 8 No. 2. pg. 17-90.
- Gujarati, Damodar, (2003) *Basics Econometric*, 4<sup>th</sup> edition, New York: Mc Graw Hill International.
- Hewwett, Roger. dan Stephenson, Susan. (1983). State Tax Revenues Under Competition. *National Tax Journal*. Vol. 36 No. 1. pg. 95-101.
- Lembaga Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah. (2006). *Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Jakarta: BPPK Depkeu.
- Musgrave R dan Musgrave P.B, *Public Finance In Theory and Practice*, 5th edition, McGraw-Hill, London, 1989.
- Mahi, B. Raskaka, (2005) Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Vol 6. No. 1.
- Nuria, (2007). *Dana Perimbangan Banyak yang Meryimpang*. <http://autos.okezone.com/index.php/ReadStory>
- Osoro, N., Mpango, P. & Mwinyimwa, H. (2005). Performance and Revenue Potential of Excise Taxation in Tanzania. *Journal of African Economies*, Vol. 15 No 1, pg1-25.
- Puspasari, Priyanti. (2008). *Estimasi Elastisitas dan Bouyancy PPh di Indonesia dengan Metode Indeks Divisia Tahun 1983-2007*, Tesis MPKP, Depok: Universitas Indonesia.
- Pindyck & Rubinfeld. (2005) *Microeconomics*. Upper Saddle River: Pearson Education.
- Ram, Rati,. (1991). Elasticity of Individual Income Tax in the United States: Further Evidence from Cross Section Data. *National Tax Journal*. Vol. 44 No. 1. pg. 96-99.
- Romdhony, Heryana., (2006). *Dampak Bagi Hasil PPN terhadap Pemerataan Fiskal antara Pemerintah Provinsi di Indonesia*. Tesis MPKP, Depok: Universitas Indonesia
- Setyaji, Gunawan,. (2007). *Ruwetnya Urusan Tax Ratio*, <http://gsetiyaji.files.wordpress.com/2007/09/ruwet-tax-ratio.pdf>

- Shome, Parthasarathi,. (1988). On the Elasticity of Developing Country Tax System. *Economics and Political Weekly*, Vol. 23 No. 34. pg. 1750-1754.
- Sidik, Machfud. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. [www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article](http://www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article)
- Topik, Imam M. (2003). *Evaluasi Implementasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Tesis S-2 Ilmu Administrasi, Depok: Universitas Indonesia.
- Wahyu, Rully. (2007). *Elastisitas dan Bouyancy Pajak Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur*. Tesis S-2 MPKP, Depok: Universitas Indonesia.
- Widarjono, Agus. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi (untuk Ekonomi dan Bisnis)*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
- Wikipedia (2009). *Fuel Tax*. [http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel\\_Tax](http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_Tax).
- Tresnawati, Sri Rahayu,. (2006). Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Tax Ratio Pajak Provinsi di Indonesia: Tahun 1995-2004. Tesis S-2 Ilmu Ekonomi, Depok: Universitas Indonesia.



LAMPIRAN DATA PENERIMAAN PROVINSI DAN PDRB

Lampiran 1 Penerimaan PKB

No	Provinsi	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (ribu rupiah)					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	29,423,199	29,665,379	31,281,499	42,247,155	49,104,551	77,844,019
2	Sumut	180,899,861	223,090,098	317,976,296	392,943,733	462,785,602	434,768,283
3	Sumbar	50,604,326	59,463,558	74,868,735	95,261,173	125,412,648	145,259,878
4	Riau	95,908,057	120,656,279	161,667,871	196,465,737	228,082,947	248,399,255
5	Jambi	30,005,511	41,964,836	58,626,479	76,646,844	92,338,467	108,067,367
6	Sumsei	77,486,625	86,329,207	115,987,592	145,063,219	178,113,869	213,939,417
7	Bengkulu	10,929,519	12,121,316	17,089,709	23,397,490	28,741,197	36,728,000
8	Lampung	52,346,808	67,910,742	87,766,629	112,668,518	147,005,688	162,438,530
9	Babel	185,495	18,154,445	22,298,487	30,102,307	43,501,570	38,933,944
10	Kepri	0	0	0	31,024,638	75,024,599	63,492,575
11	Jakarta	871,168,927	1,058,527,196	1,410,353,536	1,692,225,469	1,960,369,264	2,219,386,557
12	Jawa Barat	355,130,012	394,743,464	664,005,951	875,419,394	870,055,261	1,296,774,623
13	Jawa Tengah	285,230,497	370,995,069	406,564,428	626,757,789	683,183,803	894,478,102
14	Yogya	52,177,692	66,953,503	87,824,753	117,065,877	149,291,829	177,008,047
15	Jawa Timur	485,679,486	521,049,156	674,325,435	946,459,970	1,167,355,857	1,243,742,486
16	Banten	78,698,688	115,332,469	182,963,683	246,810,907	323,259,431	367,906,975
17	Bali	133,950,881	141,809,259	156,046,184	221,902,087	264,488,612	290,800,084
18	Kalbar	34,873,127	46,289,710	61,146,866	77,351,407	89,030,138	112,249,712
19	Kalteng	12,011,231	17,698,006	21,058,290	26,671,800	34,364,194	30,609,206
20	Kalsei	34,345,892	58,165,276	80,089,791	100,155,183	125,370,095	130,562,553
21	Kaltim	55,317,864	81,302,368	109,663,173	147,706,794	312,767,328	270,268,592
22	Sulut	24,671,823	32,353,275	39,252,303	48,671,704	57,285,984	62,133,981
23	Sulteng	14,442,965	20,921,841	27,058,538	36,280,637	41,742,440	46,024,547
24	Sulsel	61,962,548	82,338,356	112,078,516	139,978,020	171,645,723	191,415,221
25	Sultra	7,168,186	8,739,145	14,289,189	17,889,231	19,904,981	21,572,773
26	Corontalo	2,751,055	3,610,581	8,298,074	10,497,444	13,003,275	15,256,926
27	Sulbar	0	0	0	0	4,624,483	7,432,424
28	NTB	21,845,255	26,398,568	31,986,365	40,873,156	48,809,812	62,047,972
29	NTT	10,827,702	14,311,254	16,927,081	24,179,240	26,920,260	29,719,768
30	Maluku	953,258	2,963,145	4,906,058	6,581,587	10,301,115	10,739,358
31	Maluku Utara	1,449,824	1,773,745	5,541,126	3,833,147	6,156,275	5,758,935
32	Iriabar	0	0	0	0	3,036,194	5,349,583
33	Papua	14,352,333	12,661,078	17,702,711	38,863,954	46,317,469	60,702,600
	Total	3,086,798,647	3,738,312,323	5,019,645,348	6,591,995,511	7,859,394,961	9,081,812,293

## Lampiran 2 Penerimaan BBNKB

No	Provinsi	Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (ribu rupiah)					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	13,318,545	19,185,660	27,636,496	63,844,465	79,919,505	125,097,763
2	Sumut	203,063,529	271,424,071	422,894,573	528,010,830	618,893,615	630,816,014
3	Sumbar	58,772,744	70,892,658	99,495,466	149,207,710	169,342,586	169,090,823
4	Riau	152,484,220	197,610,498	278,716,973	293,361,460	294,560,061	243,167,004
5	Jambi	41,536,393	61,161,671	90,278,580	132,525,072	143,224,447	116,732,182
6	Sumsel	85,103,890	101,790,326	138,559,523	198,730,339	241,166,803	249,376,944
7	Bengkulu	8,024,432	17,665,668	25,337,044	44,596,511	46,900,014	46,383,352
8	Lampung	56,237,731	81,787,430	110,505,692	170,103,198	229,784,313	183,266,622
9	Babel	192,705	20,033,794	22,695,761	50,598,473	89,546,520	98,150,136
10	Kepri	0	0	0	22,349,822	40,076,865	69,159,047
11	Jakarta	1,359,769,775	1,514,316,468	1,762,107,845	2,283,427,485	2,657,468,623	1,808,720,941
12	Jawa Barat	757,497,680	780,016,323	1,012,983,434	1,367,837,562	2,033,443,350	1,237,344,392
13	Jawa Tengah	401,208,309	491,535,739	486,074,190	743,088,928	1,020,414,760	670,002,285
14	Yogya	71,338,575	84,288,250	108,534,941	145,795,061	154,710,635	119,500,953
15	Jawa Timur	664,032,485	804,865,184	918,682,698	1,223,645,737	1,431,281,215	1,446,173,598
16	Banten	123,092,820	250,174,228	325,477,717	435,350,910	535,374,427	416,844,931
17	Bali	147,118,824	138,874,498	127,677,700	228,343,926	312,757,726	199,789,971
18	Kalbar	47,919,014	66,017,130	81,547,187	108,916,177	111,869,234	125,859,540
19	Kalteng	14,301,917	19,786,827	29,929,013	43,037,727	67,405,053	52,934,611
20	Kalsel	61,835,644	73,722,040	91,560,393	137,526,995	187,133,919	125,490,419
21	Kalim	87,898,698	144,608,324	174,440,063	240,620,784	254,797,772	362,500,090
22	Sulut	34,781,358	40,335,077	38,306,475	50,837,664	72,184,785	54,033,298
23	Sulteng	22,269,773	36,061,882	40,313,527	46,464,826	51,400,684	54,492,722
24	Sulsel	95,758,275	139,155,426	158,143,252	218,946,705	249,222,081	185,717,310
25	Sultra	12,989,829	17,731,203	27,040,296	32,464,966	35,109,456	30,799,006
26	Gorontalo	4,210,486	6,337,412	11,966,753	13,963,654	16,308,778	14,786,629
27	Sulbar	0	0	0	0	10,200,605	10,326,110
28	NTB	25,877,330	33,705,486	40,475,934	63,586,409	67,416,423	61,186,720
29	NTT	10,344,827	17,387,545	21,376,134	35,484,660	35,372,930	29,179,932
30	Maluku	1,673,936	3,137,184	6,830,562	9,325,251	14,314,069	14,767,462
31	Maluku Utara	2,545,913	3,486,373	4,540,717	5,145,157	8,226,486	7,652,887
32	Ijabar	0	0	0	0	4,073,267	5,168,872
33	Papua	21,051,775	20,475,323	28,269,242	59,161,150	60,720,676	68,533,236
	Total	4,586,251,430	5,527,599,698	6,712,398,181	9,146,399,614	11,334,631,683	9,033,045,802

## Lampiran 3 Penerimaan PBBKB

No	Provinsi	Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (ribu rupiah)					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	614,162	18,380,273	20,536,180	27,748,128	43,211,327	99,563,812
2	Sumut	4,054,315	89,478,988	106,933,230	141,732,964	199,940,617	281,939,545
3	Sumbar	0	34,653,087	39,297,328	51,636,642	71,801,139	87,838,235
4	Riau	3,558,946	76,097,646	87,054,267	93,509,909	103,589,348	239,785,223
5	Jambi	732,223	20,617,058	31,135,738	36,310,368	45,508,707	85,681,695
6	Sumsel	2,265,570	34,947,301	50,399,437	65,553,499	87,933,495	182,580,768
7	Bengkulu	3,944,063	6,398,129	9,176,538	11,959,575	17,012,895	32,145,008
8	Lampung	1,786,608	37,140,677	51,733,289	64,255,840	86,625,819	158,018,199
9	Babel	0	11,402,499	18,056,043	24,590,254	37,589,180	35,586,151
10	Kepri	0	0	0	15,871,930	45,236,214	124,073,299
11	Jakarta	61,169,446	210,141,600	215,379,945	282,251,097	393,039,503	632,724,670
12	Jawa Barat	14,339,044	248,609,234	273,412,574	360,382,328	402,474,543	832,647,888
13	Jawa Tengah	8,216,080	161,646,112	188,500,726	217,352,910	275,025,275	581,912,608
14	Yogya	0	23,403,271	29,841,916	42,519,997	53,914,945	88,744,338
15	Jawa Timur	0	204,623,838	286,779,633	334,466,631	457,111,846	539,657,658
16	Banten	2,118,517	64,233,055	77,838,989	96,211,631	159,515,459	265,998,123
17	Bali	3,916,483	44,603,398	51,381,270	58,667,714	78,150,268	139,172,117
18	Kalbar	13,571,979	41,137,074	33,288,483	39,059,905	52,256,317	76,577,920
19	Kalteng	714,872	16,600,260	18,520,403	26,492,269	36,169,474	34,139,255
20	Kalsel	0	41,508,659	57,154,715	83,956,871	134,419,777	205,130,435
21	Kaltim	1,622,248	55,842,606	101,065,109	126,062,643	118,159,282	148,798,761
22	Sulut	685,936	12,573,182	18,419,540	19,753,215	27,545,800	49,391,919
23	Sulteng	11,919,031	14,743,137	16,883,123	19,957,452	26,729,643	34,307,419
24	Sulsei	2,177,325	38,335,657	63,832,927	63,964,581	86,722,433	224,462,713
25	Sultra	455,174	5,722,578	11,602,440	13,311,186	18,366,395	32,158,623
26	Gorontalo	0	2,137,128	4,744,076	5,895,800	8,031,518	14,613,736
27	Sulbar	0	0	0	0	5,456,347	13,052,817
28	NTB	697,188	12,885,010	17,844,451	21,161,199	29,812,989	66,316,994
29	NTT	470,723	8,945,666	13,801,718	16,651,055	22,967,408	42,235,711
30	Maluku	492,927	3,494,725	14,182,843	24,736,609	26,520,484	23,572,080
31	Maluku Utara	749,700	2,028,756	3,876,760	5,479,231	10,051,328	10,739,617
32	Iriabar	0	0	0	0	4,957,183	7,481,545
33	Papua	0	6,353,479	11,418,756	23,378,300	24,068,581	27,249,133
	Total	139,372,560	1,548,684,083	1,924,092,447	2,414,881,733	3,189,915,539	5,416,298,005

## Lampiran 4 Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Air Permukaan

No	Provinsi	Penerimaan PABTAPU (ribu rupiah)					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	0	5,483,149	7,445,505	4,318,072	5,237,048	7,050,826
2	Sumut	0	96,723	14,166,693	18,684,385	19,518,006	18,921,217
3	Sumbar	0	1,899,916	5,190,735	11,208,937	9,410,542	6,950,943
4	Riau	0	0	11,065,583	26,813,356	29,652,325	33,194,637
5	Jambi	0	58,403	545,224	669,703	655,946	642,355
6	Sumsel	0	2,717,809	5,169,633	4,310,094	4,120,584	4,351,929
7	Bengkulu	0	0	295,328	693,740	692,269	536,560
8	Lampung	0	2,214,203	3,919,550	3,744,515	4,942,962	4,264,248
9	Babel	0	1,488,895	1,754,926	1,596,321	1,527,023	904,668
10	Kepri	0	0	0	369,585	1,175,459	3,597,799
11	Jakarta	45,971,136	48,708,026	48,663,804	52,298,362	55,013,400	58,973,082
12	Jawa Barat	0	11,651,820	58,084,533	84,716,690	79,963,405	82,334,576
13	Jawa Tengah	0	0	10,972,745	15,499,721	17,517,533	14,034,374
14	Yogya	0	874,236	1,941,973	2,191,428	2,202,255	2,152,948
15	Jawa Timur	0	23,223,554	30,710,684	35,495,241	33,382,868	27,329,617
16	Banten	0	583	18,341,956	18,666,734	19,789,377	20,342,370
17	Bali	0	0	0	0	7,953,174	8,776,306
18	Kalbar	0	0	64,062	447,108	561,091	771,277
19	Kalteng	0	0	156,956	175,065	167,017	110,156
20	Kalsel	0	0	9,950,046	9,393,896	7,511,019	17,297,511
21	Kalim	0	321,158	3,196,411	6,397,184	9,125,400	6,082,506
22	Sulut	0	340,350	1,251,749	1,199,039	1,574,295	1,242,011
23	Sulteng	0	0	0	185,868	153,536	207,571
24	Sulsel	0	0	22,992,116	47,484,508	57,835,115	58,560,885
25	Sultra	175,409	706,573	1,058,875	1,238,517	681,196	591,568
26	Gorontalo	0	0	48,731	58,549	66,233	50,618
27	Sulbar	0	0	0	0	29,966	53,798
28	NTB	120,617	891,839	847,535	818,519	944,285	929,143
29	NTT	0	225,281	335,989	463,967	287,975	480,328
30	Maluku	0	0	0	0	5,543	115,929
31	Maluku Utara	0	0	0	98,950	32,586	6,250
32	Ijabar	0	0	0	0	0	0
33	Papua	5,094,290	3,210,118	2,609,289	4,394,326	5,194,813	6,753,240
	Total	51,361,452	104,112,626	258,780,631	353,632,380	376,924,346	387,611,246

## Lampiran 6 Dana Perimbangan

No	Provinsi	Dana Perimbangan (ribu rupiah)					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	443,668,182	1,423,768,377	772,146,880	1,205,286,145	2,169,014,548	3,588,355,850
2	Sumut	460,221,648	414,885,006	484,991,624	512,975,483	518,391,297	782,842,710
3	Sumbar	263,570,311	269,747,027	282,135,643	296,263,749	310,066,307	554,231,890
4	Riau	1,199,633,155	1,169,570,220	1,150,896,013	1,248,715,798	1,783,743,461	2,489,065,460
5	Jambi	177,451,363	232,946,044	287,144,584	355,478,094	393,688,552	625,108,330
6	Sumsel	362,957,015	438,391,040	499,942,998	575,979,889	786,818,758	1,124,255,240
7	Bengkulu	147,521,881	173,554,647	228,913,080	239,606,415	254,143,754	391,160,410
8	Lampung	273,625,402	328,183,700	393,449,019	410,775,132	496,229,872	662,966,860
9	Babel	109,573,968	168,524,786	203,543,198	209,951,010	246,999,992	336,000,330
10	Kepri	0	0	0	80,397,569	235,952,621	948,506,810
11	Jakarta	3,684,456,140	3,973,085,858	4,497,794,511	5,096,297,651	5,770,008,024	6,519,816,270
12	Jawa Barat	942,698,337	990,049,852	948,581,196	1,197,663,954	1,220,120,700	1,298,795,160
13	Jawa Tengah	875,304,113	912,165,764	716,535,646	789,076,690	807,132,660	1,185,860,720
14	Yogya	244,031,833	248,971,412	238,620,045	283,268,472	277,237,968	448,979,276
15	Jawa Timur	861,506,405	953,920,390	780,561,188	862,509,974	909,866,655	1,376,748,100
16	Banten	243,623,232	488,240,444	496,728,918	518,487,669	522,487,103	465,362,830
17	Bali	191,112,282	211,220,087	236,842,224	236,938,134	261,364,428	421,596,130
18	Kalbar	257,055,475	268,199,103	323,943,320	346,854,224	378,683,287	669,251,790
19	Kalteng	269,920,427	265,808,948	313,938,678	349,214,595	372,614,589	673,709,280
20	Kalsel	259,216,625	285,594,387	278,459,869	301,858,881	388,055,704	594,627,200
21	Kaltim	1,532,601,569	1,507,644,285	1,578,816,447	1,827,165,086	2,792,313,824	3,465,865,510
22	Sulut	234,821,433	287,927,301	271,876,837	244,934,087	275,479,569	442,355,950
23	Sulteng	165,203,553	205,358,194	265,330,005	282,135,388	309,461,557	520,777,540
24	Sulsel	323,892,306	333,717,522	403,482,669	446,743,220	476,672,728	677,865,700
25	Sutra	169,920,965	192,378,000	263,507,935	256,467,508	283,934,454	478,402,170
26	Gorontalo	69,933,330	133,275,500	191,369,960	218,309,356	224,086,659	406,259,370
27	Sulbar	0	0	0	0	79,170,071	284,363,600
28	NTB	273,231,380	245,424,011	290,014,870	294,335,979	325,956,114	475,845,480
29	NTT	287,048,757	284,374,348	311,585,359	333,935,257	349,951,347	528,037,210
30	Maluku	218,025,896	215,427,664	270,757,487	307,584,789	321,525,302	477,886,890
31	Maluku Utara	145,990,694	180,635,040	228,948,061	247,592,695	282,242,131	393,582,170
32	Ijabar	0	0	0	0	269,964,622	517,046,420
33	Papua	710,332,389	1,944,527,367	651,175,519	575,324,060	684,333,580	4,680,472,830
	Total	15,398,150,064	18,748,496,324	17,849,835,803	20,162,126,913	24,777,712,234	36,404,001,515

## Lampiran 7 PDRB

No	Provinsi	PDRB (juta rupiah)					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	34,733,404	42,157,469	48,619,149	50,357,262	56,951,612	70,786,835
2	Sumut	79,331,335	89,670,148	103,401,370	118,100,512	139,618,314	160,376,799
3	Sumbar	26,154,135	29,899,130	33,130,683	37,358,646	44,674,569	53,029,588
4	Riau	107,293,094	110,398,462	97,275,278	114,246,374	139,018,996	167,068,189
5	Jambi	11,531,784	13,829,910	15,928,521	18,487,944	22,487,011	26,061,774
6	Sumsel	47,100,349	49,297,459	55,938,675	64,319,375	61,531,510	95,928,763
7	Bengkulu	5,508,255	6,276,077	7,251,985	8,104,894	10,134,451	11,397,004
8	Lampung	25,693,710	29,039,746	32,361,229	36,015,536	40,906,789	49,118,989
9	Babel	6,576,424	7,528,587	10,207,758	11,796,550	14,171,630	15,920,529
10	Kepri	0	0	32,845,566	36,736,521	40,984,738	46,216,076
11	Jakarta	263,720,107	299,991,943	334,331,300	375,561,523	433,860,253	501,771,741
12	Jawa Barat	219,186,969	241,407,388	275,721,681	305,703,402	389,244,654	473,187,293
13	Jawa Tengah	133,227,558	151,968,826	171,881,877	193,435,263	234,435,323	281,996,709
14	Yogya	15,229,910	17,524,441	19,613,418	22,023,880	25,337,603	29,417,349
15	Jawa Timur	202,830,063	267,461,781	300,609,858	341,065,251	403,392,351	470,627,494
16	Banten	51,970,381	60,347,159	68,575,297	73,713,784	84,622,803	97,867,273
17	Bali	20,190,206	23,856,438	26,167,942	28,986,596	33,946,468	37,388,485
18	Kalbar	21,359,187	23,914,131	26,062,747	29,750,226	33,869,468	37,714,997
19	Kalteng	12,316,808	14,047,809	15,705,030	18,299,982	20,983,170	24,480,038
20	Kalsel	19,130,854	21,016,189	25,399,908	28,028,044	31,794,089	34,670,494
21	Kaltim	91,890,396	93,769,927	106,453,595	133,704,074	180,289,090	199,586,125
22	Sulut	11,856,612	12,808,361	14,161,879	15,727,749	18,763,479	21,262,695
23	Sulteng	10,380,275	11,793,833	13,023,148	14,659,017	17,116,581	19,310,255
24	Sulsei	34,770,983	38,522,674	42,808,815	46,580,245	51,780,443	60,902,824
25	Sultra	6,864,340	8,043,485	8,908,781	10,267,955	12,981,046	15,270,351
26	Gorontalo	1,821,856	2,148,155	2,479,720	2,801,544	3,480,567	4,062,285
27	Sulbar	0	0	0	0	4,422,946	5,124,813
28	NTB	15,440,378	16,462,623	17,489,604	22,145,674	25,682,674	28,593,611
29	NTT	9,138,301	10,274,236	11,473,204	13,004,160	14,810,472	16,904,073
30	Maluku	3,006,472	3,465,232	3,688,653	4,048,283	4,570,664	5,079,837
31	Maluku Utara	1,952,867	2,035,158	2,175,010	2,368,865	2,583,101	2,818,417
32	Irijabar	0	0	5,555,597	6,576,537	7,913,777	8,945,540
33	Papua	25,878,023	27,505,230	23,890,084	24,842,904	43,615,319	46,892,057
	Total	1,516,085,036	1,726,461,985	1,951,147,364	2,210,818,673	2,669,975,941	3,119,781,300

LAMPIRAN DATA BASIS PAJAK

Lampiran 1 Jumlah Kendaraan Bermotor (JKB) unit

No	Provinsi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	404,154	502,127	557,601	600,139	730,551	785,687	863,076
2	Sumut	1,185,773	1,276,357	1,364,712	1,734,379	1,961,490	2,286,050	2,625,375
3	Sumbar	309,916	342,907	376,690	417,669	520,757	682,438	842,098
4	Riau	522,011	595,120	687,194	798,194	954,661	1,170,122	1,397,476
5	Jambi	221,479	250,817	278,408	312,980	418,936	625,934	869,347
6	Sumsel	454,131	471,580	480,250	499,004	548,732	763,943	1,003,471
7	Bengkulu	73,149	77,724	82,597	101,942	128,090	185,608	252,385
8	Lampung	286,586	314,362	340,960	431,571	526,187	673,840	826,173
9	Babel	0	0	0	0	227,272	239,505	245,791
10	Kepri	0	0	0	0	0	378,167	457,344
11	Jakarta	4,182,102	4,514,805	4,840,387	5,943,093	6,527,152	8,414,996	9,770,788
12	Jawa Barat	1,796,440	1,821,743	1,924,263	2,014,528	2,123,304	2,290,726	2,451,155
13	Jawa Tengah	2,340,491	2,750,567	3,347,846	3,936,789	4,521,575	5,643,167	6,688,317
14	Yogya	588,700	639,739	696,137	783,563	890,710	1,118,852	1,346,469
15	Jawa Timur	3,368,487	3,787,292	4,082,060	4,735,927	5,181,856	5,798,941	6,463,878
16	Banten	0	0	0	0	246,355	341,443	418,695
17	Bali	820,800	938,550	1,056,912	1,144,216	1,337,705	1,570,858	1,847,007
18	Kalbar	276,129	311,183	341,829	387,376	487,195	670,627	879,384
19	Kalteng	123,712	128,977	137,980	180,382	233,395	320,562	433,519
20	Kalsel	366,670	404,682	444,053	499,380	594,755	749,808	920,568
21	Kaltim	325,579	387,642	441,532	505,219	638,601	868,453	1,130,768
22	Sulut	118,724	126,708	135,147	148,352	176,184	246,974	344,683
23	Sulteng	260,428	264,254	294,657	338,565	434,129	555,875	725,532
24	Sulsei	436,997	458,700	464,624	519,949	567,686	694,622	879,818
25	Sultra	57,604	65,169	73,299	84,137	96,447	121,436	152,311
26	Gorontalo	0	0	0	0	6,651	66,188	76,524
27	Sulbar	0	0	0	0	0	0	0
28	NTB	175,253	195,614	216,296	240,365	289,958	372,779	502,470
29	NTT	81,204	83,818	86,336	88,202	109,035	173,439	252,395
30	Maluku	96,998	100,407	102,232	114,451	123,844	149,935	175,574
31	Maluku Utara	0	0	0	0	753	785	970
32	Iriabab	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua	101,726	115,998	129,158	146,330	165,130	195,518	237,894
		18,975,343	20,926,843	22,985,192	26,706,702	30,769,096	38,156,278	45,081,255

Jumlah Mobil (JMBL) unit

No	Provinsi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	71,983	97,056	102,455	106,169	137,741	151,499	166,202
2	Sumut	312,321	323,996	339,525	433,384	499,730	556,788	610,400
3	Sumbar	101,513	108,399	116,337	128,602	154,312	180,518	188,611
4	Riau	129,857	145,468	168,932	191,671	250,238	341,298	447,003
5	Jambi	49,388	51,818	54,375	60,764	74,351	109,263	149,886
6	Sumsel	140,135	149,258	154,503	164,609	183,734	255,793	340,317
7	Bengkulu	21,591	22,672	23,431	26,514	30,076	38,665	49,096
8	Lampung	82,356	86,497	90,374	102,627	110,738	124,326	138,610
9	Babel	0	0	0	0	36,737	39,692	41,079
10	Kepri	0	0	0	0	0	64,860	112,766
11	Jakarta	1,969,141	2,068,334	2,194,790	2,426,193	2,632,695	3,071,785	3,520,118
12	Jawa Barat	644,623	647,564	686,508	728,880	779,402	874,925	969,366
13	Jawa Tengah	370,739	382,111	393,274	442,710	469,625	573,745	676,560
14	Yogya	98,067	100,291	105,265	116,622	128,193	169,137	214,155
15	Jawa Timur	665,932	673,692	687,612	791,829	855,520	1,068,958	1,280,745
16	Banten	0	0	0	0	58,650	59,250	60,828
17	Bali	160,712	171,415	185,122	241,751	319,475	453,249	601,290
18	Kalbar	44,750	46,772	49,204	52,975	77,154	135,318	214,463
19	Kalteng	16,840	17,411	18,734	27,651	50,151	85,680	146,545
20	Kalsel	70,201	72,751	76,634	92,679	118,552	163,602	227,844
21	Kaltim	77,564	88,654	97,877	110,224	148,620	225,500	329,860
22	Sulut	58,025	59,979	63,329	69,399	72,438	84,861	112,886
23	Sulteng	56,540	56,814	62,220	78,119	112,305	157,457	212,697
24	Sulsel	125,483	130,165	136,451	170,593	216,578	330,151	466,521
25	Sultra	16,288	17,488	18,682	21,575	29,815	48,987	73,749
26	Gorontalo	0	0	0	0	975	10,047	16,669
27	Sulbar	0	0	0	0	0	0	0
28	NTB	33,659	34,542	35,442	37,299	44,352	66,975	95,328
29	NTT	25,234	25,628	27,323	28,354	37,866	62,928	95,203
30	Maluku	40,307	41,399	41,957	45,010	46,009	48,065	48,979
31	Maluku Utara	0	0	0	0	215	232	322
32	Iriabab	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua	29,077	29,594	30,694	34,123	37,015	46,226	59,933
		5,412,326	5,649,768	5,961,050	6,730,326	7,713,262	9,599,780	11,668,033



Jumlah Sepeda Motor (JSPD) unit

No	Provinsi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	332,171	405,071	455,146	493,970	592,810	634,188	696,874
2	Sumut	873,452	952,361	1,025,187	1,300,995	1,461,760	1,729,262	2,014,975
3	Sumbar	208,403	234,508	260,353	289,067	366,445	501,920	653,487
4	Riau	392,154	449,652	518,262	606,523	704,423	828,824	950,473
5	Jambi	172,091	198,999	224,033	252,216	344,585	516,671	719,461
6	Sumsel	313,996	322,322	325,757	334,395	364,998	508,150	663,154
7	Bengkulu	51,558	55,052	59,166	75,428	98,014	146,943	203,289
8	Lampung	204,230	227,865	250,586	328,944	415,449	549,514	687,563
9	Babel	0	0	0	0	190,535	199,813	204,712
10	Kepri	0	0	0	0	0	313,307	344,578
11	Jakarta	2,212,961	2,446,471	2,645,597	3,516,900	3,894,457	5,343,211	6,250,670
12	Jawa Barat	1,151,817	1,174,179	1,237,775	1,285,648	1,343,902	1,415,801	1,481,789
13	Jawa Tengah	1,969,752	2,368,456	2,954,572	3,494,079	4,051,950	5,069,422	6,011,757
14	Yogya	490,633	539,448	590,872	666,941	762,517	949,715	1,132,314
15	Jawa Timur	2,702,555	3,113,600	3,394,448	3,944,098	4,326,336	4,729,983	5,183,133
16	Banten	0	0	0	0	187,705	282,193	357,867
17	Bali	660,188	767,135	871,790	902,465	1,018,230	1,117,609	1,245,717
18	Kalbar	231,379	264,411	292,625	334,401	410,041	535,309	664,921
19	Kalteng	106,872	111,566	119,246	152,731	183,244	234,882	286,974
20	Kalsel	296,469	331,931	367,419	406,701	476,203	586,206	692,724
21	Kaltim	248,015	298,988	343,655	394,995	489,981	642,953	800,908
22	Sulut	60,699	66,729	71,818	78,953	103,746	162,113	231,795
23	Sulteng	203,888	207,440	232,437	260,448	321,824	398,418	512,835
24	Sulsel	311,514	326,535	328,173	349,356	351,108	364,471	413,297
25	Sultra	41,316	47,681	54,617	62,562	66,632	72,449	78,562
26	Gorontalo	0	0	0	0	5,676	55,141	59,855
27	Sulbar	0	0	0	0	0	0	0
28	NTB	141,594	161,072	180,854	203,066	245,606	305,804	407,142
29	NTT	55,970	58,190	59,013	59,848	71,169	110,511	157,192
30	Maluku	56,691	59,008	60,275	69,441	77,835	101,870	126,595
31	Maluku Utara	0	0	0	0	538	553	648
32	Ijabar	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua	72,649	86,404	98,484	112,207	128,115	149,292	177,961
		13,563,017	15,275,074	17,022,140	19,976,376	23,055,834	28,556,498	33,413,222

Penjualan Kendaraan Bermotor (KBB) unit

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	97,973	55,474	42,538	130,412	55,136	77,389
2	Sumut	90,584	88,355	369,667	227,111	324,660	339,325
3	Sumbang	32,991	33,783	40,979	103,088	161,681	159,660
4	Riau	73,109	92,074	111,000	156,467	215,481	227,354
5	Jambi	29,338	27,591	34,572	105,956	206,998	243,413
6	Sumsel	17,449	8,680	18,744	49,728	215,211	239,528
7	Bengkulu	4,575	4,873	19,345	26,148	57,518	66,777
8	Lampung	27,776	26,598	90,611	94,616	147,653	152,333
9	Babel	0	0	0	227,272	12,233	6,286
10	Kepri	0	0	0	0	378,167	79,177
11	Jakarta	332,703	325,582	1,102,706	584,059	1,887,844	1,355,792
12	Jawa Barat	25,303	102,540	90,245	108,776	167,422	160,429
13	Jawa Tengah	410,076	597,279	588,943	584,786	1,121,592	1,045,150
14	Yogya	51,039	56,398	87,426	107,147	228,142	227,617
15	Jawa Timur	418,805	294,768	653,867	445,929	617,085	664,937
16	Banten	0	0	0	246,355	95,088	77,252
17	Bali	117,650	118,362	87,304	193,489	239,153	276,149
18	Kalbar	35,054	30,646	45,547	99,819	183,432	208,757
19	Kalteng	5,265	9,003	42,402	53,013	87,167	112,957
20	Kalsel	38,012	39,371	55,327	95,375	165,053	170,780
21	Kaltim	62,063	53,890	63,687	133,382	229,852	262,315
22	Sulut	7,984	8,439	13,205	27,832	70,790	97,709
23	Sulteng	3,826	30,403	43,908	95,564	121,746	169,657
24	Sulsel	19,703	7,924	55,325	47,737	126,936	185,196
25	Sultra	7,565	8,130	10,838	12,310	24,989	30,875
26	Gorontalo	0	0	0	6,651	58,537	11,336
27	Sulbar	0	0	0	0	0	0
28	NTB	20,361	20,682	24,069	49,593	82,821	129,691
29	NTT	2,614	2,518	1,866	20,833	64,404	78,956
30	Maluku	3,409	1,825	12,219	9,393	26,091	25,639
31	Maluku Utara	0	0	0	753	32	185
32	Ijabar	0	0	0	0	0	0
33	Papua	14,272	13,160	17,172	18,800	30,388	42,376
		1,949,499	2,058,348	3,723,512	4,062,394	7,387,182	6,924,977

Penjualan Mobil (MLB) unit

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	25,073	5,399	3,714	31,572	13,758	14,703
2	Sumut	11,675	15,529	93,859	66,346	57,058	53,612
3	Sumbang	6,886	7,938	12,265	25,710	26,206	8,093
4	Riau	15,611	23,464	22,739	58,567	91,060	105,705
5	Jambi	2,430	2,557	6,369	13,587	34,912	40,623
6	Sumsel	9,123	5,245	10,106	19,125	72,059	84,524
7	Bengkulu	1,081	759	3,083	3,562	8,589	10,431
8	Lampung	4,141	3,877	12,253	8,111	13,588	14,284
9	Babel	0	0	0	36,737	2,955	1,387
10	Kepri	0	0	0	0	64,860	47,906
11	Jakarta	99,193	126,456	231,403	206,502	439,090	448,333
12	Jawa Barat	2,941	38,944	42,372	50,522	95,523	94,441
13	Jawa Tengah	11,372	11,163	49,436	26,915	104,120	102,815
14	Yogya	2,224	4,974	11,357	11,571	40,944	45,018
15	Jawa Timur	7,760	13,920	104,217	63,691	213,438	211,787
16	Banten	0	0	0	58,650	600	1,578
17	Bali	10,703	13,707	56,629	77,724	133,774	148,041
18	Kalbar	2,022	2,432	3,771	24,179	58,164	79,145
19	Kalteng	571	1,323	8,917	22,500	35,529	60,865
20	Kalsel	2,550	3,883	16,045	25,873	45,050	64,242
21	Kaltim	11,090	9,223	12,347	38,396	76,880	104,360
22	Sulut	1,954	3,350	6,070	3,039	12,423	28,027
23	Sulteng	274	5,406	15,899	34,186	45,152	55,240
24	Suisel	4,682	6,286	34,142	45,985	113,573	136,370
25	Sultra	1,200	1,194	2,893	8,240	19,172	24,762
26	Gorontalo	0	0	0	975	9,072	6,622
27	Sulbar	0	0	0	0	0	0
28	NTB	883	900	1,857	7,053	22,623	26,353
29	NTT	394	1,695	1,031	9,512	25,062	32,275
30	Maluku	1,092	558	3,053	999	2,056	914
31	Maluku Utara	0	0	0	215	17	90
32	Iriabar	0	0	0	0	0	0
33	Papua	517	1,100	3,429	2,892	9,211	13,707
		237,442	311,282	769,276	982,936	1,886,518	2,068,253

Penjualan Sepeda Motor (SPDB) unit

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	72,900	50,075	36,824	98,840	41,378	62,686
2	Sumut	78,909	72,826	275,808	160,765	267,502	285,713
3	Sumbar	26,105	25,845	28,714	77,378	135,475	151,567
4	Riau	57,498	68,610	88,261	97,900	124,401	121,649
5	Jambi	26,908	25,034	28,183	92,369	172,086	202,790
6	Sumsel	8,326	3,435	8,638	30,603	143,152	155,004
7	Bengkulu	3,494	4,114	16,262	22,586	48,929	56,346
8	Lampung	23,635	22,721	78,358	86,505	134,065	138,049
9	Babel	0	0	0	190,635	9,278	4,899
10	Kepri	0	0	0	0	313,307	31,271
11	Jakarta	233,510	199,126	871,303	377,657	1,448,754	907,469
12	Jawa Barat	22,362	63,596	47,873	58,254	71,899	65,988
13	Jawa Tengah	398,704	586,116	539,507	557,871	1,017,472	942,335
14	Yogya	48,815	51,424	76,069	95,576	187,198	182,599
15	Jawa Timur	411,045	280,848	549,650	382,238	403,647	453,150
16	Banten	0	0	0	187,705	94,488	75,674
17	Bali	106,947	104,655	30,675	115,765	99,379	128,108
18	Kalbar	33,032	28,214	41,776	75,640	125,266	129,612
19	Kalteng	4,694	7,680	33,485	30,513	51,638	62,092
20	Kalsel	35,462	35,488	39,282	69,502	110,003	106,518
21	Kaltim	50,973	44,667	51,340	94,986	152,972	157,955
22	Sulut	6,030	5,089	7,135	24,793	58,367	69,682
23	Sulteng	3,552	24,997	28,009	61,378	76,594	114,417
24	Sulsel	15,021	1,638	21,183	1,752	13,363	48,826
25	Sultra	6,365	6,936	7,945	4,070	5,817	6,113
26	Gorontalo	0	0	0	5,676	49,485	4,714
27	Sulbar	0	0	0	0	0	0
28	NTB	19,478	19,782	22,212	42,640	60,198	101,338
29	NTT	2,220	823	835	11,321	39,342	46,681
30	Maluku	2,317	1,267	9,166	8,394	24,035	24,725
31	Maluku Utara	0	0	0	538	15	95
32	Ijabar	0	0	0	0	0	0
33	Papua	13,755	12,060	13,743	15,908	21,177	28,669
		1,712,057	1,747,066	2,954,236	3,079,458	5,500,664	4,856,724

## Lampiran 7 Volume Premium (kilo liter)

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	222,247	251,925	312,549	245,233	632,981	633,212
2	Sumut	649,814	748,361	832,548	1,541,583	1,702,436	1,798,689
3	Sumbar	298,160	344,365	389,052	440,695	614,117	613,055
4	Riau	308,628	344,408	412,125	621,651	780,506	783,899
5	Jambi	52,935	63,950	72,355	200,647	241,366	242,000
6	Sumsel	287,504	355,151	352,828	372,869	516,917	522,614
7	Bengkulu	24,068	25,857	17,702	29,371	34,103	33,745
8	Lampung	281,691	277,206	284,595	665,125	499,915	663,597
9	Babel	15,526	19,100	20,322	22,706	57,071	41,391
10	Kepri	0	0	0	0	126,822	163,848
11	Jakarta	1,663,175	1,733,485	2,083,688	2,350,174	3,105,064	3,435,213
12	Jawa Barat	478,689	559,069	416,028	1,006,684	2,948,369	2,978,179
13	Jawa Tengah	795,376	841,194	766,667	751,302	753,990	987,196
14	Yogya	117,176	149,060	159,654	302,259	449,019	381,252
15	Jawa Timur	862,933	765,762	648,809	552,823	712,658	1,266,804
16	Banten	58,994	51,846	49,801	79,209	453,563	134,674
17	Bali	149,433	105,114	163,137	196,951	186,754	232,545
18	Kalbar	240,084	276,941	244,701	410,613	449,976	450,999
19	Kalteng	11,963	12,062	20,926	23,665	56,299	37,697
20	Kalsel	166,730	176,460	147,105	172,016	305,792	277,488
21	Kalim	239,361	274,103	315,082	397,056	396,428	527,427
22	Sulut	15,184	16,828	13,072	18,401	51,755	25,480
23	Sulteng	64,957	64,860	61,792	110,352	162,283	134,300
24	Sufset	328,215	323,138	303,479	323,802	508,777	572,537
25	Sultra	65,405	74,403	60,476	170,810	241,051	190,935
26	Gorontalo	31,704	31,965	30,298	48,849	126,939	93,875
27	Sulbar	0	0	0	0	28,437	38,818
28	NTB	30,987	30,611	22,966	27,966	49,634	64,459
29	NTT	70,245	68,294	60,443	76,367	189,825	124,239
30	Maluku	63,081	65,748	67,652	72,746	104,702	95,879
31	Maluku Uta	59,064	66,633	68,602	80,251	89,459	101,931
32	Irijabar	0	0	0	0	104,486	358,050
33	Papua	394,271	446,775	378,335	391,305	200,008	136,546
		8,047,619	8,564,671	8,776,784	11,703,480	16,881,502	18,121,572

## Lampiran 7 Volume Solar (kilo liter)

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	276,320	313,219	323,155	253,555	632,981	644,272
2	Sumut	2,401,212	2,603,291	2,410,977	4,464,274	2,210,314	3,682,951
3	Sumbar	778,353	898,974	705,156	798,759	1,235,548	1,148,773
4	Riau	971,119	864,855	746,586	1,126,153	1,550,455	1,462,266
5	Jambi	227,541	316,507	249,879	692,939	919,888	862,119
6	Sumsel	1,263,428	1,241,104	1,004,789	1,061,863	1,559,363	1,515,742
7	Bengkulu	438,499	485,964	378,180	627,483	165,772	350,240
8	Lampung	418,066	400,966	397,191	928,273	499,915	788,871
9	Babel	86,679	106,633	97,657	109,116	289,145	202,513
10	Kepri	0	0	0	0	642,534	800,361
11	Jakarta	5,476,032	5,500,823	4,950,856	5,584,030	8,106,838	8,420,957
12	Jawa Barat	706,526	775,539	684,601	1,656,563	2,948,369	2,387,814
13	Jawa Tengah	1,204,373	1,274,656	1,130,767	1,108,105	1,121,313	1,420,368
14	Yogya	72,198	82,659	89,583	169,599	251,181	213,720
15	Jawa Timur	2,494,878	2,375,385	2,106,386	1,794,763	2,284,449	2,820,438
16	Banten	175,340	187,496	152,289	242,220	453,563	329,923
17	Bali	452,990	488,910	464,924	561,290	636,230	704,878
18	Kalbar	544,580	635,641	544,496	913,674	1,010,558	1,006,529
19	Kalteng	177,790	200,421	162,987	184,325	56,299	118,026
20	Kalsel	259,406	286,216	213,075	249,157	455,841	405,514
21	Kaltim	888,265	909,201	843,735	1,063,247	1,132,955	1,268,282
22	Sulut	59,706	63,591	81,899	115,288	51,755	101,113
23	Sulteng	529,534	545,689	402,606	718,994	373,583	255,181
24	Sulsel	644,048	797,156	590,491	630,034	1,066,517	1,141,504
25	Sultra	187,777	141,119	112,865	318,779	451,944	356,860
26	Gorontalo	73,124	73,724	79,149	127,613	322,021	243,061
27	Sulbar	0	0	0	0	144,074	189,923
28	NTB	105,660	122,333	142,219	173,181	72,666	135,324
29	NTT	462,083	367,687	312,896	395,333	453,291	468,389
30	Maluku	74,330	77,491	70,595	75,911	12,298	100,880
31	Maluku Utara	125,025	153,862	149,437	174,812	198,427	223,350
32	Injabar	0	0	0	0	529,369	498,516
33	Papua	1,178,437	1,215,268	1,169,539	1,209,633	200,008	668,077
		22,753,316	23,506,376	20,768,962	27,528,967	32,039,463	34,936,735

## Lampiran 8 Konsumsi Premium (Rupiah)

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	288,921,230	421,470,692	565,713,147	443,871,911	1,789,436,439	2,849,453,100
2	Sumut	844,756,200	1,252,007,618	1,506,911,518	2,790,265,773	4,812,786,289	8,094,100,950
3	Sumbang	387,607,480	576,122,980	704,183,215	797,657,407	1,736,108,194	2,758,747,950
4	Riau	401,216,270	576,194,249	746,946,874	1,125,186,672	2,206,489,049	3,527,546,400
5	Jambi	68,815,240	106,988,015	130,962,007	363,170,166	682,342,813	1,088,999,100
6	Sumsel	373,754,940	594,168,125	638,617,956	674,892,890	1,461,323,228	2,351,764,800
7	Bengkulu	31,287,750	43,258,092	32,040,258	53,161,872	96,408,898	151,852,050
8	Lampung	366,198,040	463,765,973	515,116,588	1,203,875,888	1,413,259,705	2,986,186,950
9	Babel	20,183,150	31,853,631	36,782,277	41,098,403	161,333,434	186,259,050
10	Kepri	0	0	0	0	358,525,794	737,315,100
11	Jakarta	2,162,127,890	2,900,119,736	3,771,474,556	4,253,814,759	8,778,015,080	15,458,459,850
12	Jawa Barat	622,295,440	935,322,604	753,010,318	1,822,097,678	8,335,039,163	13,401,804,150
13	Jawa Tengah	1,033,989,060	1,407,317,060	1,387,667,270	1,359,855,896	2,131,530,295	4,362,381,550
14	Yogya	152,328,540	249,376,878	288,974,283	547,088,068	1,269,377,844	1,715,632,200
15	Jawa Timur	1,121,812,640	1,281,119,659	1,174,343,747	1,000,609,087	2,014,685,014	5,696,117,100
16	Banten	76,692,590	86,738,358	90,139,267	143,368,471	1,282,222,318	606,032,550
17	Bali	194,263,290	175,855,669	295,277,970	356,481,310	527,954,689	1,046,454,300
18	Kalbar	312,109,330	463,321,457	442,908,810	743,209,892	1,272,081,889	2,029,495,050
19	Kalteng	15,551,840	20,179,728	37,875,698	42,834,193	159,156,142	189,637,850
20	Kalsel	216,749,390	295,217,747	266,259,145	311,349,055	864,474,549	1,248,696,450
21	Kaltim	311,194,660	459,574,821	570,298,058	718,670,998	1,120,702,521	2,373,419,700
22	Sulut	19,739,070	28,153,244	23,680,501	33,308,534	146,312,233	114,660,800
23	Sulteng	84,444,230	108,509,944	111,844,063	199,736,939	458,774,324	604,350,900
24	Sulsei	426,678,850	540,809,372	549,296,447	586,081,077	1,438,312,296	2,576,414,250
25	Sultra	85,027,020	124,475,383	109,460,836	309,165,557	681,449,784	859,209,300
26	Gorontalo	41,215,720	53,477,110	54,838,475	88,416,509	358,955,988	422,435,700
27	Sulbar	0	0	0	0	80,391,682	174,679,650
28	NTB	40,283,100	51,211,534	41,568,822	50,618,822	140,315,035	290,068,650
29	NTT	91,319,020	114,255,862	109,400,925	138,224,270	536,636,406	559,073,250
30	Maluku	82,005,430	109,996,739	122,460,120	131,670,984	295,993,685	431,455,500
31	Maluku Utara	76,783,070	111,477,009	124,170,344	145,255,034	252,900,593	458,690,850
32	Iriabar	0	0	0	0	295,381,639	1,811,223,650
33	Papua	512,552,170	747,454,910	684,785,445	708,261,326	565,422,933	614,456,100
		<b>10,461,904,440</b>	<b>14,328,894,416</b>	<b>15,885,979,040</b>	<b>21,183,296,438</b>	<b>47,724,005,306</b>	<b>81,547,073,100</b>



## Lampiran 10 Konsumsi Solar (Rupiah)

No	Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Aceh	290,965,171	413,135,861	539,668,516	418,365,585	1,629,925,303	2,770,370,030
2	Sumut	2,528,475,710	3,433,741,093	4,026,331,256	7,366,052,100	5,691,558,808	15,836,690,590
3	Sumbar	819,605,604	1,185,746,442	1,177,610,019	1,317,952,515	3,181,535,070	4,939,724,760
4	Riau	1,022,588,095	1,140,743,613	1,246,798,453	1,858,151,625	3,992,421,110	6,287,745,090
5	Jambi	239,601,094	417,472,601	417,298,264	1,143,349,185	2,368,711,343	3,707,110,410
6	Sumsel	1,330,390,000	1,637,015,517	1,677,997,964	1,752,074,610	4,015,358,438	6,517,691,030
7	Bengkulu	461,739,868	640,986,120	631,560,099	1,035,346,950	426,862,128	1,506,031,140
8	Lampung	440,223,383	528,873,495	663,309,137	1,531,650,450	1,287,281,125	3,392,143,160
9	Babel	91,272,882	140,648,795	163,086,689	180,041,400	744,548,890	670,805,760
10	Kepri	0	0	0	0	1,654,524,535	3,441,553,160
11	Jakarta	5,766,262,012	7,255,585,141	8,267,930,021	9,213,649,005	20,875,107,850	36,210,115,960
12	Jawa Barat	743,971,352	1,022,935,809	1,143,282,835	2,733,328,785	7,592,050,175	10,267,600,630
13	Jawa Tengah	1,268,204,980	1,681,271,528	1,868,381,057	1,828,372,425	2,887,381,233	6,107,581,970
14	Yogya	76,024,389	109,026,825	149,603,610	279,838,515	646,789,788	918,997,720
15	Jawa Timur	2,627,106,850	3,133,132,287	3,517,665,121	2,961,359,610	5,882,457,205	12,127,883,400
16	Banten	184,632,599	247,307,224	254,323,131	399,662,175	1,167,924,468	1,418,668,470
17	Bali	476,997,944	644,872,554	776,422,913	926,129,160	1,638,292,508	3,030,974,110
18	Kalbar	573,443,056	838,410,875	909,307,485	1,507,562,760	2,602,186,335	4,328,073,840
19	Kalteng	187,212,765	264,355,431	272,188,290	304,135,755	144,968,895	507,511,800
20	Kalsel	273,154,939	377,518,508	355,834,749	411,109,545	1,173,790,833	1,743,708,910
21	Kaltim	935,342,940	1,199,235,591	1,409,037,617	1,754,358,210	2,917,359,383	5,453,612,600
22	Sulut	62,870,523	83,878,529	136,770,829	190,224,705	133,269,898	434,786,760
23	Sulteng	557,598,881	719,763,395	672,351,686	1,186,340,760	961,975,453	1,087,277,440
24	Sulsel	678,152,228	1,051,448,632	986,119,636	1,039,556,430	2,746,282,305	4,908,465,480
25	Sultra	197,728,655	186,135,565	188,483,715	525,985,515	1,163,756,573	1,534,495,850
26	Gorontalo	76,999,572	97,242,484	132,179,184	210,561,285	829,203,818	1,045,161,870
27	Sulbar	0	0	0	0	370,991,323	816,670,190
28	NTB	111,259,769	181,358,831	237,505,396	285,749,310	187,114,693	581,892,770
29	NTT	486,572,973	484,979,417	522,536,487	652,300,110	1,167,223,039	2,014,073,130
30	Maluku	78,269,659	102,210,497	117,893,483	125,252,985	31,667,093	433,783,140
31	Maluku Utara	131,850,904	202,943,460	249,559,289	288,439,470	610,960,555	960,406,290
32	Ijabar	0	0	0	0	1,363,125,948	2,143,620,520
33	Papua	1,240,893,740	1,602,938,228	1,953,130,130	1,995,894,730	515,020,343	2,872,731,960
		23,959,241,853	31,804,910,340	34,684,187,041	45,422,795,715	82,501,616,453	150,227,960,930



Lampiran 1. Buoyancy PKB terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(PKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 10:08

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.684314	0.067945	24.78929	0.0000
Fixed Effects				
__ACEH-C	-12.32005			
__SUMUT-C	-11.63860			
__SUMBAR-C	-10.82001			
__RIAU-C	-12.41323			
__JAMBI-C	-10.13688			
__BENKL-C	-9.952286			
__SUMSEL-C	-11.59701			
__LAMPG-C	-10.85223			
__JABAR-C	-12.58464			
__DKIJKT-C	-12.08206			
__JATENG-C	-12.05271			
__YOGYA-C	-9.986146			
__JATIM-C	-12.49908			
__KALBAR-C	-10.90395			
__KALTENG-C	-11.13397			
__KALSEL-C	-10.56561			
__KALTIM-C	-12.71931			
__BALI-C	-9.796695			
__NTB-C	-10.94280			
__NTT-C	-10.72762			
__SULUT-C	-10.32713			
__SULTENG-C	-10.54617			
__SULSEL-C	-11.11524			
__SULTRA-C	-10.70882			
__MALUKU-C	-10.21725			
__PAPUA-C	-11.95089			
R-squared	0.983372	Mean dependent var	18.21967	
Adjusted R-squared	0.980021	S.D. dependent var	1.405961	
S.E. of regression	0.198729	Sum squared resid	5.094649	
F-statistic	293.4259	Durbin-Watson stat	1.283204	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 2. Buoyancy BBNKB terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 10:10

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.504563	0.096483	15.59409	0.0000
Fixed Effects				
__ACEH-C	-9.132029			
__SUMUT-C	-8.048344			
__SUMBAR-C	-7.464345			
__RIAU-C	-8.712440			
__JAMBI-C	-6.774128			
__BENKL-C	-6.793544			
__SUMSEL-C	-8.166372			

_LAMPG-C	-7.486780		
_JABAR-C	-8.554248		
_DKIJKT-C	-8.303337		
_JATENG-C	-8.447266		
_YOGYA-C	-6.852655		
_JATIM-C	-8.701320		
_KALBAR-C	-7.545893		
_KALTENG-C	-7.776825		
_KALSEL-C	-7.223168		
_KALTIM-C	-9.017088		
_BALI-C	-6.766688		
_NTB-C	-7.683960		
_NTT-C	-7.622657		
_SULUT-C	-7.239487		
_SULTENG-C	-7.254253		
_SULSEL-C	-7.596896		
_SULTRA-C	-7.234984		
_MALUKU-C	-7.163987		
_PAPUA-C	-8.493738		
R-squared	0.966088	Mean dependent var	18.48765
Adjusted R-squared	0.959254	S.D. dependent var	1.398005
S.E. of regression	0.282198	Sum squared resid	10.27299
F-statistic	141.3466	Durbin-Watson stat	1.231992
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 3. Buoyancy PBBKB terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 10:11

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (unbalanced) observations: 151

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	3.982283	0.304842	13.06344	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-53.87278			
_SUMUT-C	-55.57252			
_SUMBAR-C	-51.22325			
_RIAU-C	-56.16156			
_JAMBI-C	-49.56933			
_BENKL-C	-47.03750			
_SUMSEL-C	-54.03710			
_LAMPG-C	-51.68845			
_JABAR-C	-58.59523			
_DKIJKT-C	-59.15412			
_JATENG-C	-57.09413			
_YOGYA-C	-49.82895			
_JATIM-C	-58.68103			
_KALBAR-C	-50.87222			
_KALTENG-C	-49.89064			
_KALSEL-C	-49.95230			
_KALTIM-C	-56.57061			
_BALI-C	-50.70127			
_NTB-C	-50.59316			
_NTT-C	-48.91208			
_SULUT-C	-49.55402			
_SULTENG-C	-48.77300			
_SULSEL-C	-52.62910			
_SULTRA-C	-48.30902			
_MALUKU-C	-44.49858			

PAPUA-C	-52.21492		
R-squared	0.760493	Mean dependent var	17.37824
Adjusted R-squared	0.710274	S.D. dependent var	1.592569
S.E. of regression	0.857219	Sum squared resid	91.11826
F-statistic	15.14349	Durbin-Watson stat	1.706295
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4. Buoyancy PABTAPU terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(PABTAPU?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/10/09 Time: 04:17

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (unbalanced) observations: 119

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.750985	0.309939	5.649455	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-15.56920			
_SUMUT-C	-16.92204			
_SUMBAR-C	-14.75527			
_RIAU-C	-15.70774			
_JAMBI-C	-16.46048			
_BENKL-C	-14.88141			
_SUMSEL-C	-16.34905			
_LAMPG-C	-15.38520			
_JABAR-C	-16.56440			
_DKIJKT-C	-16.73973			
_JATENG-C	-17.13128			
_YOGYA-C	-15.24530			
_JATIM-C	-17.23826			
_KALBAR-C	-17.51633			
_KALTENG-C	-17.48297			
_KALSEL-C	-13.96568			
_KALTIM-C	-17.80862			
_BALI-C	-14.50882			
_NTB-C	-16.11062			
_NTT-C	-15.94344			
_SULUT-C	-15.25895			
_SULTENG-C	-17.03764			
_SULSEL-C	-13.46541			
_SULTRA-C	-14.86165			
_MALUKU-C	-16.80360			
_PAPUA-C	-14.91501			
R-squared	0.905357	Mean dependent var	14.88877	
Adjusted R-squared	0.878610	S.D. dependent var	1.982823	
S.E. of regression	0.690835	Sum squared resid	43.90731	
F-statistic	33.84913	Durbin-Watson stat	1.787206	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 5 Bouyancy PPROV terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(PPROV?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/04/09 Time: 10:02

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.892480	0.087988	21.50833	0.0000

Fixed Effects			
_ACEH-C	-14.98154		
_SUMUT-C	-14.51057		
_SUMBAR-C	-13.38452		
_RIAU-C	-15.17537		
_JAMBI-C	-12.53620		
_BENKL-C	-12.17261		
_SUMSEL-C	-14.35126		
_LAMPNG-C	-13.42203		
_JABAR-C	-15.48348		
_DKIJKT-C	-15.26625		
_JATENG-C	-15.05452		
_YOGYA-C	-12.59425		
_JATIM-C	-15.58873		
_KALBAR-C	-13.40454		
_KALTENG-C	-13.42286		
_KALSEL-C	-12.95442		
_KALTIM-C	-15.50554		
_BALI-C	-12.55087		
_NTB-C	-13.40856		
_NTT-C	-13.05744		
_SULUT-C	-12.82547		
_SULTENG-C	-12.84931		
_SULSEL-C	-13.63585		
_SULTRA-C	-12.78160		
_MALUKU-C	-11.88239		
_PAPUA-C	-14.42125		
<hr/>			
R-squared	0.970196	Mean dependent var	19.29006
Adjusted R-squared	0.964189	S.D. dependent var	1.359946
S.E. of regression	0.257352	Sum squared resid	8.543695
F-statistic	161.5121	Durbin-Watson stat	1.108621
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 6 Elastisitas JKB terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(JKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 04:20

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.241007	0.043154	28.75737	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-8.582694			
_SUMUT-C	-8.587080			
_SUMBAR-C	-8.301479			
_RIAU-C	-9.388199			
_JAMBI-C	-7.756482			
_BENKL-C	-7.961973			
_SUMSEL-C	-8.988110			
_LAMPNG-C	-8.448251			
_JABAR-C	-9.693921			
_DKIJKT-C	-8.774321			
_JATENG-C	-8.374713			
_YOGYA-C	-7.234775			
_JATIM-C	-8.890962			
_KALBAR-C	-8.214382			
_KALTENG-C	-8.385716			
_KALSEL-C	-7.927527			
_KALTIM-C	-9.837512			
_BALI-C	-7.209843			

_NTB-C	-8.322925		
_NTT-C	-8.563616		
_SULUT-C	-8.421291		
_SULTENG-C	-7.506410		
_SULSEL-C	-8.609199		
_SULTRA-C	-8.545447		
_MALUKU-C	-7.102807		
_PAPUA-C	-9.417662		
R-squared	0.990495	Mean dependent var	13.23433
Adjusted R-squared	0.986680	S.D. dependent var	1.181104
S.E. of regression	0.126220	Sum squared resid	2.055166
F-statistic	517.0468	Durbin-Watson stat	0.940398
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7 Elastisitas JMBL terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(JMBL?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 04:22

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.379255	0.070377	19.59819	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-12.70363			
_SUMUT-C	-12.54697			
_SUMBAR-C	-11.94652			
_RIAU-C	-13.28547			
_JAMBI-C	-11.74142			
_BENKL-C	-11.57246			
_SUMSEL-C	-12.58240			
_LAMPG-C	-12.36328			
_JABAR-C	-13.39084			
_DKIJKT-C	-12.39855			
_JATENG-C	-13.19919			
_YOGYA-C	-11.45124			
_JATIM-C	-13.33256			
_KALBAR-C	-12.36573			
_KALTENG-C	-12.32475			
_KALSEL-C	-11.90319			
_KALTIM-C	-13.84211			
_BALI-C	-11.04528			
_NTB-C	-12.42693			
_NTT-C	-11.90695			
_SULUT-C	-11.59937			
_SULTENG-C	-11.18169			
_SULSEL-C	-12.03619			
_SULTRA-C	-11.91551			
_MALUKU-C	-10.22059			
_PAPUA-C	-13.23092			
R-squared	0.974290	Mean dependent var	11.82153	
Adjusted R-squared	0.969109	S.D. dependent var	1.171153	
S.E. of regression	0.205841	Sum squared resid	5.465801	
F-statistic	188.0227	Durbin-Watson stat	0.674101	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 8 Elastisitas JSPD terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(JSPD?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 04:23

Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 26  
 Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.188827	0.048901	24.31094	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-7.866608			
_SUMUT-C	-7.904141			
_SUMBAR-C	-7.738724			
_RIAU-C	-8.729179			
_JAMBI-C	-7.093449			
_BENKL-C	-7.416418			
_SUMSEL-C	-8.450422			
_LAMPG-C	-7.796484			
_JABAR-C	-9.136279			
_DKIJKT-C	-8.272812			
_JATENG-C	-7.500074			
_YOGYA-C	-6.519691			
_JATIM-C	-8.063942			
_KALBAR-C	-7.509639			
_KALTENG-C	-7.753626			
_KALSEL-C	-7.260730			
_KALTIM-C	-9.141224			
_BALI-C	-6.588537			
_NTB-C	-7.630701			
_NTT-C	-8.125679			
_SULUT-C	-8.099545			
_SULTENG-C	-6.934408			
_SULSEL-C	-8.182812			
_SULTRA-C	-8.112944			
_MALUKU-C	-6.766932			
_PAPUA-C	-8.792022			
R-squared	0.988247	Mean dependent var	12.92596	
Adjusted R-squared	0.985878	S.D. dependent var	1.203579	
S.E. of regression	0.143028	Sum squared resid	2.638946	
F-statistic	417.1883	Durbin-Watson stat	0.797075	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 9 Elastisitas KBB terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(KBB?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 04/05/09 Time: 04:25  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 26  
 Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	2.841174	0.182587	15.56063	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-39.15894			
_SUMUT-C	-40.42115			
_SUMBAR-C	-37.89879			
_RIAU-C	-41.06177			
_JAMBI-C	-36.16803			
_BENKL-C	-35.26953			
_SUMSEL-C	-40.35208			
_LAMPG-C	-38.14147			
_JABAR-C	-44.06462			
_DKIJKT-C	-42.44424			
_JATENG-C	-40.70379			

_YOGYA-C	-36.33418		
_JATIM-C	-42.52018		
_KALBAR-C	-37.50917		
_KALTENG-C	-36.95911		
_KALSEL-C	-37.26701		
_KALTIM-C	-41.43672		
_BALI-C	-36.73556		
_NTB-C	-37.17901		
_NTT-C	-37.13428		
_SULUT-C	-36.95904		
_SULTENG-C	-36.01567		
_SULSEL-C	-39.35413		
_SULTRA-C	-36.27696		
_MALUKU-C	-34.04424		
_PAPUA-C	-39.05948		
R-squared	0.880558	Mean dependent var	11.10726
Adjusted R-squared	0.856484	S.D. dependent var	1.409690
S.E. of regression	0.534040	Sum squared resid	36.79070
F-statistic	36.57760	Durbin-Watson stat	1.480486
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 10 Elastisitas MBLB terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(MBLB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 04:26

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	4.009775	0.238147	16.83737	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-61.62654			
_SUMUT-C	-63.73923			
_SUMBAR-C	-59.81308			
_RIAU-C	-63.99024			
_JAMBI-C	-57.67970			
_BENKL-C	-55.63789			
_SUMSEL-C	-62.15736			
_LAMPUNG-C	-60.60436			
_JABAR-C	-67.85384			
_DKIJKT-C	-66.68563			
_JATENG-C	-65.93897			
_YOGYA-C	-58.23162			
_JATIM-C	-67.57421			
_KALBAR-C	-59.45987			
_KALTENG-C	-57.77104			
_KALSEL-C	-58.85240			
_KALTIM-C	-64.65063			
_BALI-C	-57.94640			
_NTB-C	-59.11570			
_NTT-C	-57.13158			
_SULUT-C	-57.68689			
_SULTENG-C	-56.66969			
_SULSEL-C	-60.39271			
_SULTRA-C	-56.10734			
_MALUKU-C	-53.75561			
_PAPUA-C	-61.14621			
R-squared	0.840957	Mean dependent var	9.512366	
Adjusted R-squared	0.808902	S.D. dependent var	1.593385	
S.E. of regression	0.696545	Sum squared resid	62.58758	

F-statistic 26.23465 Durbin-Watson stat 1.489955  
 Prob(F-statistic) 0.000000

Lampiran 11 Elastisitas SPD terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(SPD?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 04:30

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	2.442256	0.221189	11.04147	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-32.30300			
_SUMUT-C	-33.25106			
_SUMBAR-C	-31.23928			
_RIAU-C	-34.04030			
_JAMBI-C	-29.66657			
_BENKL-C	-29.11784			
_SUMSEL-C	-33.61344			
_LAMPG-C	-31.34010			
_JABAR-C	-36.86896			
_DKIJKT-C	-34.94929			
_JATENG-C	-33.16688			
_YOGYA-C	-29.74302			
_JATIM-C	-34.90940			
_KALBAR-C	-30.89271			
_KALTENG-C	-30.70716			
_KALSEL-C	-30.72919			
_KALTIM-C	-34.29866			
_BALI-C	-30.46406			
_NTB-C	-30.61259			
_NTT-C	-31.24006			
_SULUT-C	-30.69766			
_SULTENG-C	-29.78656			
_SULSEL-C	-33.93674			
_SULTRA-C	-30.65141			
_MALUKU-C	-28.19988			
_PAPUA-C	-32.39110			
R-squared	0.844192	Mean dependent var	10.73927	
Adjusted R-squared	0.812788	S.D. dependent var	1.495207	
S.E. of regression	0.646946	Sum squared resid	53.99147	
F-statistic	26.88229	Durbin-Watson stat	1.598206	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 12 Elastisitas KPRE terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(KPRE?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 04:13

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	2.816474	0.125315	22.47515	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-27.17642			
_SUMUT-C	-28.30873			
_SUMBAR-C	-25.69301			
_RIAU-C	-29.31139			



_JAMBI-C	-25.30215		
_BENKL-C	-24.55732		
_SUMSEL-C	-27.76020		
_LAMPG-C	-26.01005		
_JABAR-C	-31.25729		
_DKIJKT-C	-30.87323		
_JATENG-C	-30.09757		
_YOGYA-C	-25.18369		
_JATIM-C	-31.62961		
_KALBAR-C	-25.64248		
_KALTENG-C	-26.90850		
_KALSEL-C	-25.93189		
_KALTIM-C	-29.86250		
_BALI-C	-26.28907		
_NTB-C	-26.97157		
_NTT-C	-24.61906		
_SULUT-C	-26.71340		
_SULTENG-C	-24.95949		
_SULSEL-C	-26.84802		
_SULTRA-C	-23.78252		
_MALUKU-C	-21.54625		
_PAPUA-C	-26.00100		
R-squared	0.945222	Mean dependent var	22.26204
Adjusted R-squared	0.934182	S.D. dependent var	1.428676
S.E. of regression	0.366527	Sum squared resid	17.33016
F-statistic	85.61443	Durbin-Watson stat	1.371165
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 13 Elastisitas KSOL terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(KSOL?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 04:15

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	2.327447	0.146590	15.87729	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-18.55367			
_SUMUT-C	-18.43002			
_SUMBAR-C	-16.63613			
_RIAU-C	-19.57796			
_JAMBI-C	-15.91906			
_BENKL-C	-14.27326			
_SUMSEL-C	-17.93548			
_LAMPG-C	-17.37884			
_JABAR-C	-21.58020			
_DKIJKT-C	-20.37695			
_JATENG-C	-20.50861			
_YOGYA-C	-17.63014			
_JATIM-C	-21.09486			
_KALBAR-C	-16.66933			
_KALTENG-C	-17.09630			
_KALSEL-C	-17.29890			
_KALTIM-C	-19.79206			
_BALI-C	-16.85400			
_NTB-C	-17.63691			
_NTT-C	-15.25250			
_SULUT-C	-17.45469			
_SULTENG-C	-15.46206			
_SULSEL-C	-17.62936			

_SULTRA-C	-15.32754		
_MALUKU-C	-14.52868		
_PAPUA-C	-16.70438		
R-squared	0.907115	Mean dependent var	23.02453
Adjusted R-squared	0.888394	S.D. dependent var	1.283401
S.E. of regression	0.428753	Sum squared resid	23.71393
F-statistic	48.45424	Durbin-Watson stat	1.890766
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 14 Elastisitas KBBM terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(KBBM?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/11/09 Time: 11:22

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	2.473181	0.124447	19.87343	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-20.42173			
_SUMUT-C	-20.75337			
_SUMBAR-C	-18.71853			
_RIAU-C	-21.86168			
_JAMBI-C	-18.09184			
_BENKL-C	-16.49864			
_SUMSEL-C	-20.24971			
_LAMPG-C	-19.28212			
_JABAR-C	-23.78602			
_DKNKT-C	-22.89520			
_JATENG-C	-22.71825			
_YOGYA-C	-18.98921			
_JATIM-C	-23.62228			
_KALBAR-C	-18.66040			
_KALTENG-C	-19.28316			
_KALSEL-C	-19.22590			
_KALTIM-C	-22.18252			
_BALI-C	-19.05095			
_NTB-C	-19.77767			
_NTT-C	-17.40040			
_SULUT-C	-19.55711			
_SULTENG-C	-17.62405			
_SULSEL-C	-19.75955			
_SULTRA-C	-17.22725			
_MALUKU-C	-15.75684			
_PAPUA-C	-18.83963			
R-squared	0.929066	Mean dependent var	23.46296	
Adjusted R-squared	0.914770	S.D. dependent var	1.246779	
S.E. of regression	0.363988	Sum squared resid	17.09081	
F-statistic	64.98476	Durbin-Watson stat	1.511934	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 15 Buoyancy PKB terhadap JKB

Dependent Variable: LOG(PKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 05:57

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JKB?)	1.201767	0.061236	19.62513	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	1.411694			
_SUMUT-C	2.256033			
_SUMBAR-C	2.487568			
_RIAU-C	2.458698			
_JAMBI-C	2.400557			
_BENKL-C	2.678916			
_SUMSEL-C	2.670455			
_LAMPG-C	2.650014			
_JABAR-C	2.834534			
_DKIJKT-C	2.263094			
_JATENG-C	1.687345			
_YOGYA-C	1.960929			
_JATIM-C	1.963201			
_KALBAR-C	2.277387			
_KALTENG-C	2.157261			
_KALSEL-C	2.255814			
_KALTIM-C	2.704385			
_BALI-C	2.174616			
_NTB-C	2.306443			
_NTT-C	2.713569			
_SULUT-C	2.986337			
_SULTENG-C	1.649891			
_SULSEL-C	2.632344			
_SULTRA-C	2.670228			
_MALUKU-C	1.247230			
_PAPUA-C	2.693712			
R-squared	0.975954	Mean dependent var	18.21967	
Adjusted R-squared	0.971108	S.D. dependent var	1.405951	
S.E. of regression	0.238980	Sum squared resid	7.367398	
F-statistic	201.3772	Durbin-Watson stat	0.936324	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 16 Buoyancy PKB terhadap JMBL

Dependent Variable: LOG(PKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 06:02

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JMBL?)	0.908191	0.063848	14.22433	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	6.864396			
_SUMUT-C	7.756274			
_SUMBAR-C	7.483922			
_RIAU-C	7.684879			
_JAMBI-C	7.723044			
_BENKL-C	7.411394			
_SUMSEL-C	7.585882			
_LAMPG-C	7.871107			
_JABAR-C	8.011606			
_DKIJKT-C	7.682642			
_JATENG-C	8.159714			
_YOGYA-C	7.692152			
_JATIM-C	8.062301			
_KALBAR-C	7.732431			
_KALTENG-C	7.250356			

_KALSEL-C	7.616725		
_KALTIM-C	7.910736		
_BALI-C	7.634196		
_NTB-C	7.609223		
_NTT-C	7.134409		
_SULUT-C	7.352499		
_SULTENG-C	6.713999		
_SULSEL-C	7.427219		
_SULTRA-C	7.070785		
_MALUKU-C	5.618354		
_PAPUA-C	7.509745		
R-squared	0.962667	Mean dependent var	18.21967
Adjusted R-squared	0.955167	S.D. dependent var	1.405961
S.E. of regression	0.297697	Sum squared resid	11.43241
F-statistic	128.0095	Durbin-Watson stat	0.733930
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 17 Buoyancy PKB terhadap JSPD

Dependent Variable: LOG(PKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 06:03

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JSPD?)	1.210049	0.064057	18.89031	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	1.552714			
_SUMUT-C	2.480390			
_SUMBAR-C	2.768176			
_RIAU-C	2.722617			
_JAMBI-C	2.543747			
_BENKL-C	2.923984			
_SUMSEL-C	3.043996			
_LAMPUNG-C	2.849135			
_JABAR-C	3.272938			
_DKIJKT-C	2.770335			
_JATENG-C	1.705556			
_YOGYA-C	2.046844			
_JATIM-C	2.071209			
_KALBAR-C	2.399549			
_KALTENG-C	2.342446			
_KALSEL-C	2.417356			
_KALTIM-C	2.930162			
_BALI-C	2.388653			
_NTB-C	2.427514			
_NTT-C	3.117668			
_SULUT-C	3.541726			
_SULTENG-C	1.889967			
_SULSEL-C	3.119748			
_SULTRA-C	3.069707			
_MALUKU-C	1.702130			
_PAPUA-C	2.926271			
R-squared	0.974554	Mean dependent var	18.21967	
Adjusted R-squared	0.969425	S.D. dependent var	1.405961	
S.E. of regression	0.245843	Sum squared resid	7.796573	
F-statistic	190.0189	Durbin-Watson stat	0.877141	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 18 Buoyancy BENKB terhadap KBB

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 06:15

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KBB?)	0.391903	0.031306	12.51864	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	13.14261			
_SUMUT-C	15.04050			
_SUMBAR-C	14.14166			
_RIAU-C	14.65694			
_JAMBI-C	13.92008			
_BENKL-C	13.23797			
_SUMSEL-C	14.67420			
_LAMPG-C	14.25139			
_JABAR-C	16.35656			
_DKIJKT-C	16.03554			
_JATENG-C	14.95638			
_YOGYA-C	13.98088			
_JATIM-C	15.62059			
_KALBAR-C	13.86368			
_KALTENG-C	13.22254			
_KALSEL-C	14.06073			
_KALTIM-C	14.52316			
_BALI-C	14.33403			
_NTB-C	13.46944			
_NTT-C	13.31593			
_SULUT-C	13.71826			
_SULTENG-C	13.29742			
_SULSEL-C	14.72178			
_SULTRA-C	13.28590			
_MALUKU-C	12.11526			
_PAPUA-C	13.55829			
R-squared	0.955827	Mean dependent var	18.48765	
Adjusted R-squared	0.946923	S.D. dependent var	1.398005	
S.E. of regression	0.322077	Sum squared resid	13.38166	
F-statistic	107.3580	Durbin-Watson stat	1.056776	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 19 Buoyancy BBNKB terhadap MBLB

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 06:07

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(MBLB?)	0.270699	0.024082	11.24050	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	14.97475			
_SUMUT-C	16.97277			
_SUMBAR-C	15.96424			
_RIAU-C	16.40821			
_JAMBI-C	15.82671			
_BENKL-C	14.92176			
_SUMSEL-C	16.18949			
_LAMPG-C	16.19571			

_JABAR-C	18.00301
_DKIJKT-C	18.00567
_JATENG-C	17.38797
_YOGYA-C	15.97712
_JATIM-C	17.79778
_KALBAR-C	15.74020
_KALTENG-C	14.84352
_KALSEL-C	15.86550
_KALTIM-C	16.30797
_BALI-C	16.10362
_NTB-C	15.37310
_NTT-C	14.68589
_SULUT-C	15.31351
_SULTENG-C	14.98442
_SULSEL-C	16.14111
_SULTRA-C	14.70873
_MALUKU-C	13.75022
_PAPUA-C	15.28623

R-squared	0.950573	Mean dependent var	18.48765
Adjusted R-squared	0.940611	S.D. dependent var	1.398005
S.E. of regression	0.340691	Sum squared resid	14.97308
F-statistic	95.42009	Durbin-Watson stat	0.957075
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 20 Buoyancy BBNKB terhadap SPD

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 06:10

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(SPD?)	0.350105	0.035180	9.951908	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	13.68331			
_SUMUT-C	15.62960			
_SUMBAR-C	14.68834			
_RIAU-C	15.29077			
_JAMBI-C	14.44014			
_BENKL-C	13.71283			
_SUMSEL-C	15.34111			
_LAMPG-C	14.76273			
_JABAR-C	17.04481			
_DKIJKT-C	16.72842			
_JATENG-C	15.54006			
_YOGYA-C	14.51162			
_JATIM-C	16.23867			
_KALBAR-C	14.41281			
_KALTENG-C	13.79367			
_KALSEL-C	14.62717			
_KALTIM-C	15.11631			
_BALI-C	15.03251			
_NTB-C	13.96612			
_NTT-C	13.91946			
_SULUT-C	14.25661			
_SULTENG-C	13.86447			
_SULSEL-C	15.73653			
_SULTRA-C	13.96534			
_MALUKU-C	12.56916			
_PAPUA-C	14.04749			

R-squared	0.944654	Mean dependent var	18.48765
Adjusted R-squared	0.933499	S.D. dependent var	1.398005
S.E. of regression	0.360514	Sum squared resid	16.76614
F-statistic	84.68474	Durbin-Watson stat	1.073618
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 21 Buoyancy PBBKB terhadap KPRE

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 06:29

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (unbalanced) observations: 151

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KPRE?)	1.130986	0.104874	10.78424	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-9.020073			
_SUMUT-C	-8.788095			
_SUMBAR-C	-8.343480			
_RIAU-C	-8.183069			
_JAMBI-C	-7.668283			
_BENKL-C	-6.611659			
_SUMSEL-C	-8.323760			
_LAMPG-C	-8.435496			
_JABAR-C	-7.673056			
_DKIJKT-C	-8.537753			
_JATENG-C	-7.870805			
_YOGYA-C	-7.916686			
_JATIM-C	-7.029242			
_KALBAR-C	-8.199602			
_KALTENG-C	-6.182761			
_KALSEL-C	-6.919146			
_KALTIM-C	-7.920085			
_BALI-C	-7.308948			
_NTB-C	-6.675685			
_NTT-C	-8.057244			
_SULUT-C	-6.151534			
_SULTENG-C	-7.428254			
_SULSEL-C	-8.213923			
_SULTRA-C	-8.566802			
_MALUKU-C	-8.032584			
_PAPUA-C	-8.973345			

R-squared	0.706319	Mean dependent var	17.37824
Adjusted R-squared	0.644741	S.D. dependent var	1.592569
S.E. of regression	0.949229	Sum squared resid	111.7284
F-statistic	11.47026	Durbin-Watson stat	1.564154
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 22 Buoyancy PBBKB terhadap KSOL

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 06:32

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (unbalanced) observations: 151

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KSOL?)	1.152828	0.124100	9.289488	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-9.469998			

_SUMUT-C	-10.25083
_SUMBAR-C	-9.523073
_RIAU-C	-9.418581
_JAMBI-C	-9.559997
_BENKL-C	-9.957129
_SUMSEL-C	-10.02031
_LAMPNG-C	-9.097506
_JABAR-C	-8.332897
_DKIJKT-C	-10.06934
_JATENG-C	-8.698437
_YOGYA-C	-7.612389
_JATIM-C	-8.675252
_KALBAR-C	-9.482879
_KALTENG-C	-8.540324
_KALSEL-C	-7.741379
_KALTIM-C	-9.501347
_BALI-C	-9.002613
_NTB-C	-8.394217
_NTT-C	-10.11728
_SULUT-C	-7.928695
_SULTENG-C	-9.565635
_SULSEL-C	-9.399678
_SULTRA-C	-9.699153
_MALUKU-C	-8.027513
_PAPUA-C	-10.45774

R-squared	0.664416	Mean dependent var	17.37824
Adjusted R-squared	0.594052	S.D. dependent var	1.592569
S.E. of regression	1.014691	Sum squared resid	127.6700
F-statistic	9.442507	Durbin-Watson stat	1.573548
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 23 Buoyancy PBBKB terhadap KBBM

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/11/09 Time: 11:31

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (unbalanced) observations: 151

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KBBM?)	1.244906	0.117823	10.56589	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-12.44623			
_SUMUT-C	-12.99498			
_SUMBAR-C	-12.25723			
_RIAU-C	-12.13619			
_JAMBI-C	-11.98636			
_BENKL-C	-12.15530			
_SUMSEL-C	-12.59753			
_LAMPNG-C	-11.99871			
_JABAR-C	-11.33204			
_DKIJKT-C	-12.85416			
_JATENG-C	-11.59919			
_YOGYA-C	-10.99022			
_JATIM-C	-11.33693			
_KALBAR-C	-12.14309			
_KALTENG-C	-10.83582			
_KALSEL-C	-10.51656			
_KALTIM-C	-12.09056			
_BALI-C	-11.49906			
_NTB-C	-10.76599			
_NTT-C	-12.50009			



Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.247465	0.090788	13.74042	0.0000
DUM2?	0.287114	0.045100	6.366186	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-4.772891			
_SUMUT-C	-3.734519			
_SUMBAR-C	-3.468068			
_RIAU-C	-4.476226			
_JAMBI-C	-3.045766			
_BENKL-C	-3.208067			
_SUMSEL-C	-3.940006			
_LAMPG-C	-3.458899			
_JABAR-C	-4.240386			
_DKIJKT-C	-3.667327			
_JATENG-C	-3.920728			
_YOGYA-C	-2.812137			
_JATIM-C	-4.136539			
_KALBAR-C	-3.600863			
_KALTENG-C	-4.048291			
_KALSEL-C	-3.296900			
_KALTIM-C	-4.755588			
_BALI-C	-2.499954			
_NTB-C	-3.781326			
_NTT-C	-3.786504			
_SULUT-C	-3.287910			
_SULTENG-C	-3.547563			
_SULSEL-C	-3.604335			
_SULTRA-C	-3.858978			
_MALUKU-C	-3.776934			
_PAPUA-C	-4.608843			
R-squared	0.987371	Mean dependent var	18.21967	
Adjusted R-squared	0.984707	S.D. dependent var	1.405961	
S.E. of regression	0.173868	Sum squared resid	3.869469	
F-statistic	370.6412	Durbin-Watson stat	1.525343	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 25 Elastisitas BBNKB terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 11:21

Sample: 2001 2006

R17

_SULUT-C	-10.25423		
_SULTENG-C	-11.96369		
_SULSEL-C	-12.10185		
_SULTRA-C	-12.30135		
_MALUKU-C	-11.16831		
_PAPUA-C	-13.09733		
R-squared	0.700509	Mean dependent var	17.37824
Adjusted R-squared	0.637712	S.D. dependent var	1.592569
S.E. of regression	0.958573	Sum squared resid	113.9389
F-statistic	11.15521	Durbin-Watson stat	1.560663
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 24 Elastisitas PKB terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(PKB?)

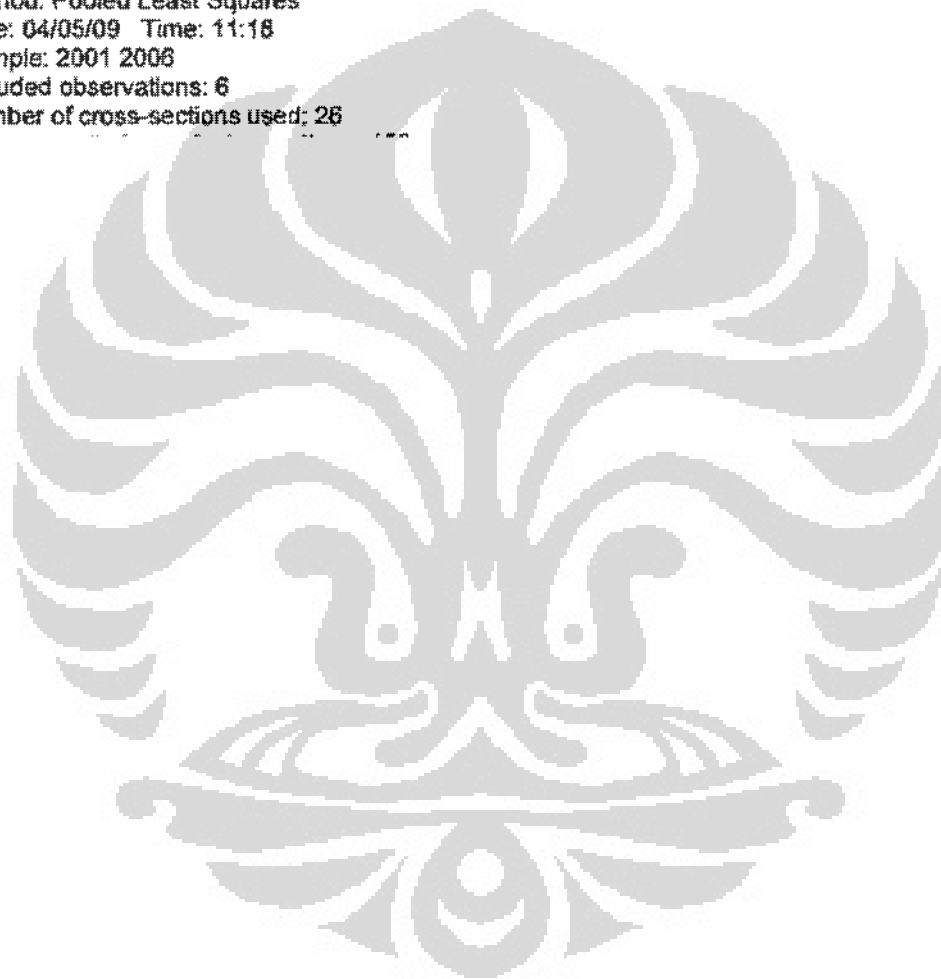
Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 11:18

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26



Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 26  
 Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	0.891354	0.129385	6.889170	0.0000
DUM2?	0.403026	0.064273	6.270502	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	1.462002			
_SUMUT-C	3.046701			
_SUMBAR-C	2.855663			
_RIAU-C	2.428822			
_JAMBI-C	3.179757			
_BENKL-C	2.673397			
_SUMSEL-C	2.581853			
_LAMPG-C	2.891322			
_JABAR-C	3.158683			
_DKIJKT-C	3.508520			
_JATENG-C	2.967690			
_YOGYA-C	3.217586			
_JATIM-C	3.037273			
_KALBAR-C	2.705530			
_KALTENG-C	2.169427			
_KALSEL-C	2.980001			
_KALTIM-C	2.161684			
_BALI-C	3.475833			
_NTB-C	2.368684			
_NTT-C	2.120663			
_SULUT-C	2.641554			
_SULTENG-C	2.569772			
_SULSEL-C	2.946253			
_SULTRA-C	2.380214			
_MALUKU-C	1.876366			
_PAPUA-C	1.812382			
R-squared	0.974057	Mean dependent var	18.48765	
Adjusted R-squared	0.968585	S.D. dependent var	1.398005	
S.E. of regression	0.247785	Sum squared resid	7.858890	
F-statistic	177.9994	Durbin-Watson stat	1.606479	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 26 Elastisitas PBBKB terhadap PDRB

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 10:52

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (unbalanced) observations: 151

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	2.056588	0.187382	10.97537	0.0000
DUM1?	2.350098	0.125958	18.65776	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-21.71841			
_SUMUT-C	-21.84478			
_SUMBAR-C	-20.19727			
_RIAU-C	-22.28888			
_JAMBI-C	-19.42524			
_BENKL-C	-18.42259			
_SUMSEL-C	-21.39850			
_LAMPG-C	-20.21217			
_JABAR-C	-22.92712			
_DKIJKT-C	-23.17534			

_JATENG-C	-22.36176
_YOGYA-C	-19.58729
_JATIM-C	-23.14948
_KALBAR-C	-19.79375
_KALTENG-C	-19.77052
_KALSEL-C	-19.29754
_KALTIM-C	-22.57994
_BALI-C	-19.65076
_NTB-C	-20.13893
_NTT-C	-19.42924
_SULUT-C	-19.63868
_SULTENG-C	-19.03671
_SULSEL-C	-20.63451
_SULTRA-C	-19.22853
_MALUKU-C	-17.22331
_PAPUA-C	-21.28854

R-squared	0.937469	Mean dependent var	17.37824
Adjusted R-squared	0.923742	S.D. dependent var	1.592569
S.E. of regression	0.439785	Sum squared resid	23.78955
F-statistic	68.29668	Durbin-Watson stat	1.419750
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 27 Elastisitas PKB terhadap PDRB – Dum 1

Dependent Variable: LOG(PKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/09/09 Time: 08:27

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.497660	0.067418	22.21454	0.0000
DUM1?	0.198060	0.060432	3.277395	0.0013
Fixed Effects				
_ACEH-C	-9.178616			
_SUMUT-C	-8.344662			
_SUMBAR-C	-7.761990			
_RIAU-C	-9.105226			
_JAMBI-C	-7.190306			
_BENKL-C	-7.153928			
_SUMSEL-C	-8.408643			
_LAMPG-C	-7.776523			
_JABAR-C	-9.102631			
_DKIJKT-C	-8.569936			
_JATENG-C	-8.661398			
_YOGYA-C	-7.004151			
_JATIM-C	-9.009255			
_KALBAR-C	-7.866801			
_KALTENG-C	-8.189716			
_KALSEL-C	-7.543149			
_KALTIM-C	-9.399892			
_BALI-C	-6.762259			
_NTB-C	-7.966160			
_NTT-C	-7.845131			
_SULUT-C	-7.402728			
_SULTENG-C	-7.639118			
_SULSEL-C	-7.989299			
_SULTRA-C	-7.865330			
_MALUKU-C	-7.548745			
_PAPUA-C	-8.897097			

R-squared	0.985173	Mean dependent var	18.21967
Adjusted R-squared	0.982046	S.D. dependent var	1.405961
S.E. of regression	0.188389	Sum squared resid	4.542760
F-statistic	315.0050	Durbin-Watson stat	1.437095
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 28 Elastisitas PKB terhadap PDRB – Dum 3

Dependent Variable: LOG(PKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/09/09 Time: 08:28

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.231110	0.124468	9.890975	0.0000
DUM3?	0.250830	0.056494	4.439970	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-4.417166			
_SUMUT-C	-3.365430			
_SUMBAR-C	-3.119651			
_RIAU-C	-4.105904			
_JAMBI-C	-2.707114			
_BENKL-C	-2.882403			
_SUMSEL-C	-3.580168			
_LAMPG-C	-3.108933			
_JABAR-C	-3.854816			
_DKIJKT-C	-3.279119			
_JATENG-C	-3.543107			
_YOGYA-C	-2.470382			
_JATIM-C	-3.750286			
_KALBAR-C	-3.254275			
_KALTENG-C	-3.709843			
_KALSEL-C	-2.951599			
_KALTIM-C	-4.384266			
_BALI-C	-2.153603			
_NTB-C	-3.440040			
_NTT-C	-3.453468			
_SULUT-C	-2.951201			
_SULTENG-C	-3.212375			
_SULSEL-C	-3.249966			
_SULTRA-C	-3.529360			
_MALUKU-C	-3.462649			
_PAPUA-C	-4.260796			

R-squared	0.985646	Mean dependent var	18.21967
Adjusted R-squared	0.982618	S.D. dependent var	1.405961
S.E. of regression	0.185363	Sum squared resid	4.398025
F-statistic	325.5276	Durbin-Watson stat	1.358224
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 29 Elastisitas BBNKB terhadap PDRB – Dum 1

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/09/09 Time: 08:29

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

LOG(PDRB?)	1.209677	0.106419	11.36715	0.0000
DUM1?	0.312906	0.066791	4.684831	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-4.169010			
_SUMUT-C	-2.844392			
_SUMBAR-C	-2.633101			
_RIAU-C	-3.486263			
_JAMBI-C	-2.118949			
_BENKL-C	-2.372531			
_SUMSEL-C	-3.129203			
_LAMPUNG-C	-2.627599			
_JABAR-C	-3.053161			
_DKIJKT-C	-2.754677			
_JATENG-C	-3.089472			
_YOGYA-C	-2.141521			
_JATIM-C	-3.187892			
_KALBAR-C	-2.747631			
_KALTENG-C	-3.125316			
_KALSEL-C	-2.448111			
_KALTIM-C	-3.772873			
_BALI-C	-1.972706			
_NTB-C	-2.981289			
_NTT-C	-3.068737			
_SULUT-C	-2.619338			
_SULTENG-C	-2.661523			
_SULSEL-C	-2.658345			
_SULTRA-C	-2.742676			
_MALUKU-C	-2.948117			
_PAPUA-C	-3.669173			
R-squared	0.970636	Mean dependent var	18.48765	
Adjusted R-squared	0.964442	S.D. dependent var	1.398005	
S.E. of regression	0.263621	Sum squared resid	8.895505	
F-statistic	156.7043	Durbin-Watson stat	1.371588	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 30 Elastisitas BBNKB terhadap PDRB – Dum 3

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/09/09 Time: 08:29

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	0.741433	0.159838	4.638662	0.0000
DUM3?	0.422362	0.061807	6.833569	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	4.175280			
_SUMUT-C	5.882469			
_SUMBAR-C	5.501946			
_RIAU-C	5.275889			
_JAMBI-C	5.736528			
_BENKL-C	5.111117			
_SUMSEL-C	5.332828			
_LAMPUNG-C	5.551807			
_JABAR-C	6.145514			
_DKIJKT-C	6.519537			
_JATENG-C	5.881672			
_YOGYA-C	5.802804			
_JATIM-C	6.030378			
_KALBAR-C	5.335045			

_KALTENG-C	4.724332		
_KALSEL-C	5.597718		
_KALTIM-C	5.017922		
_BALI-C	6.103172		
_NTB-C	4.949600		
_NTT-C	4.625954		
_SULUT-C	5.180515		
_SULTENG-C	5.094794		
_SULSEL-C	5.647090		
_SULTRA-C	4.854181		
_MALUKU-C	4.209791		
_PAPUA-C	4.455270		
R-squared	0.972609	Mean dependent var	18.48765
Adjusted R-squared	0.966831	S.D. dependent var	1.398005
S.E. of regression	0.254611	Sum squared resid	8.297608
F-statistic	168.3333	Durbin-Watson stat	1.228752
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 31 Elastisitas PBBKB terhadap PDRB – Dum 2

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/09/09 Time: 08:30

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (unbalanced) observations: 151

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	2.704083	0.270260	10.00548	0.0000
DUM2?	0.860191	0.191636	4.488667	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-31.80353			
_SUMUT-C	-32.45892			
_SUMBAR-C	-29.75768			
_RIAU-C	-32.95162			
_JAMBI-C	-28.83442			
_BENKL-C	-27.31760			
_SUMSEL-C	-31.64643			
_LAMPNG-C	-30.06929			
_JABAR-C	-34.19369			
_DKIJKT-C	-34.54638			
_JATENG-C	-33.31370			
_YOGYA-C	-28.88398			
_JATIM-C	-34.22485			
_KALBAR-C	-29.51711			
_KALTENG-C	-29.17164			
_KALSEL-C	-28.73313			
_KALTIM-C	-33.28249			
_BALI-C	-29.36472			
_NTB-C	-29.65240			
_NTT-C	-28.61608			
_SULUT-C	-28.97095			
_SULTENG-C	-28.30877			
_SULSEL-C	-30.66590			
_SULTRA-C	-28.28009			
_MALUKU-C	-25.66788			
_PAPUA-C	-30.81547			
R-squared	0.788773	Mean dependent var	17.37824	
Adjusted R-squared	0.742406	S.D. dependent var	1.592569	
S.E. of regression	0.808289	Sum squared resid	80.35966	
F-statistic	17.01151	Durbin-Watson stat	2.224846	

Prob(F-statistic) 0.000000

Lampiran 32 Elastisitas PBBKB terhadap PDRB -- Dum 3

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/09/09 Time: 08:31

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (unbalanced) observations: 151

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	4.307993	0.562036	7.664975	0.0000
DUM3?	-0.177533	0.206954	-0.857842	0.3926
Fixed Effects				
_ACEH-C	-59.55381			
_SUMUT-C	-61.51966			
_SUMBAR-C	-56.76191			
_RIAU-C	-62.13325			
_JAMBI-C	-54.91034			
_BENKL-C	-52.11987			
_SUMSEL-C	-59.80003			
_LAMPG-C	-57.25479			
_JABAR-C	-64.87057			
_DKJKT-C	-65.48200			
_JATENG-C	-63.21119			
_YOGYA-C	-55.23496			
_JATIM-C	-64.98177			
_KALBAR-C	-56.37127			
_KALTENG-C	-55.22760			
_KALSEL-C	-55.42818			
_KALTIM-C	-62.56222			
_BALI-C	-56.19559			
_NTB-C	-55.98663			
_NTT-C	-54.14124			
_SULUT-C	-54.85634			
_SULTENG-C	-54.04503			
_SULSEL-C	-58.28310			
_SULTRA-C	-53.47014			
_MALUKU-C	-49.35436			
_PAPUA-C	-57.73674			
R-squared	0.761395	Mean dependent var	17.37824	
Adjusted R-squared	0.709018	S.D. dependent var	1.592569	
S.E. of regression	0.859075	Sum squared resid	90.77521	
F-statistic	14.53690	Durbin-Watson stat	1.697689	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 32 Elastisitas PKB terhadap JKB

Dependent Variable: LOG(PKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/14/09 Time: 10:24

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JKB?)	0.791328	0.072661	10.89065	0.0000
DUM2?	0.378341	0.048162	7.855646	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	6.659832			
_SUMUT-C	7.918534			



_SUMBAR-C	7.623513		
_RIAU-C	7.830779		
_JAMBI-C	7.456072		
_BENKL-C	7.245613		
_SUMSEL-C	7.880275		
_LAMPG-C	7.773973		
_JABAR-C	8.555987		
_DKIJKT-C	8.444159		
_JATENG-C	7.702742		
_YOGYA-C	7.327223		
_JATIM-C	8.035536		
_KALBAR-C	7.392110		
_KALTENG-C	6.948173		
_KALSEL-C	7.448191		
_KALTIM-C	7.923207		
_BALI-C	7.694247		
_NTB-C	7.211501		
_NTT-C	7.262901		
_SULUT-C	7.708481		
_SULTENG-C	6.700177		
_SULSEL-C	7.827339		
_SULTRA-C	7.120593		
_MALUKU-C	5.812219		
_PAPUA-C	7.359996		
R-squared	0.983776	Mean dependent var	18.21967
Adjusted R-squared	0.980354	S.D. dependent var	1.405961
S.E. of regression	0.197066	Sum squared resid	4.970856
F-statistic	287.4682	Durbin-Watson stat	1.456200
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 33 Elastisitas BBNKB terhadap KKB

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/14/09 Time: 10:34

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KBB?)	0.185642	0.036565	5.077085	0.0000
DUM2?	0.507190	0.063892	7.938265	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	15.10865			
_SUMUT-C	17.22500			
_SUMBAR-C	16.10575			
_RIAU-C	16.75347			
_JAMBI-C	15.89127			
_BENKL-C	14.92913			
_SUMSEL-C	16.54150			
_LAMPG-C	16.22094			
_JABAR-C	18.38005			
_DKIJKT-C	18.48778			
_JATENG-C	17.38831			
_YOGYA-C	16.02899			
_JATIM-C	17.98715			
_KALBAR-C	15.84259			
_KALTENG-C	15.02326			
_KALSEL-C	16.04347			
_KALTIM-C	16.57820			
_BALI-C	16.46399			
_NTB-C	15.32648			
_NTT-C	14.88659			

_SULUT-C	15.45668		
_SULTENG-C	15.17593		
_SULSEL-C	16.59894		
_SULTRA-C	14.91095		
_MALUKU-C	13.65147		
_PAPUA-C	15.26970		
R-squared	0.970399	Mean dependent var	18.48765
Adjusted R-squared	0.964155	S.D. dependent var	1.398005
S.E. of regression	0.264679	Sum squared resid	8.967062
F-statistic	155.4160	Durbin-Watson stat	1.704831
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 34 Elastisitas PBBKB terhadap KPRE

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/13/09 Time: 04:24

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (unbalanced) observations: 151

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KPRE?)	0.582529	0.057001	10.21971	0.0000
DUM1?	2.517442	0.123328	20.41250	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	1.340862			
_SUMUT-C	2.213906			
_SUMBAR-C	1.815829			
_RIAU-C	2.385436			
_JAMBI-C	2.108034			
_BENKL-C	2.346524			
_SUMSEL-C	2.105420			
_LAMPUNG-C	2.021200			
_JABAR-C	3.288278			
_DKIJKT-C	2.863422			
_JATENG-C	2.955966			
_YOGYA-C	1.925260			
_JATIM-C	3.394545			
_KALBAR-C	2.139578			
_KALTENG-C	2.693317			
_KALSEL-C	2.793511			
_KALTIM-C	2.440653			
_BALI-C	2.653185			
_NTB-C	2.433810			
_NTT-C	1.563296			
_SULUT-C	2.667277			
_SULTENG-C	2.208872			
_SULSEL-C	2.198946			
_SULTRA-C	1.189797			
_MALUKU-C	1.502438			
_PAPUA-C	0.910632			
R-squared	0.933065	Mean dependent var	17.37824	
Adjusted R-squared	0.918372	S.D. dependent var	1.592569	
S.E. of regression	0.455007	Sum squared resid	25.46480	
F-statistic	63.50395	Durbin-Watson stat	1.463079	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 27 Elastisitas PKB terhadap JKB – Dum 1

Dependent Variable: LOG(PKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/09/09 Time: 11:29

Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 26  
 Total panel (balanced) observations: 156  
 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JKB?)	1.004285	0.058356	17.20991	0.0000
DUM1?	0.320929	0.061245	5.240107	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	3.790753			
_SUMUT-C	4.834463			
_SUMBAR-C	4.812646			
_RIAU-C	4.897393			
_JAMBI-C	4.686935			
_BENKL-C	4.730100			
_SUMSEL-C	5.031078			
_LAMPG-C	4.969325			
_JABAR-C	5.441329			
_DKIJKT-C	5.091031			
_JATENG-C	4.435571			
_YOGYA-C	4.396839			
_JATIM-C	4.738823			
_KALBAR-C	4.592254			
_KALTENG-C	4.316326			
_KALSEL-C	4.608044			
_KALTIM-C	5.069339			
_BALI-C	4.684304			
_NTB-C	4.520429			
_NTT-C	4.756398			
_SULUT-C	5.112314			
_SULTENG-C	3.933754			
_SULSEL-C	4.985833			
_SULTRA-C	4.665439			
_MALUKU-C	3.297592			
_PAPUA-C	4.792812			
R-squared	0.981299	Mean dependent var	18.21967	
Adjusted R-squared	0.977354	S.D. dependent var	1.405961	
S.E. of regression	0.211575	Sum squared resid	5.729808	
F-statistic	248.7631	Durbin-Watson stat	1.140458	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 28 Elastisitas PKB terhadap JKB – Dum 3

Dependent Variable: LOG(PKB?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 07/09/09 Time: 11:30  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 26  
 Total panel (balanced) observations: 156  
 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JKB?)	0.708985	0.074325	9.539019	0.0000
DUM3?	0.370563	0.049249	7.524312	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	7.830273			
_SUMUT-C	9.172105			
_SUMBAR-C	8.771445			
_RIAU-C	9.026085			
_JAMBI-C	8.587867			
_BENKL-C	8.279341			
_SUMSEL-C	9.043027			

_LAMPG-C	8.919500		
_JABAR-C	9.821385		
_DKIJKT-C	9.801765		
_JATENG-C	9.027112		
_YOGYA-C	8.521368		
_JATIM-C	9.371328		
_KALBAR-C	8.535784		
_KALTENG-C	8.026884		
_KALSEL-C	8.607444		
_KALTIM-C	9.087766		
_BALI-C	8.919154		
_NTB-C	8.313112		
_NTT-C	8.293145		
_SULUT-C	8.773395		
_SULTENG-C	7.830924		
_SULSEL-C	8.987117		
_SULTRA-C	8.130982		
_MALUKU-C	6.845605		
_PAPUA-C	8.413703		
R-squared	0.981362	Mean dependent var	18.21967
Adjusted R-squared	0.977431	S.D. dependent var	1.405961
S.E. of regression	0.211218	Sum squared resid	5.710475
F-statistic	249.6214	Durbin-Watson stat	1.299976
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 29 Elastisitas BBNKB terhadap KBB-- Dum 1

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/09/09 Time: 11:28

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KBB?)	0.295401	0.029196	10.11771	0.0000
DUM1?	0.460814	0.070117	6.572025	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	13.83663			
_SUMUT-C	15.83673			
_SUMBAR-C	14.83477			
_RIAU-C	15.41201			
_JAMBI-C	14.61651			
_BENKL-C	13.80338			
_SUMSEL-C	15.32202			
_LAMPG-C	14.94705			
_JABAR-C	17.07746			
_DKIJKT-C	16.95703			
_JATENG-C	15.86837			
_YOGYA-C	14.71330			
_JATIM-C	16.50200			
_KALBAR-C	14.56372			
_KALTENG-C	13.83922			
_KALSEL-C	14.76256			
_KALTIM-C	15.25882			
_BALI-C	15.10474			
_NTB-C	14.11247			
_NTT-C	13.82497			
_SULUT-C	14.30579			
_SULTENG-C	13.95049			
_SULSEL-C	15.37422			
_SULTRA-C	13.82038			

_MALUKU-C	12.60818		
_PAPUA-C	14.13318		
R-squared	0.967760	Mean dependent var	18.48765
Adjusted R-squared	0.960960	S.D. dependent var	1.398005
S.E. of regression	0.276225	Sum squared resid	9.766466
F-statistic	142.3068	Durbin-Watson stat	1.149215
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 30 Elastisitas BBNKB terhadap KBB – Dum 3

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/09/09 Time: 11:29

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KBB?)	0.142207	0.040947	3.472988	0.0007
DUM3?	0.536627	0.064602	8.306678	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	15.66368			
_SUMUT-C	17.82603			
_SUMBAR-C	16.66037			
_RIAU-C	17.33598			
_JAMBI-C	16.44738			
_BENKL-C	15.42627			
_SUMSEL-C	17.07574			
_LAMPG-C	16.77670			
_JABAR-C	18.94717			
_DKIJKT-C	19.14519			
_JATENG-C	18.04144			
_YOGYA-C	16.60130			
_JATIM-C	18.62652			
_KALBAR-C	16.40032			
_KALTENG-C	15.54348			
_KALSEL-C	16.60201			
_KALTIM-C	17.15197			
_BALI-C	17.05354			
_NTB-C	15.85856			
_NTT-C	15.35835			
_SULUT-C	15.96377			
_SULTENG-C	15.71252			
_SULSEL-C	17.13525			
_SULTRA-C	15.39417			
_MALUKU-C	14.11598			
_PAPUA-C	15.77111			
R-squared	0.971115	Mean dependent var	18.48765	
Adjusted R-squared	0.965022	S.D. dependent var	1.398005	
S.E. of regression	0.261459	Sum squared resid	8.750210	
F-statistic	159.3850	Durbin-Watson stat	1.252256	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 31 Elastisitas PBBKB terhadap KPRES – Dum 2

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/12/09 Time: 16:31

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (unbalanced) observations: 151

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KPRE?)	0.674415	0.062463	10.79695	0.0000
DUM2?	1.191488	0.178586	6.671789	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	0.557113			
_SUMUT-C	1.322756			
_SUMBAR-C	1.256274			
_RIAU-C	1.566911			
_JAMBI-C	1.422229			
_BENKL-C	1.797785			
_SUMSEL-C	1.310237			
_LAMPG-C	1.221407			
_JABAR-C	2.387291			
_DKIJKT-C	1.905395			
_JATENG-C	2.094172			
_YOGYA-C	1.418875			
_JATIM-C	2.790681			
_KALBAR-C	1.359473			
_KALTENG-C	2.158334			
_KALSEL-C	2.308766			
_KALTIM-C	1.656936			
_BALI-C	1.936249			
_NTB-C	1.859721			
_NTT-C	0.903589			
_SULUT-C	2.141888			
_SULTENG-C	1.546366			
_SULSEL-C	1.406496			
_SULTRA-C	0.507295			
_MALUKU-C	0.857058			
_PAPUA-C	0.397205			
R-squared	0.780841	Mean dependent var	17.37824	
Adjusted R-squared	0.732732	S.D. dependent var	1.592569	
S.E. of regression	0.823325	Sum squared resid	83.37730	
F-statistic	16.23094	Durbin-Watson stat	2.352220	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 32 Elastisitas PBBKB terhadap KPRE -- Dum 3

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/09/09 Time: 11:32

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (unbalanced) observations: 151

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KPRE?)	0.879198	0.118865	7.396825	0.0000
DUM3?	0.478614	0.147377	3.247554	0.0015
Fixed Effects				
_ACEH-C	-3.539737			
_SUMUT-C	-3.013455			
_SUMBAR-C	-2.810949			
_RIAU-C	-2.607441			
_JAMBI-C	-2.456336			
_BENKL-C	-1.775305			
_SUMSEL-C	-2.812093			
_LAMPG-C	-2.911198			
_JABAR-C	-1.926268			
_DKIJKT-C	-2.579859			
_JATENG-C	-2.176611			

_YOGYA-C	-2.529851		
_JATIM-C	-1.375293		
_KALBAR-C	-2.729253		
_KALTENG-C	-1.384100		
_KALSEL-C	-1.591666		
_KALTIM-C	-2.439839		
_BALI-C	-2.011695		
_NTB-C	-1.769866		
_NTT-C	-2.916812		
_SULUT-C	-1.379163		
_SULTENG-C	-2.280208		
_SULSEL-C	-2.709745		
_SULTRA-C	-3.363907		
_MALUKU-C	-2.931412		
_PAPUA-C	-3.567215		
R-squared	0.715247	Mean dependent var	17.37824
Adjusted R-squared	0.652740	S.D. dependent var	1.592569
S.E. of regression	0.938481	Sum squared resid	108.3319
F-statistic	11.44270	Durbin-Watson stat	1.657728
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 33 Buoyancy PKB terhadap PDRB per Provinsi

Dependent Variable: LOG(PKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 10:09

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
_ACEH-LOG(PDRB_ACEH)	1.433130	0.316659	4.525784	0.0000
_SUMUT-LOG(PDRB_SUMUT)	1.350744	0.290831	4.644426	0.0000
_SUMBAR-LOG(PDRB_SUMBAR)	1.699576	0.320149	5.308697	0.0000
_RIAU-LOG(PDRB_RIAU)	1.347112	0.390394	3.450649	0.0008
_JAMBI-LOG(PDRB_JAMBI)	1.584284	0.254829	6.217052	0.0000
_BENKL-LOG(PDRB_BENKL)	1.712359	0.278510	6.148294	0.0000
_SUMSEL-LOG(PDRB_SUMSEL)	1.387748	0.273216	5.079315	0.0000
_LAMPG-LOG(PDRB_LAMPG)	1.843443	0.329787	5.589804	0.0000
_JABAR-LOG(PDRB_JABAR)	1.615328	0.265400	6.086400	0.0000
_DKIJKT-LOG(PDRB_DKIJKT)	1.494761	0.326064	4.584254	0.0000
_JATENG-LOG(PDRB_JATENG)	1.519973	0.278979	5.448341	0.0000
_YOGYA-LOG(PDRB_YOGYA)	1.938936	0.320824	6.043619	0.0000
_JATIM-LOG(PDRB_JATIM)	1.294954	0.258202	5.015279	0.0000
_KALBAR-LOG(PDRB_KALBAR)	1.984858	0.360134	5.511442	0.0000
_KALTENG-LOG(PDRB_KALTENG)	1.422436	0.302259	4.706023	0.0000
_KALSEL-LOG(PDRB_KALSEL)	2.140595	0.334222	6.404700	0.0000
_KALTIM-LOG(PDRB_KALTIM)	1.959489	0.232141	8.440946	0.0000
_BALI-LOG(PDRB_BALI)	1.418354	0.340622	4.164011	0.0001
_NTB-LOG(PDRB_NTB)	1.521190	0.305916	4.972574	0.0000
_NTT-LOG(PDRB_NTT)	1.689564	0.337147	5.011360	0.0000
_SULUT-LOG(PDRB_SULUT)	1.517209	0.344609	4.402704	0.0000
_SULTENG-LOG(PDRB_SULTENG)	1.858739	0.333525	5.573008	0.0000
_SULSEL-LOG(PDRB_SULSEL)	2.083009	0.378364	5.505303	0.0000
_SULTRA-LOG(PDRB_SULTRA)	1.406755	0.258237	5.447531	0.0000
_MALUKU-LOG(PDRB_MALUKU)	4.544827	0.407202	11.16112	0.0000
_PAPUA-LOG(PDRB_PAPUA)	1.667915	0.257878	6.467843	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-7.870446			
_SUMUT-C	-5.457023			
_SUMBAR-C	-11.08356			
_RIAU-C	-6.138937			
_JAMBI-C	-8.469325			

_BENKL-C	-10.39754
_SUMSEL-C	-6.268911
_LAMPG-C	-13.61509
_JABAR-C	-11.23672
_DKIJKT-C	-8.347776
_JATENG-C	-8.921483
_YOGYA-C	-14.27917
_JATIM-C	-4.875008
_KALBAR-C	-16.06004
_KALTENG-C	-6.771567
_KALSEL-C	-18.35758
_KALTIM-C	-17.85631
_BALI-C	-5.237795
_NTB-C	-8.197157
_NTT-C	-10.81333
_SULUT-C	-7.561253
_SULTENG-C	-13.41700
_SULSEL-C	-18.14486
_SULTRA-C	-6.235044
_MALUKU-C	-53.64228
_PAPUA-C	-11.66809

R-squared	0.989807	Mean dependent var	18.21967
Adjusted R-squared	0.984809	S.D. dependent var	1.405961
S.E. of regression	0.173287	Sum squared resid	3.122951
F-statistic	198.0283	Durbin-Watson stat	1.746954
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 34 Buoyancy BBNKB terhadap PDRB per provinsi

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 10:10

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
_ACEH-LOG(PDRB_ACEH)	3.430972	0.441072	7.778719	0.0000
_SUMUT-LOG(PDRB_SUMUT)	1.663172	0.405096	4.105621	0.0001
_SUMBAR-LOG(PDRB_SUMBAR)	1.796398	0.445933	4.028401	0.0001
_RIAU-LOG(PDRB_RIAU)	0.307061	0.543776	0.564682	0.5735
_JAMBI-LOG(PDRB_JAMBI)	1.414623	0.354949	3.985429	0.0001
_BENKL-LOG(PDRB_BENKL)	2.295594	0.387934	5.917493	0.0000
_SUMSEL-LOG(PDRB_SUMSEL)	1.515607	0.380560	3.982575	0.0001
_LAMPG-LOG(PDRB_LAMPG)	2.060028	0.459357	4.484591	0.0000
_JABAR-LOG(PDRB_JABAR)	0.969855	0.369673	2.623550	0.0100
_DKIJKT-LOG(PDRB_DKIJKT)	0.725548	0.454172	1.597517	0.1132
_JATENG-LOG(PDRB_JATENG)	0.953537	0.388588	2.453853	0.0158
_YOGYA-LOG(PDRB_YOGYA)	1.006318	0.446873	2.251913	0.0264
_JATIM-LOG(PDRB_JATIM)	1.042898	0.359647	2.899781	0.0046
_KALBAR-LOG(PDRB_KALBAR)	1.649182	0.501628	3.287661	0.0014
_KALTENG-LOG(PDRB_KALTENG)	2.082913	0.421013	4.947379	0.0000
_KALSEL-LOG(PDRB_KALSEL)	1.594784	0.465536	3.425696	0.0009
_KALTIM-LOG(PDRB_KALTIM)	1.353031	0.323347	4.184456	0.0001
_BALI-LOG(PDRB_BALI)	1.066860	0.474450	2.248627	0.0266
_NTB-LOG(PDRB_NTB)	1.425810	0.426108	3.346125	0.0011
_NTT-LOG(PDRB_NTT)	1.789358	0.469609	3.810315	0.0002
_SULUT-LOG(PDRB_SULUT)	1.010426	0.480002	2.105044	0.0377
_SULTENG-LOG(PDRB_SULTENG)	1.292883	0.464564	2.783000	0.0064
_SULSEL-LOG(PDRB_SULSEL)	1.352576	0.527020	2.566460	0.0117
_SULTRA-LOG(PDRB_SULTRA)	1.101299	0.359696	3.061747	0.0028
_MALUKU-LOG(PDRB_MALUKU)	4.374762	0.567188	7.713077	0.0000
_PAPUA-LOG(PDRB_PAPUA)	1.248478	0.359196	3.475755	0.0007



Fixed Effects			
_ACEH-C	-43.25746		
_SUMUT-C	-10.98761		
_SUMBAR-C	-12.50366		
_RIAU-C	13.56941		
_JAMBI-C	-5.274778		
_BENKL-C	-19.35236		
_SUMSEL-C	-8.364786		
_LAMPG-C	-17.13099		
_JABAR-C	1.893522		
_DKIJKT-C	7.043672		
_JATENG-C	2.051590		
_YOGYA-C	1.547934		
_JATIM-C	0.338569		
_KALBAR-C	-10.02695		
_KALTENG-C	-17.41106		
_KALSEL-C	-8.763873		
_KALTIM-C	-6.188276		
_BALI-C	0.736113		
_NTB-C	-6.358410		
_NTT-C	-12.27256		
_SULUT-C	0.939381		
_SULTENG-C	-3.770241		
_SULSEL-C	-4.917122		
_SULTRA-C	-0.735062		
_MALUKU-C	-50.73604		
_PAPUA-C	-4.077541		
R-squared	0.979999	Mean dependent var	18.48765
Adjusted R-squared	0.970191	S.D. dependent var	1.398005
S.E. of regression	0.241370	Sum squared resid	6.058982
F-statistic	99.91674	Durbin-Watson stat	1.815062
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 35 Buoyancy PBBKB terhadap PDRB per Provinsi

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 10:11

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (unbalanced) observations: 151

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
_ACEH-LOG(PDRB_ACEH)	6.452821	1.579688	4.084870	0.0001
_SUMUT-LOG(PDRB_SUMUT)	4.690720	1.450844	3.233098	0.0017
_SUMBAR-LOG(PDRB_SUMBAR)	1.880506	2.103089	0.894164	0.3734
_RIAU-LOG(PDRB_RIAU)	3.728278	1.947523	1.914369	0.0585
_JAMBI-LOG(PDRB_JAMBI)	4.648003	1.271242	3.656270	0.0004
_BENKL-LOG(PDRB_BENKL)	2.616557	1.389376	1.883261	0.0626
_SUMSEL-LOG(PDRB_SUMSEL)	4.206792	1.362966	3.086498	0.0026
_LAMPG-LOG(PDRB_LAMPG)	5.619769	1.645177	3.415905	0.0009
_JABAR-LOG(PDRB_JABAR)	3.716755	1.323975	2.807270	0.0060
_DKIJKT-LOG(PDRB_DKIJKT)	3.110314	1.626608	1.912148	0.0587
_JATENG-LOG(PDRB_JATENG)	4.298073	1.391718	3.088322	0.0026
_YOGYA-LOG(PDRB_YOGYA)	2.525482	2.111319	1.196164	0.2345
_JATIM-LOG(PDRB_JATIM)	1.675790	1.914026	0.875532	0.3834
_KALBAR-LOG(PDRB_KALBAR)	2.362601	1.796569	1.315063	0.1915
_KALTENG-LOG(PDRB_KALTENG)	4.491310	1.507850	2.978617	0.0036
_KALSEL-LOG(PDRB_KALSEL)	3.214236	2.208138	1.455632	0.1487
_KALTIM-LOG(PDRB_KALTIM)	3.214748	1.158060	2.775976	0.0066
_BALI-LOG(PDRB_BALI)	4.753998	1.699231	2.797735	0.0062
_NTB-LOG(PDRB_NTB)	4.828762	1.526096	3.164127	0.0021
_NTT-LOG(PDRB_NTT)	5.854775	1.681894	3.481061	0.0007

_SULUT--LOG(PDRB_SULUT)	5.276403	1.719118	3.069250	0.0028
_SULTENG--LOG(PDRB_SULTENG)	1.761997	1.663828	1.059002	0.2922
_SULSEL--LOG(PDRB_SULSEL)	6.654851	1.887511	3.525728	0.0006
_SULTRA--LOG(PDRB_SULTRA)	4.281142	1.288245	3.323237	0.0012
_MALUKU--LOG(PDRB_MALUKU)	7.219665	2.031370	3.554086	0.0006
_PAPUA--LOG(PDRB_PAPUA)	1.140007	1.342994	0.848855	0.3980
Fixed Effects				
_ACEH--C	-97.63721			
_SUMUT--C	-68.70096			
_SUMBAR--C	-14.79531			
_RIAU--C	-51.43528			
_JAMBI--C	-60.66728			
_BENKL--C	-25.35453			
_SUMSEL--C	-58.07062			
_LAMPG--C	-80.11914			
_JABAR--C	-53.40703			
_DKIJKT--C	-41.97587			
_JATENG--C	-63.11095			
_YOGYA--C	-25.17307			
_JATIM--C	-13.30844			
_KALBAR--C	-23.08523			
_KALTENG--C	-58.37008			
_KALSEL--C	-36.78859			
_KALTIM--C	-42.24217			
_BALI--C	-63.92947			
_NTB--C	-64.84080			
_NTT--C	-79.48467			
_SULUT--C	-70.97404			
_SULTENG--C	-12.22966			
_SULSEL--C	-99.75062			
_SULTRA--C	-53.12612			
_MALUKU--C	-93.64478			
_PAPUA--C	-3.099684			
R-squared	0.805536	Mean dependent var	17.37824	
Adjusted R-squared	0.705358	S.D. dependent var	1.592569	
S.E. of regression	0.864461	Sum squared resid	73.98203	
F-statistic	8.041031	Durbin-Watson stat	1.898627	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 36 Buoyancy PABTAPU terhadap PDRB per Provinsi  
 Dependent Variable: LOG(PABTAPU?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 04/10/09 Time: 04:19  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 26  
 Total panel (unbalanced) observations: 119

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
_ACEH--LOG(PDRB_ACEH)	0.367117	1.609495	0.228095	0.8203
_SUMUT--LOG(PDRB_SUMUT)	7.320638	1.352584	5.412335	0.0000
_SUMBAR--LOG(PDRB_SUMBAR)	2.284467	1.523341	1.499642	0.1384
_RIAU--LOG(PDRB_RIAU)	1.826218	1.538458	1.187044	0.2394
_JAMBI--LOG(PDRB_JAMBI)	2.970702	1.226330	2.422432	0.0181
_BENKL--LOG(PDRB_BENKL)	1.045916	1.755901	0.595658	0.5534
_SUMSEL--LOG(PDRB_SUMSEL)	0.355320	1.151747	0.308506	0.7587
_LAMPG--LOG(PDRB_LAMPG)	1.107043	1.529347	0.723866	0.4717
_JABAR--LOG(PDRB_JABAR)	2.210880	1.157493	1.910059	0.0604
_DKIJKT--LOG(PDRB_DKIJKT)	0.381131	1.178209	0.323483	0.7473
_JATENG--LOG(PDRB_JATENG)	0.444929	1.660826	0.267896	0.7896
_YOGYA--LOG(PDRB_YOGYA)	1.416780	1.529302	0.926423	0.3576
_JATIM--LOG(PDRB_JATIM)	0.237385	1.386396	0.171224	0.8646
_KALBAR--LOG(PDRB_KALBAR)	6.305491	2.258789	2.791536	0.0068

R33

_KALTENG--LOG(PDRB_KALTENG)	-0.759785	1.906458	-0.398532	0.6915
_KALSEL--LOG(PDRB_KALSEL)	1.228752	2.636898	0.465984	0.6427
_KALTIM--LOG(PDRB_KALTIM)	3.258080	0.960540	3.391925	0.0012
_BALI--LOG(PDRB_BALI)	1.019741	9.169002	0.111216	0.9118
_NTB--LOG(PDRB_NTB)	1.827233	1.105405	1.652999	0.1030
_NTT--LOG(PDRB_NTT)	1.066060	1.581681	0.674004	0.5026
_SULUT--LOG(PDRB_SULUT)	2.023866	1.520486	1.331065	0.1877
_SULTENG--LOG(PDRB_SULTENG)	0.324666	3.204987	0.101300	0.9196
_SULSEL--LOG(PDRB_SULSEL)	2.553762	2.465580	1.035765	0.3040
_SULTRA--LOG(PDRB_SULTRA)	0.905411	0.933121	0.970304	0.3354
_MALUKU--LOG(PDRB_MALUKU)	28.78643	8.383999	3.433497	0.0010
_PAPUA--LOG(PDRB_PAPUA)	0.844277	0.931823	0.906048	0.3682
Fixed Effects				
_ACEH--C	9.042603			
_SUMUT--C	-120.5179			
_SUMBAR--C	-24.00156			
_RIAU--C	-17.11141			
_JAMBI--C	-36.89392			
_BENKL--C	-3.585316			
_SUMSEL--C	8.808678			
_LAMPG--C	-4.166099			
_JABAR--C	-25.58108			
_DKIJKT--C	10.24710			
_JATENG--C	7.936135			
_YOGYA--C	-9.589000			
_JATIM--C	12.53679			
_KALBAR--C	-96.15895			
_KALTENG--C	24.67568			
_KALSEL--C	-4.978678			
_KALTIM--C	-46.04331			
_BALI--C	-1.793525			
_NTB--C	-17.39421			
_NTT--C	-4.719527			
_SULUT--C	-19.79002			
_SULTENG--C	6.702138			
_SULSEL--C	-27.70634			
_SULTRA--C	-1.232457			
_MALUKU--C	-432.8245			
_PAPUA--C	0.721167			
R-squared	0.943377	Mean dependent var	14.88877	
Adjusted R-squared	0.900275	S.D. dependent var	1.982823	
S.E. of regression	0.626160	Sum squared resid	26.26909	
F-statistic	21.88742	Durbin-Watson stat	2.217078	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 37 Buoyancy PPROV terhadap PDRB per provinsi

Dependent Variable: LOG(PPROV?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/04/09 Time: 10:09

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
_ACEH--LOG(PDRB_ACEH)	2.811888	0.402577	6.984728	0.0000
_SUMUT--LOG(PDRB_SUMUT)	1.773969	0.369741	4.797868	0.0000
_SUMBAR--LOG(PDRB_SUMBAR)	2.043652	0.407014	5.021085	0.0000
_RIAU--LOG(PDRB_RIAU)	1.276051	0.496318	2.571037	0.0116
_JAMBI--LOG(PDRB_JAMBI)	1.764673	0.323970	5.447020	0.0000
_BENKL--LOG(PDRB_BENKL)	2.153022	0.354076	6.080673	0.0000
_SUMSEL--LOG(PDRB_SUMSEL)	1.749076	0.347346	5.035544	0.0000
_LAMPG--LOG(PDRB_LAMPG)	2.377965	0.419266	5.671733	0.0000

R34

_JABAR--LOG(PDRB_JABAR)	1.486142	0.337409	4.404568	0.0000
_DKIJKT--LOG(PDRB_DKIJKT)	1.214105	0.414534	2.928845	0.0042
_JATENG--LOG(PDRB_JATENG)	1.525622	0.354673	4.301488	0.0000
_YOGYA--LOG(PDRB_YOGYA)	1.792137	0.407871	4.393880	0.0000
_JATIM--LOG(PDRB_JATIM)	1.344219	0.328259	4.095002	0.0001
_KALBAR--LOG(PDRB_KALBAR)	1.898156	0.457848	4.145824	0.0001
_KALTENG--LOG(PDRB_KALTENG)	2.113377	0.384269	5.499733	0.0000
_KALSEL--LOG(PDRB_KALSEL)	2.602354	0.424905	6.124548	0.0000
_KALTIM--LOG(PDRB_KALTIM)	1.709243	0.295127	5.791558	0.0000
_BALI--LOG(PDRB_BALI)	1.545914	0.433041	3.569899	0.0005
_NTB--LOG(PDRB_NTB)	1.888267	0.388919	4.655170	0.0000
_NTT--LOG(PDRB_NTT)	2.382608	0.428623	5.558748	0.0000
_SULUT--LOG(PDRB_SULUT)	1.673420	0.438110	3.819639	0.0002
_SULTENG--LOG(PDRB_SULTENG)	1.586715	0.424019	3.742085	0.0003
_SULSEL--LOG(PDRB_SULSEL)	2.507818	0.481024	5.213502	0.0000
_SULTRA--LOG(PDRB_SULTRA)	1.659155	0.328303	5.053723	0.0000
_MALUKU--LOG(PDRB_MALUKU)	5.346242	0.517686	10.32720	0.0000
_PAPUA--LOG(PDRB_PAPUA)	1.440166	0.327847	4.392800	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH--C	-31.26843			
_SUMUT--C	-12.31438			
_SUMBAR--C	-15.99482			
_RIAU--C	-3.705513			
_JAMBI--C	-10.40558			
_BENKL--C	-16.30911			
_SUMSEL--C	-11.77485			
_LAMPG--C	-21.85123			
_JABAR--C	-7.543958			
_DKIJKT--C	-1.901917			
_JATENG--C	-8.064686			
_YOGYA--C	-10.90245			
_JATIM--C	-4.853215			
_KALBAR--C	-13.50191			
_KALTENG--C	-17.10260			
_KALSEL--C	-25.07704			
_KALTIM--C	-12.08485			
_BALI--C	-6.610083			
_NTB--C	-13.33764			
_NTT--C	-21.05988			
_SULUT--C	-9.199640			
_SULTENG--C	-7.816780			
_SULSEL--C	-24.48523			
_SULTRA--C	-9.020800			
_MALUKU--C	-64.31343			
_PAPUA--C	-6.621083			
R-squared	0.982392	Mean dependent var	19.29006	
Adjusted R-squared	0.973758	S.D. dependent var	1.359946	
S.E. of regression	0.220304	Sum squared resid	5.047526	
F-statistic	113.7744	Durbin-Watson stat	1.506708	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 38 Elastisitas JKB terhadap PDRB per Provinsi

Dependent Variable: LOG(JKB?)  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 04/05/09 Time: 04:21  
Sample: 2001 2006  
Included observations: 6  
Number of cross-sections used: 26  
Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
_ACEH--LOG(PDRB_ACEH)	0.827462	0.158397	5.223964	0.0000

_SUMUT-LOG(PDRB_SUMUT)	1.058950	0.145478	7.279112	0.0000
_SUMBAR-LOG(PDRB_SUMBAR)	1.432441	0.160143	8.944750	0.0000
_RIAU-LOG(PDRB_RIAU)	1.398235	0.195281	7.160133	0.0000
_JAMBI-LOG(PDRB_JAMBI)	1.575248	0.127469	12.35789	0.0000
_BENKL-LOG(PDRB_BENKL)	1.655578	0.139314	11.88376	0.0000
_SUMSEL-LOG(PDRB_SUMSEL)	1.051774	0.136666	7.695928	0.0000
_LAMPG-LOG(PDRB_LAMPG)	1.606054	0.164964	9.735792	0.0000
_JABAR-LOG(PDRB_JABAR)	0.377151	0.132757	2.840920	0.0054
_DKIJKT-LOG(PDRB_DKIJKT)	1.265471	0.163102	7.758779	0.0000
_JATENG-LOG(PDRB_JATENG)	1.180877	0.139549	8.462082	0.0000
_YOGYA-LOG(PDRB_YOGYA)	1.171559	0.160481	7.300319	0.0000
_JATIM-LOG(PDRB_JATIM)	0.670111	0.129156	5.188380	0.0000
_KALBAR-LOG(PDRB_KALBAR)	1.863242	0.180144	10.34306	0.0000
_KALTENG-LOG(PDRB_KALTENG)	1.851470	0.151194	12.24566	0.0000
_KALSEL-LOG(PDRB_KALSEL)	1.329398	0.167183	7.951765	0.0000
_KALTIM-LOG(PDRB_KALTIM)	1.225226	0.116120	10.55136	0.0000
_BALI-LOG(PDRB_BALI)	1.107861	0.170384	6.502142	0.0000
_NTB-LOG(PDRB_NTB)	1.386218	0.153023	9.058855	0.0000
_NTT-LOG(PDRB_NTT)	1.842450	0.168846	10.92499	0.0000
_SULUT-LOG(PDRB_SULUT)	1.709280	0.172378	9.915877	0.0000
_SULTENG-LOG(PDRB_SULTENG)	1.664666	0.166834	9.977975	0.0000
_SULSEL-LOG(PDRB_SULSEL)	1.197939	0.189263	6.329496	0.0000
_SULTRA-LOG(PDRB_SULTRA)	1.058397	0.129174	8.193584	0.0000
_MALUKU-LOG(PDRB_MALUKU)	1.126349	0.203688	5.529777	0.0000
_PAPUA-LOG(PDRB_PAPUA)	0.736566	0.128994	5.710068	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-1.256925			
_SUMUT-C	-5.213263			
_SUMBAR-C	-11.60710			
_RIAU-C	-12.31371			
_JAMBI-C	-13.32847			
_BENKL-C	-14.54392			
_SUMSEL-C	-5.588338			
_LAMPG-C	-14.78635			
_JABAR-C	7.185142			
_DKIJKT-C	-9.258264			
_JATENG-C	-7.229037			
_YOGYA-C	-6.063850			
_JATIM-C	2.287779			
_KALBAR-C	-18.88933			
_KALTENG-C	-18.55490			
_KALSEL-C	-9.436990			
_KALTIM-C	-9.542898			
_BALI-C	-4.927534			
_NTB-C	-10.76705			
_NTT-C	-18.38351			
_SULUT-C	-16.17205			
_SULTENG-C	-14.47933			
_SULSEL-C	-7.849843			
_SULTRA-C	-5.602079			
_MALUKU-C	-5.362196			
_PAPUA-C	-0.718557			
R-squared	0.996386	Mean dependent var	13.23433	
Adjusted R-squared	0.994614	S.D. dependent var	1.181104	
S.E. of regression	0.086681	Sum squared resid	0.781406	
F-statistic	562.2402	Durbin-Watson stat	1.555183	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 39 Elastisitas KBB terhadap PDRB per Provinsi

Dependent Variable: LOG(KBB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/03/2010 Time: 08:20

Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 26  
 Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
_ACEH-LOG(PDRB_ACEH)	-0.196512	0.721067	-0.275303	0.7836
_SUMUT-LOG(PDRB_SUMUT)	1.998051	0.662254	3.017047	0.0032
_SUMBAR-LOG(PDRB_SUMBAR)	2.914935	0.729015	3.998458	0.0001
_RIAU-LOG(PDRB_RIAU)	1.907787	0.888969	2.146067	0.0342
_JAMBI-LOG(PDRB_JAMBI)	3.115961	0.580273	5.369824	0.0000
_BENKL-LOG(PDRB_BENKL)	4.053660	0.634196	6.391807	0.0000
_SUMSEL-LOG(PDRB_SUMSEL)	4.705455	0.622141	7.563323	0.0000
_LAMPG-LOG(PDRB_LAMPG)	3.028887	0.750960	4.033355	0.0001
_JABAR-LOG(PDRB_JABAR)	1.860792	0.604343	3.079031	0.0027
_DKIJKT-LOG(PDRB_DKIJKT)	2.601959	0.742483	3.504400	0.0007
_JATENG-LOG(PDRB_JATENG)	1.283202	0.635265	2.019946	0.0460
_YOGYA-LOG(PDRB_YOGYA)	2.619284	0.730550	3.585358	0.0005
_JATIM-LOG(PDRB_JATIM)	0.688336	0.587953	1.170733	0.2444
_KALBAR-LOG(PDRB_KALBAR)	3.778739	0.820064	4.607857	0.0000
_KALTENG-LOG(PDRB_KALTENG)	4.592378	0.688275	6.672298	0.0000
_KALSEL-LOG(PDRB_KALSEL)	2.801606	0.761061	3.681187	0.0004
_KALTIM-LOG(PDRB_KALTIM)	2.080636	0.528610	3.936053	0.0001
_BALI-LOG(PDRB_BALI)	1.646193	0.775633	2.122386	0.0362
_NTB-LOG(PDRB_NTB)	3.084402	0.696604	4.427771	0.0000
_NTT-LOG(PDRB_NTT)	6.839760	0.767719	8.909192	0.0000
_SULUT-LOG(PDRB_SULUT)	4.747151	0.784711	6.049556	0.0000
_SULTENG-LOG(PDRB_SULTENG)	5.434465	0.759473	7.155575	0.0000
_SULSEL-LOG(PDRB_SULSEL)	5.002655	0.861576	5.806404	0.0000
_SULTRA-LOG(PDRB_SULTRA)	1.914536	0.588034	3.255826	0.0015
_MALUKU-LOG(PDRB_MALUKU)	4.814137	0.927242	5.191889	0.0000
_PAPUA-LOG(PDRB_PAPUA)	1.370573	0.587216	2.334019	0.0215
Fixed Effects				
_ACEH-C	14.68770			
_SUMUT-C	-24.79675			
_SUMBAR-C	-39.17245			
_RIAU-C	-23.69428			
_JAMBI-C	-40.74890			
_BENKL-C	-54.51958			
_SUMSEL-C	-73.84572			
_LAMPG-C	-41.40062			
_JABAR-C	-24.90873			
_DKIJKT-C	-37.73157			
_JATENG-C	-11.01931			
_YOGYA-C	-32.59302			
_JATIM-C	-0.365364			
_KALBAR-C	-53.59386			
_KALTENG-C	-66.13094			
_KALSEL-C	-36.59129			
_KALTIM-C	-27.23891			
_BALI-C	-16.25202			
_NTB-C	-41.27293			
_NTT-C	-102.4201			
_SULUT-C	-68.50642			
_SULTENG-C	-78.69822			
_SULSEL-C	-77.46440			
_SULTRA-C	-21.34113			
_MALUKU-C	-63.99549			
_PAPUA-C	-13.69893			
R-squared	0.947428	Mean dependent var	11.10726	
Adjusted R-squared	0.921648	S.D. dependent var	1.409690	
S.E. of regression	0.394593	Sum squared resid	16.19318	
F-statistic	36.74992	Durbin-Watson stat	2.842341	

Prob(F-statistic)

0.000000

Lampiran 40 Elastisitas Basis Pajak PBBKB terhadap PDRB per Provinsi

Dependent Variable: LOG(KPRE?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 04:14

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
__ACEH-LOG(PDRB_ACEH)	3.424590	0.530490	6.455516	0.0000
__SUMUT-LOG(PDRB_SUMUT)	3.209830	0.487222	6.588025	0.0000
__SUMBAR-LOG(PDRB_SUMBAR)	2.941736	0.536338	5.484856	0.0000
__RIAU-LOG(PDRB_RIAU)	3.734962	0.654017	5.710806	0.0000
__JAMBI-LOG(PDRB_JAMBI)	3.584327	0.426908	8.396018	0.0000
__BENKL-LOG(PDRB_BENKL)	2.110994	0.466580	4.524401	0.0000
__SUMSEL-LOG(PDRB_SUMSEL)	2.298541	0.457711	5.021819	0.0000
__LAMPG-LOG(PDRB_LAMPG)	3.365114	0.552483	6.090893	0.0000
__JABAR-LOG(PDRB_JABAR)	4.325954	0.444617	9.729621	0.0000
__DKIJKT-LOG(PDRB_DKIJKT)	3.023344	0.546247	5.534758	0.0000
__JATENG-LOG(PDRB_JATENG)	1.695828	0.467366	3.628477	0.0004
__YOGYA-LOG(PDRB_YOGYA)	3.907582	0.537468	7.270359	0.0000
__JATIM-LOG(PDRB_JATIM)	1.631265	0.432559	3.771198	0.0003
__KALBAR-LOG(PDRB_KALBAR)	3.241888	0.603323	5.373384	0.0000
__KALTENG-LOG(PDRB_KALTENG)	3.804394	0.506366	7.513132	0.0000
__KALSEL-LOG(PDRB_KALSEL)	2.698188	0.559914	4.815360	0.0000
__KALTIM-LOG(PDRB_KALTIM)	2.050648	0.388900	5.272951	0.0000
__BALI-LOG(PDRB_BALI)	2.748082	0.570635	4.815830	0.0000
__NTB-LOG(PDRB_NTB)	2.848931	0.512493	5.558966	0.0000
__NTT-LOG(PDRB_NTT)	3.277767	0.564813	5.803277	0.0000
__SULUT-LOG(PDRB_SULUT)	3.497283	0.577314	6.057856	0.0000
__SULTENG-LOG(PDRB_SULTENG)	3.436879	0.558746	6.151056	0.0000
__SULSEL-LOG(PDRB_SULSEL)	3.116754	0.633863	4.917076	0.0000
__SULTRA-LOG(PDRB_SULTRA)	3.204430	0.432618	7.407067	0.0000
__MALUKU-LOG(PDRB_MALUKU)	3.231404	0.682174	4.736920	0.0000
__PAPUA-LOG(PDRB_PAPUA)	-0.172647	0.432016	-0.399631	0.6902
Fixed Effects				
__ACEH-C	-37.94891			
__SUMUT-C	-35.59823			
__SUMBAR-C	-27.85600			
__RIAU-C	-46.40165			
__JAMBI-C	-38.10274			
__BENKL-C	-13.35676			
__SUMSEL-C	-18.45503			
__LAMPG-C	-35.53577			
__JABAR-C	-60.75132			
__DKIJKT-C	-34.94868			
__JATENG-C	-8.745608			
__YOGYA-C	-43.58016			
__JATIM-C	-8.421979			
__KALBAR-C	-32.94081			
__KALTENG-C	-43.36543			
__KALSEL-C	-23.87775			
__KALTIM-C	-15.56598			
__BALI-C	-25.11674			
__NTB-C	-27.51789			
__NTT-C	-32.15070			
__SULUT-C	-37.98203			
__SULTENG-C	-35.17063			
__SULSEL-C	-32.14243			
__SULTRA-C	-30.03571			

R38

_MALUKU-C	-27.84525		
_PAPUA-C	25.54645		
R-squared	0.972296	Mean dependent var	22.26204
Adjusted R-squared	0.958711	S.D. dependent var	1.428676
S.E. of regression	0.290303	Sum squared resid	8.764693
F-statistic	71.56889	Durbin-Watson stat	2.172913
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 41 Buoyancy PKB terhadap Basis Pajak PKB per Provinsi

Dependent Variable: LOG(PKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 06:00

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
_ACEH-LOG(JKB_ACEH)	1.678529	0.400896	4.185901	0.0001
_SUMUT-LOG(JKB_SUMUT)	1.286144	0.299589	4.293027	0.0000
_SUMBAR-LOG(JKB_SUMBAR)	1.159413	0.240566	4.819524	0.0000
_RIAU-LOG(JKB_RIAU)	1.119909	0.262689	4.263251	0.0000
_JAMBI-LOG(JKB_JAMBI)	0.921682	0.172993	5.327864	0.0000
_BENKL-LOG(JKB_BENKL)	1.011108	0.182176	5.550161	0.0000
_SUMSEL-LOG(JKB_SUMSEL)	1.184866	0.276689	4.282299	0.0000
_LAMPG-LOG(JKB_LAMPG)	1.143947	0.223469	5.119044	0.0000
_JABAR-LOG(JKB_JABAR)	4.331713	0.769287	5.630818	0.0000
_DKIJKT-LOG(JKB_DKIJKT)	1.160585	0.280503	4.137519	0.0001
_JATENG-LOG(JKB_JATENG)	1.287183	0.258391	4.981526	0.0000
_YOGYA-LOG(JKB_YOGYA)	1.608700	0.297411	5.409009	0.0000
_JATIM-LOG(JKB_JATIM)	1.954672	0.415967	4.699101	0.0000
_KALBAR-LOG(JKB_KALBAR)	1.011307	0.209035	4.837983	0.0000
_KALTENG-LOG(JKB_KALTENG)	0.731133	0.177602	4.116693	0.0001
_KALSEL-LOG(JKB_KALSEL)	1.464148	0.268089	5.461418	0.0000
_KALTIM-LOG(JKB_KALTIM)	1.567289	0.205896	7.612068	0.0000
_BALI-LOG(JKB_BALI)	1.288140	0.334129	3.855218	0.0002
_NTB-LOG(JKB_NTB)	1.071135	0.237593	4.508268	0.0000
_NTT-LOG(JKB_NTT)	0.746236	0.187404	3.981968	0.0001
_SULUT-LOG(JKB_SULUT)	0.817988	0.217658	3.758140	0.0003
_SULTENG-LOG(JKB_SULTENG)	1.071227	0.218082	4.912034	0.0000
_SULSEL-LOG(JKB_SULSEL)	1.554204	0.333615	4.658682	0.0000
_SULTRA-LOG(JKB_SULTRA)	1.312596	0.266979	4.916475	0.0000
_MALUKU-LOG(JKB_MALUKU)	3.508646	0.384325	9.129372	0.0000
_PAPUA-LOG(JKB_PAPUA)	2.372812	0.318794	7.443082	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-4.977478			
_SUMUT-C	1.040096			
_SUMBAR-C	3.043588			
_RIAU-C	3.580411			
_JAMBI-C	6.022582			
_BENKL-C	4.917431			
_SUMSEL-C	2.895380			
_LAMPG-C	3.407382			
_JABAR-C	-42.71984			
_DKIJKT-C	2.908589			
_JATENG-C	0.383001			
_YOGYA-C	-3.609596			
_JATIM-C	-9.638498			
_KALBAR-C	4.767868			
_KALTENG-C	7.940031			
_KALSEL-C	-1.224754			
_KALTIM-C	-2.167934			
_BALI-C	0.959992			



_NTB-C	3.947877		
_NTT-C	8.042638		
_SULUT-C	7.637607		
_SULTENG-C	3.336359		
_SULSEL-C	-2.045091		
_SULTRA-C	1.400409		
_MALUKU-C	-25.82800		
_PAPUA-C	-11.33955		
R-squared	0.987727	Mean dependent var	18.21967
Adjusted R-squared	0.981708	S.D. dependent var	1.405961
S.E. of regression	0.190151	Sum squared resid	3.760374
F-statistic	164.1147	Durbin-Watson stat	1.603470
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 42 Buoyancy BBNKB terhadap Basis Pajak BBNKB per Provinsi

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 06:07

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
_ACEH-LOG(KBB_ACEH)	0.259178	0.332879	0.778595	0.4380
_SUMUT-LOG(KBB_SUMUT)	0.623817	0.209166	2.982401	0.0036
_SUMBAR-LOG(KBB_SUMBAR)	0.576252	0.181695	3.171539	0.0020
_RIAU-LOG(KBB_RIAU)	0.424058	0.289487	1.415947	0.1598
_JAMBI-LOG(KBB_JAMBI)	0.403042	0.138539	2.909227	0.0044
_BENKL-LOG(KBB_BENKL)	0.553168	0.119051	4.646491	0.0000
_SUMSEL-LOG(KBB_SUMSEL)	0.298272	0.099971	2.983571	0.0036
_LAMPG-LOG(KBB_LAMPG)	0.632530	0.176044	3.593013	0.0005
_JABAR-LOG(KBB_JABAR)	0.384782	0.201385	1.910682	0.0588
_DKIJKT-LOG(KBB_DKIJKT)	0.240691	0.186321	1.291809	0.1993
_JATENG-LOG(KBB_JATENG)	0.719627	0.357840	2.011027	0.0469
_YOGYA-LOG(KBB_YOGYA)	0.380569	0.211955	1.795518	0.0755
_JATIM-LOG(KBB_JATIM)	0.622343	0.429795	1.447999	0.1506
_KALBAR-LOG(KBB_KALBAR)	0.393763	0.164437	2.394513	0.0184
_KALTENG-LOG(KBB_KALTENG)	0.438071	0.111092	3.943310	0.0001
_KALSEL-LOG(KBB_KALSEL)	0.565849	0.207801	2.723035	0.0076
_KALTIM-LOG(KBB_KALTIM)	0.609593	0.197312	3.089480	0.0026
_BALI-LOG(KBB_BALI)	0.643005	0.306136	2.100388	0.0381
_NTB-LOG(KBB_NTB)	0.433800	0.176267	2.461042	0.0155
_NTT-LOG(KBB_NTT)	0.216055	0.080655	2.678754	0.0086
_SULUT-LOG(KBB_SULUT)	0.220702	0.128540	1.716993	0.0890
_SULTENG-LOG(KBB_SULTENG)	0.236395	0.100400	2.354543	0.0204
_SULSEL-LOG(KBB_SULSEL)	0.197538	0.118782	1.663033	0.0993
_SULTRA-LOG(KBB_SULTRA)	0.522366	0.238999	2.204085	0.0297
_MALUKU-LOG(KBB_MALUKU)	0.724202	0.128661	5.628785	0.0000
_PAPUA-LOG(KBB_PAPUA)	1.063446	0.302917	3.510682	0.0007
<b>Fixed Effects</b>				
_ACEH-C	14.62530			
_SUMUT-C	12.20412			
_SUMBAR-C	12.08401			
_RIAU-C	14.27738			
_JAMBI-C	13.79536			
_BENKL-C	11.65138			
_SUMSEL-C	15.67534			
_LAMPG-C	11.55922			
_JABAR-C	16.43809			
_DKIJKT-C	18.08118			
_JATENG-C	10.55509			
_YOGYA-C	14.11200			

_JATIM-C	12.59883		
_KALBAR-C	13.84278		
_KALTENG-C	12.74379		
_KALSEL-C	12.10347		
_KALTIM-C	11.99738		
_BALI-C	11.32937		
_NTB-C	13.02354		
_NTT-C	14.94326		
_SULUT-C	15.44183		
_SULTENG-C	14.96863		
_SULSEL-C	16.80930		
_SULTRA-C	12.04417		
_MALUKU-C	9.095590		
_PAPUA-C	6.885420		
R-squared	0.966977	Mean dependent var	18.48765
Adjusted R-squared	0.950783	S.D. dependent var	1.398005
S.E. of regression	0.310145	Sum squared resid	10.00372
F-statistic	59.71273	Durbin-Watson stat	1.457270
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 43 Buoyancy PBBKB terhadap Basis Pajak PBBKB per Provinsi

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 06:31

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (unbalanced) observations: 151

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
_ACEH-LOG(KPRE_ACEH)	1.448796	0.490627	2.951745	0.0039
_SUMUT-LOG(KPRE_SUMUT)	1.390539	0.517735	2.685814	0.0085
_SUMBAR-LOG(KPRE_SUMBAR)	0.575080	0.749059	0.767706	0.4445
_RIAU-LOG(KPRE_RIAU)	1.331325	0.539101	2.469526	0.0152
_JAMBI-LOG(KPRE_JAMBI)	1.168191	0.403457	2.895455	0.0047
_BENKL-LOG(KPRE_BENKL)	1.066678	0.703913	1.515356	0.1329
_SUMSEL-LOG(KPRE_SUMSEL)	1.854684	0.662999	2.797414	0.0062
_LAMPG-LOG(KPRE_LAMPG)	1.470958	0.550801	2.670580	0.0089
_JABAR-LOG(KPRE_JABAR)	0.729275	0.341384	2.136233	0.0351
_DKIJKT-LOG(KPRE_DKIJKT)	0.963608	0.607978	1.584939	0.1162
_JATENG-LOG(KPRE_JATENG)	2.074904	0.872207	2.378911	0.0193
_YOGYA-LOG(KPRE_YOGYA)	0.582375	0.578290	1.007065	0.3164
_JATIM-LOG(KPRE_JATIM)	0.414794	0.708847	0.585167	0.5598
_KALBAR-LOG(KPRE_KALBAR)	0.711805	0.627816	1.133780	0.2596
_KALTENG-LOG(KPRE_KALTENG)	1.041325	0.440983	2.361373	0.0202
_KALSEL-LOG(KPRE_KALSEL)	0.836100	0.700087	1.194281	0.2352
_KALTIM-LOG(KPRE_KALTIM)	1.682129	0.621363	2.707158	0.0080
_BALI-LOG(KPRE_BALI)	1.305350	0.670049	1.948141	0.0542
_NTB-LOG(KPRE_NTB)	1.279757	0.552849	2.314841	0.0227
_NTT-LOG(KPRE_NTT)	1.269928	0.537587	2.362275	0.0201
_SULUT-LOG(KPRE_SULUT)	1.151701	0.521116	2.210069	0.0294
_SULTENG-LOG(KPRE_SULTENG)	0.484887	0.543886	0.891524	0.3748
_SULSEL-LOG(KPRE_SULSEL)	1.597729	0.631191	2.531293	0.0129
_SULTRA-LOG(KPRE_SULTRA)	1.157519	0.450596	2.568861	0.0117
_MALUKU-LOG(KPRE_MALUKU)	1.751188	0.695557	2.517676	0.0134
_PAPUA-LOG(KPRE_PAPUA)	-3.970187	4.424283	-0.897363	0.3717
Fixed Effects				
_ACEH-C	-16.23949			
_SUMUT-C	-14.98751			
_SUMBAR-C	4.505439			
_RIAU-C	-12.80981			
_JAMBI-C	-8.473796			
_BENKL-C	-5.315323			

_SUMSEL-C	-24.85341		
_LAMPG-C	-16.21771		
_JABAR-C	1.877343		
_DKIJKT-C	-4.418131		
_JATENG-C	-30.11467		
_YOGYA-C	4.446167		
_JATIM-C	9.859801		
_KALBAR-C	1.305921		
_KALTENG-C	-4.388756		
_KALSEL-C	-0.343461		
_KALTIM-C	-20.43971		
_BALI-C	-11.14304		
_NTB-C	-9.715722		
_NTT-C	-11.02591		
_SULUT-C	-6.563868		
_SULTENG-C	6.395921		
_SULSEL-C	-18.86070		
_SULTRA-C	-9.140296		
_MALUKU-C	-21.18721		
_PAPUA-C	106.3717		
R-squared	0.740978	Mean dependent var	17.37824
Adjusted R-squared	0.607542	S.D. dependent var	1.592569
S.E. of regression	0.997688	Sum squared resid	98.54270
F-statistic	5.553077	Durbin-Watson stat	1.738329
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 44 Buoyancy PKB terhadap PDRB Sumatera

Dependent Variable: LOG(PKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 09:39

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.547218	0.085492	18.09785	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-9.891462			
_SUMUT-C	-9.097998			
_SUMBAR-C	-8.452689			
_RIAU-C	-9.862297			
_JAMBI-C	-7.851416			
_BENKL-C	-7.775686			
_SUMSEL-C	-9.133950			
_LAMPG-C	-8.471918			
R-squared	0.980049	Mean dependent var	18.25841	
Adjusted R-squared	0.975957	S.D. dependent var	0.901316	
S.E. of regression	0.139758	Sum squared resid	0.761754	
F-statistic	239.4746	Durbin-Watson stat	1.341682	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 45 Buoyancy BBNKB terhadap PDRB Sumatera

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 09:40

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.843288	0.182077	10.12366	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-15.13238			
_SUMUT-C	-14.32544			
_SUMBAR-C	-13.31333			
_RIAU-C	-15.01507			
_JAMBI-C	-12.42087			
_BENKL-C	-12.17131			
_SUMSEL-C	-14.25190			
_LAMPG-C	-13.36785			
R-squared	0.924284	Mean dependent var	18.50690	
Adjusted R-squared	0.908753	S.D. dependent var	0.985364	
S.E. of regression	0.297650	Sum squared resid	3.455234	
F-statistic	59.51055	Durbin-Watson stat	1.109894	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 46 Buoyancy PBBKB terhadap PDRB Sumatera

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 09:42

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (unbalanced) observations: 47

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	4.338490	0.567550	7.644239	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-60.18282			
_SUMUT-C	-62.17359			
_SUMBAR-C	-57.39701			
_RIAU-C	-62.78947			
_JAMBI-C	-55.50751			
_BENKL-C	-52.69282			
_SUMSEL-C	-60.43671			
_LAMPG-C	-57.87306			
R-squared	0.686673	Mean dependent var	17.31472	
Adjusted R-squared	0.620709	S.D. dependent var	1.471129	
S.E. of regression	0.906018	Sum squared resid	31.19300	
F-statistic	10.40988	Durbin-Watson stat	1.726855	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 47 Buoyancy PKB terhadap PDRB Jawa Bali

Dependent Variable: LOG(PKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 09:48

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 6

Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.533386	0.082945	18.48672	0.0000
Fixed Effects				
_JABAR-C	-9.635634			
_DKIJKT-C	-9.108701			
_JATENG-C	-9.177040			
_YOGYA-C	-7.441450			
_JATIM-C	-9.543753			
_BALI-C	-7.209595			
R-squared	0.987911	Mean dependent var	19.90541	

Adjusted R-squared	0.985410	S.D. dependent var	0.994057
S.E. of regression	0.120072	Sum squared resid	0.418099
F-statistic	394.9808	Durbin-Watson stat	1.990365
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 48 Buoyancy BBNKB terhadap PDRB Jawa Bali

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 09:49

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 6

Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	0.966680	0.141555	6.829017	0.0000
Fixed Effects				
_JABAR—C	1.955566			
_DKJKT—C	2.293251			
_JATENG—C	1.801177			
_YOGYA—C	2.216255			
_JATIM—C	1.831004			
_BALI—C	2.453339			
R-squared	0.969857	Mean dependent var	20.11642	
Adjusted R-squared	0.963620	S.D. dependent var	1.074341	
S.E. of regression	0.204916	Sum squared resid	1.217712	
F-statistic	155.5113	Durbin-Watson stat	2.154895	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 49 Buoyancy PBBKB terhadap PDRB Jawa Bali

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 09:50

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 6

Total panel (unbalanced) observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	3.545988	0.495004	7.163561	0.0000
Fixed Effects				
_JABAR—C	-50.07037			
_DKJKT—C	-50.55888			
_JATENG—C	-48.78128			
_YOGYA—C	-42.44479			
_JATIM—C	-50.09837			
_BALI—C	-43.22260			
R-squared	0.794893	Mean dependent var	18.68445	
Adjusted R-squared	0.749314	S.D. dependent var	1.298495	
S.E. of regression	0.650137	Sum squared resid	11.41232	
F-statistic	17.43981	Durbin-Watson stat	1.900074	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 50 Buoyancy PKB terhadap PDRB Kalimantan

Dependent Variable: LOG(PKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 10:05

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 4

Total panel (balanced) observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.871510	0.129059	14.50124	0.0000
Fixed Effects				
_KALBAR—C	-14.11545			
_KALTENG—C	-14.25232			
_KALSEL—C	-13.76238			
_KALTIM—C	-16.21391			
R-squared	0.971847	Mean dependent var	17.95918	
Adjusted R-squared	0.965920	S.D. dependent var	0.823110	
S.E. of regression	0.151953	Sum squared resid	0.438702	
Log likelihood	13.96934	F-statistic	163.9704	
Durbin-Watson stat	1.690089	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 51 Buoyancy BBNKB terhadap PDRB Kalimantan

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 10:05

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 4

Total panel (balanced) observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.622429	0.163016	9.952568	0.0000
Fixed Effects				
_KALBAR—C	-9.567981			
_KALTENG—C	-9.740255			
_KALSEL—C	-9.236981			
_KALTIM—C	-11.21742			
R-squared	0.950637	Mean dependent var	18.27332	
Adjusted R-squared	0.940486	S.D. dependent var	0.786761	
S.E. of regression	0.191934	Sum squared resid	0.699933	
Log likelihood	8.363369	F-statistic	91.86642	
Durbin-Watson stat	1.746462	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 52 Buoyancy PBBKB terhadap PDRB Kalimantan

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 10:06

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 4

Total panel (unbalanced) observations: 23

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	3.389619	0.804857	4.211453	0.0005
Fixed Effects				
_KALBAR—C	-40.70457			
_KALTENG—C	-40.01794			
_KALSEL—C	-39.79450			
_KALTIM—C	-45.50668			
R-squared	0.626701	Mean dependent var	17.45629	
Adjusted R-squared	0.543746	S.D. dependent var	1.343186	
S.E. of regression	0.907276	Sum squared resid	14.81670	
Log likelihood	-27.57858	F-statistic	7.554692	
Durbin-Watson stat	1.731021	Prob(F-statistic)	0.000935	

Lampiran 53 Buoyancy PKB terhadap PDRB Indonesia Timur

Dependent Variable: LOG(PKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 16:16

Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 8  
 Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.860586	0.186460	9.978463	0.0000
Fixed Effects				
_NTB-C	-13.90976			
_NTT-C	-13.60566			
_SULUT-C	-13.24477			
_SULTENG-C	-13.44741			
_SULSEL-C	-14.22320			
_SULTRA-C	-13.55003			
_MALUKU-C	-12.89322			
_PAPUA-C	-14.99072			
R-squared	0.932216	Mean dependent var	17.04688	
Adjusted R-squared	0.918312	S.D. dependent var	1.010791	
S.E. of regression	0.288895	Sum squared resid	3.254963	
F-statistic	67.04495	Durbin-Watson stat	1.177990	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 54 Buoyancy BBNKB terhadap PDRB Indonesia Timur  
 Dependent Variable: LOG(BBNKB?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 05/13/09 Time: 10:22  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 8  
 Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.526959	0.205835	7.428091	0.0000
Fixed Effects				
_NTB-C	-8.094576			
_NTT-C	-8.020966			
_SULUT-C	-7.643276			
_SULTENG-C	-7.655773			
_SULSEL-C	-8.027025			
_SULTRA-C	-7.628197			
_MALUKU-C	-7.534330			
_PAPUA-C	-8.914438			
R-squared	0.910566	Mean dependent var	17.35398	
Adjusted R-squared	0.892221	S.D. dependent var	0.971416	
S.E. of regression	0.318914	Sum squared resid	3.966529	
F-statistic	49.63448	Durbin-Watson stat	1.130301	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 55 Buoyancy PBBKB terhadap PDRB Indonesia Timur  
 Dependent Variable: LOG(PBBKB?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 05/13/09 Time: 10:22  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 8  
 Total panel (unbalanced) observations: 47

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	4.235301	0.601082	7.046132	0.0000
Fixed Effects				
_NTB-C	-54.85187			
_NTT-C	-53.04315			
_SULUT-C	-53.74192			

_SULTENG-C	-52.93737		
_SULSEL-C	-57.09019		
_SULTRA-C	-52.38723		
_MALUKU-C	-48.33960		
_PAPUA-C	-56.58713		
R-squared	0.629049	Mean dependent var	16.45865
Adjusted R-squared	0.550954	S.D. dependent var	1.378953
S.E. of regression	0.924049	Sum squared resid	32.44690
F-statistic	8.054924	Durbin-Watson stat	1.555354
Prob(F-statistic)	0.000003		

Lampiran 56 Buoyancy PKB terhadap Basis Pajak PKB Sumatera

Dependent Variable: LOG(PKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 14:55

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JKB?)	1.102323	0.060603	18.18935	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	2.744370			
_SUMUT-C	3.689104			
_SUMBAR-C	3.793061			
_RIAU-C	3.821404			
_JAMBI-C	3.686562			
_BENKL-C	3.846487			
_SUMSEL-C	3.993847			
_LAMPG-C	3.952603			
R-squared	0.980228	Mean dependent var	18.25841	
Adjusted R-squared	0.976172	S.D. dependent var	0.901316	
S.E. of regression	0.139129	Sum squared resid	0.754916	
F-statistic	241.6881	Durbin-Watson stat	1.138365	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 57 Buoyancy BBNKB terhadap Basis Pajak BBNKB Sumatera

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 14:57

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KBB?)	0.454041	0.069943	6.491552	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	12.44845			
_SUMUT-C	14.28053			
_SUMBAR-C	13.44810			
_RIAU-C	13.92347			
_JAMBI-C	13.22438			
_BENKL-C	12.62663			
_SUMSEL-C	14.00979			
_LAMPG-C	13.55618			
R-squared	0.867971	Mean dependent var	18.50690	
Adjusted R-squared	0.840888	S.D. dependent var	0.985364	
S.E. of regression	0.393051	Sum squared resid	6.025069	
F-statistic	32.04859	Durbin-Watson stat	0.789385	



Prob(F-statistic) 0.000000

Lampiran 58 Buoyancy PBBKB terhadap Basis Pajak PBBKB Sumatera  
Dependent Variable: LOG(PBBKB?)  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 05/13/09 Time: 14:57  
Sample: 2001 2006  
Included observations: 6  
Number of cross-sections used: 8  
Total panel (unbalanced) observations: 47

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KPRE?)	1.311777	0.180829	7.254233	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-13.12695			
_SUMUT-C	-13.10629			
_SUMBAR-C	-12.52220			
_RIAU-C	-12.35837			
_JAMBI-C	-11.58245			
_BENKL-C	-10.25614			
_SUMSEL-C	-12.45313			
_LAMPG-C	-12.57394			
R-squared	0.666584	Mean dependent var	17.31472	
Adjusted R-squared	0.596391	S.D. dependent var	1.471129	
S.E. of regression	0.934612	Sum squared resid	33.19299	
F-statistic	9.496446	Durbin-Watson stat	1.778067	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 59 Buoyancy PKB terhadap Basis Pajak PKB Jawa Bali  
Dependent Variable: LOG(PKB?)  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 05/13/09 Time: 14:58  
Sample: 2001 2006  
Included observations: 6  
Number of cross-sections used: 6  
Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JKB?)	1.486333	0.125725	11.82210	0.0000
Fixed Effects				
_JABAR-C	-1.307136			
_DKIJKT-C	-2.197235			
_JATENG-C	-2.658123			
_YOGYA-C	-1.934503			
_JATIM-C	-2.421742			
_BALI-C	-1.827127			
R-squared	0.973441	Mean dependent var	19.90541	
Adjusted R-squared	0.967947	S.D. dependent var	0.994057	
S.E. of regression	0.177971	Sum squared resid	0.918535	
F-statistic	177.1542	Durbin-Watson stat	0.909916	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 60 Buoyancy BBNKB terhadap Basis Pajak BBNKB Jawa Bali  
Dependent Variable: LOG(BBNKB?)  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 05/13/09 Time: 14:59  
Sample: 2001 2008  
Included observations: 6  
Number of cross-sections used: 6  
Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

LOG(KBB?)	0.408994	0.075241	5.435811	0.0000
Fixed Effects				
_JABAR-C	16.16087			
_DKIJKT-C	15.80432			
_JATENG-C	14.72685			
_YOGYA-C	13.78315			
_JATIM-C	15.39647			
_BALI-C	14.12952			
R-squared	0.961059	Mean dependent var	20.11642	
Adjusted R-squared	0.953002	S.D. dependent var	1.074341	
S.E. of regression	0.232906	Sum squared resid	1.573105	
F-statistic	119.2865	Durbin-Watson stat	1.900171	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 61 Buoyancy PBBKB terhadap Basis Pajak PBBKB Jawa Bali  
 Dependent Variable: LOG(PBBKB?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 05/13/09 Time: 14:59  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 6  
 Total panel (unbalanced) observations: 34

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KPRE?)	0.861582	0.186249	4.625960	0.0001
Fixed Effects				
_JABAR-C	-1.268155			
_DKIJKT-C	-1.906977			
_JATENG-C	-1.522178			
_YOGYA-C	-1.845712			
_JATIM-C	-0.672466			
_BALI-C	-1.385034			
R-squared	0.668111	Mean dependent var	18.68445	
Adjusted R-squared	0.594358	S.D. dependent var	1.298495	
S.E. of regression	0.827012	Sum squared resid	18.46660	
F-statistic	9.058758	Durbin-Watson stat	1.545755	
Prob(F-statistic)	0.000018			

Lampiran 62 Buoyancy PKB terhadap Basis Pajak PKB Kalimantan  
 Dependent Variable: LOG(PKB?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 05/13/09 Time: 15:00  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 4  
 Total panel (balanced) observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JKB?)	1.125685	0.130335	8.636847	0.0000
Fixed Effects				
_KALBAR-C	3.272249			
_KALTENG-C	3.092099			
_KALSEL-C	3.265071			
_KALTIM-C	3.718544			
R-squared	0.931032	Mean dependent var	17.95918	
Adjusted R-squared	0.916512	S.D. dependent var	0.823110	
S.E. of regression	0.237832	Sum squared resid	1.074716	
Log likelihood	3.217447	F-statistic	64.12211	
Durbin-Watson stat	1.202016	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 63 Buoyancy BBNKB terhadap Basis Pajak BBNKB Kalimantan

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 05/13/09 Time: 15:01  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 4  
 Total panel (balanced) observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KBB?)	0.472389	0.050166	9.416566	0.0000
Fixed Effects				
_KALBAR-C	12.95953			
_KALTENG-C	12.38793			
_KALSEL-C	13.15508			
_KALTIM-C	13.58930			
R-squared	0.946096	Mean dependent var	18.27332	
Adjusted R-squared	0.934748	S.D. dependent var	0.786761	
S.E. of regression	0.200974	Sum squared resid	0.767422	
Log likelihood	7.258746	F-statistic	83.36975	
Durbin-Watson stat	1.717555	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 64 Buoyancy PBBKB terhadap Basis Pajak PBBKB Kalimantan  
 Dependent Variable: LOG(PBBKB?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 05/13/09 Time: 15:01  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 4  
 Total panel (unbalanced) observations: 23

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KPRE?)	1.074223	0.263187	4.081595	0.0007
Fixed Effects				
_KALBAR-C	-6.912436			
_KALTENG-C	-5.047018			
_KALSEL-C	-5.653399			
_KALTIM-C	-6.630688			
R-squared	0.615102	Mean dependent var	17.45629	
Adjusted R-squared	0.529570	S.D. dependent var	1.343186	
S.E. of regression	0.921264	Sum squared resid	15.27708	
Log likelihood	-27.93047	F-statistic	7.191421	
Durbin-Watson stat	1.632118	Prob(F-statistic)	0.001212	

Lampiran 65 Buoyancy PKB terhadap Basis Pajak PKB Indonesia Timur  
 Dependent Variable: LOG(PKB?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 05/13/09 Time: 15:03  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 8  
 Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JKB?)	1.246566	0.155742	8.004021	0.0000
Fixed Effects				
_NTB-C	1.743539			
_NTT-C	2.189492			
_SULUT-C	2.443398			
_SULTENG-C	1.071136			
_SULSEL-C	2.037795			
_SULTRA-C	2.156952			
_MALUKU-C	0.721444			

_PAPUA-C	2.156870		
R-squared	0.909865	Mean dependent var	17.04686
Adjusted R-squared	0.890171	S.D. dependent var	1.010791
S.E. of regression	0.334981	Sum squared resid	4.376289
F-statistic	48.61708	Durbin-Watson stat	0.846101
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 66 Buoyancy BBNKB terhadap Basis Pajak BBNKB Indonesia Timur

Dependent Variable: LOG(BBNKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 15:03

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KBB?)	0.321629	0.048962	6.568922	0.0000
Fixed Effects				
_NTB-C	14.21735			
_NTT-C	13.96627			
_SULUT-C	14.42575			
_SULTENG-C	14.05264			
_SULSEL-C	15.47654			
_SULTRA-C	13.95477			
_MALUKU-C	12.75386			
_PAPUA-C	14.25658			
R-squared	0.897474	Mean dependent var	17.35398	
Adjusted R-squared	0.876443	S.D. dependent var	0.971416	
S.E. of regression	0.341459	Sum squared resid	4.547178	
F-statistic	42.67394	Durbin-Watson stat	0.999661	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 67 Buoyancy PBBKB terhadap Basis PBBKB Indonesia Timur

Dependent Variable: LOG(PBBKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 15:04

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (unbalanced) observations: 47

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KPRE?)	1.181662	0.219084	5.393655	0.0000
Fixed Effects				
_NTB-C	-7.711221			
_NTT-C	-9.139999			
_SULUT-C	-7.160210			
_SULTENG-C	-8.512542			
_SULSEL-C	-9.369887			
_SULTRA-C	-9.662129			
_MALUKU-C	-9.107438			
_PAPUA-C	-10.11921			
R-squared	0.515392	Mean dependent var	16.45865	
Adjusted R-squared	0.413369	S.D. dependent var	1.378953	
S.E. of regression	1.056166	Sum squared resid	42.38845	
F-statistic	5.051729	Durbin-Watson stat	1.342732	
Prob(F-statistic)	0.000256			

Lampiran 68 Buoyancy PABTAPU terhadap Basis Pajak PDRB Sumatera

Dependent Variable: LOG(PABTAPU?)

Method: Pooled Least Squares  
 Date: 05/13/09 Time: 09:41  
 Sample(adjusted): 2002 2006  
 Included observations: 5 after adjusting endpoints  
 Number of cross-sections used: 8  
 Total panel (unbalanced) observations: 38

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	2.263216	0.704871	3.210823	0.0032
Fixed Effects				
_ACEH-C	-24.67913			
_SUMUT-C	-26.44957			
_SUMBAR-C	-23.63324			
_RIAU-C	-25.26481			
_JAMBI-C	-25.04168			
_BENGL-C	-23.08800			
_SUMSEL-C	-25.58233			
_LAMPG-C	-24.30957			
R-squared	0.744408	Mean dependent var	15.01651	
Adjusted R-squared	0.673900	S.D. dependent var	1.537407	
S.E. of regression	0.677938	Sum squared resid	22.35250	
F-statistic	10.55778	Durbin-Watson stat	1.679053	
Prob(F-statistic)	0.000001			

Lampiran 69 Bouyancy PABTAPU terhadap PDRB Jawa Bali

Dependent Variable: LOG(PABTAPU?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 09:51

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 6

Total panel (unbalanced) observations: 27

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.013773	0.349884	2.897457	0.0089
Fixed Effects				
_JABAR-C	-2.110665			
_DKIJKT-C	-2.216278			
_JATENG-C	-2.981818			
_YOGYA-C	-2.768232			
_JATIM-C	-2.736068			
_BALI-C	-1.689754			
R-squared	0.941151	Mean dependent var	16.70815	
Adjusted R-squared	0.923496	S.D. dependent var	1.322800	
S.E. of regression	0.365877	Sum squared resid	2.677322	
F-statistic	53.30883	Durbin-Watson stat	1.532124	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 70 Bouyancy PABTAPU terhadap PDRB Kalimantan

Dependent Variable: LOG(PABTAPU?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 10:08

Sample(adjusted): 2002 2006

Included observations: 5 after adjusting endpoints

Number of cross-sections used: 4

Total panel (unbalanced) observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	2.787144	0.894216	3.116857	0.0089
Fixed Effects				
_KALBAR-C	-35.40768			
_KALTENG-C	-34.88125			
_KALSEL-C	-31.79672			

KALTIM-C	-37.22056		
R-squared	0.892053	Mean dependent var	14.01097
Adjusted R-squared	0.856071	S.D. dependent var	1.923543
S.E. of regression	0.729791	Sum squared resid	6.391142
Log likelihood	-15.80640	F-statistic	24.79148
Durbin-Watson stat	1.667176	Prob(F-statistic)	0.000010

Lampiran 71 Bouyancy PABTAPU terhadap PDRB Indonesia Timur

Dependent Variable: LOG(PABTAPU?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 10:23

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (unbalanced) observations: 37

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.341490	0.475504	2.821196	0.0087
Fixed Effects				
_NTB-C	-9.218346			
_NTT-C	-9.233024			
_SULUT-C	-8.459497			
_SULTENG-C	-10.22198			
_SULSEL-C	-6.201147			
_SULTRA-C	-8.261302			
_MALUKU-C	-10.50231			
_PAPUA-C	-7.853263			
R-squared	0.917680	Mean dependent var	13.83323	
Adjusted R-squared	0.894181	S.D. dependent var	1.881597	
S.E. of regression	0.612139	Sum squared resid	10.49201	
F-statistic	39.01725	Durbin-Watson stat	2.149010	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 72 Bouyancy PPROV terhadap PDRB Sumatera

Dependent Variable: LOG(PPROV?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 05:59

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.995089	0.126255	15.80198	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-16.79921			
_SUMUT-C	-16.41207			
_SUMBAR-C	-15.15634			
_RIAU-C	-17.08460			
_JAMBI-C	-14.24675			
_BENKL-C	-13.80168			
_SUMSEL-C	-16.19472			
_LAMPG-C	-15.20357			
R-squared	0.960519	Mean dependent var	19.30074	
Adjusted R-squared	0.952421	S.D. dependent var	0.946220	
S.E. of regression	0.206396	Sum squared resid	1.661373	
F-statistic	118.6029	Durbin-Watson stat	1.218715	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 73 Bouyancy PPROV terhadap PDRB Jawa Bali

Dependent Variable: LOG(PPUSAT?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 08:23  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 6  
 Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.101110	0.052108	21.13143	0.0000
Fixed Effects				
_JABAR-C	-1.616957			
_DKIJKT-C	0.382805			
_JATENG-C	-1.885327			
_YOGYA-C	-1.289163			
_JATIM-C	-1.893489			
_BALI-C	-1.197714			
R-squared	0.998216	Mean dependent var	19.28126	
Adjusted R-squared	0.997847	S.D. dependent var	1.625717	
S.E. of regression	0.075431	Sum squared resid	0.165006	
F-statistic	2704.770	Durbin-Watson stat	1.684490	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 74 Bouyancy PPROV terhadap PDRB Kalimantan

Dependent Variable: LOG(PPROV?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 08:53

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 4

Total panel (balanced) observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	2.009806	0.182096	11.03704	0.0000
Fixed Effects				
_KALBAR-C	-15.41736			
_KALTENG-C	-15.37729			
_KALSEL-C	-14.95801			
_KALTIM-C	-17.69579			
R-squared	0.945439	Mean dependent var	19.08802	
Adjusted R-squared	0.933952	S.D. dependent var	0.834245	
S.E. of regression	0.214399	Sum squared resid	0.873370	
Log likelihood	5.706875	F-statistic	82.30844	
Durbin-Watson stat	1.499848	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 75 Bouyancy PPROV terhadap PDRB Indonesia Timur

Dependent Variable: LOG(PPROV?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 08:59

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	2.073868	0.232783	8.909032	0.0000
Fixed Effects				
_NTB-C	-15.82778			
_NTT-C	-15.83475			
_SULUT-C	-16.83402			
_SULTENG-C	-15.70527			
_SULSEL-C	-14.63602			

_SULTRA-C	-17.54930		
_MALUKU-C	-16.46163		
_PAPUA-C	-16.01901		
R-squared	0.883511	Mean dependent var	18.19986
Adjusted R-squared	0.859616	S.D. dependent var	0.962603
S.E. of regression	0.360666	Sum squared resid	5.073119
F-statistic	36.97462	Durbin-Watson stat	1.037609
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 76 Elastisitas JKB terhadap PDRB Provinsi

Dependent Variable: LOG(JKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 04:21

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
_ACEH-LOG(PDRB_ACEH)	0.827462	0.158397	5.223964	0.0000
_SUMUT-LOG(PDRB_SUMUT)	1.058950	0.145478	7.279112	0.0000
_SUMBAR-LOG(PDRB_SUMBAR)	1.432441	0.160143	8.944750	0.0000
_RIAU-LOG(PDRB_RIAU)	1.398235	0.195281	7.160133	0.0000
_JAMBI-LOG(PDRB_JAMBI)	1.575248	0.127469	12.35789	0.0000
_BENKL-LOG(PDRB_BENKL)	1.655578	0.139314	11.88376	0.0000
_SUMSEL-LOG(PDRB_SUMSEL)	1.051774	0.136666	7.695928	0.0000
_LAMPG-LOG(PDRB_LAMPG)	1.606054	0.164964	9.735792	0.0000
_JABAR-LOG(PDRB_JABAR)	0.377151	0.132757	2.840920	0.0054
_DKIJKT-LOG(PDRB_DKIJKT)	1.265471	0.163102	7.758773	0.0000
_JATENG-LOG(PDRB_JATENG)	1.180877	0.139549	8.462082	0.0000
_YOGYA-LOG(PDRB_YOGYA)	1.171559	0.160481	7.300319	0.0000
_JATIM-LOG(PDRB_JATIM)	0.670111	0.129156	5.188380	0.0000
_KALBAR-LOG(PDRB_KALBAR)	1.863242	0.180144	10.34306	0.0000
_KALTENG-LOG(PDRB_KALTENG)	1.851470	0.151194	12.24566	0.0000
_KALSEL-LOG(PDRB_KALSEL)	1.329398	0.167183	7.951766	0.0000
_KALTIM-LOG(PDRB_KALTIM)	1.225226	0.116120	10.55136	0.0000
_BALI-LOG(PDRB_BALI)	1.107861	0.170384	6.502142	0.0000
_NTB-LOG(PDRB_NTB)	1.386218	0.153023	9.058855	0.0000
_NTT-LOG(PDRB_NTT)	1.842450	0.168646	10.92499	0.0000
_SULUT-LOG(PDRB_SULUT)	1.709280	0.172378	9.915877	0.0000
_SULTENG-LOG(PDRB_SULTENG)	1.664666	0.166834	9.977975	0.0000
_SULSEL-LOG(PDRB_SULSEL)	1.197939	0.189263	6.329496	0.0000
_SULTRA-LOG(PDRB_SULTRA)	1.058397	0.129174	8.193584	0.0000
_MALUKU-LOG(PDRB_MALUKU)	1.126349	0.203688	5.529777	0.0000
_PAPUA-LOG(PDRB_PAPUA)	0.736566	0.128994	5.710068	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-1.256925			
_SUMUT-C	-5.213263			
_SUMBAR-C	-11.60710			
_RIAU-C	-12.31371			
_JAMBI-C	-13.32847			
_BENKL-C	-14.54392			
_SUMSEL-C	-5.588338			
_LAMPG-C	-14.78635			
_JABAR-C	7.185142			
_DKIJKT-C	-9.256264			
_JATENG-C	-7.229037			
_YOGYA-C	-6.063850			
_JATIM-C	2.287779			
_KALBAR-C	-18.88933			
_KALTENG-C	-18.55490			
_KALSEL-C	-9.436990			
_KALTIM-C	-9.542898			



_BALI-C	-4.927534		
_NTB-C	-10.76705		
_NTT-C	-18.38351		
_SULUT-C	-16.17205		
_SULTENG-C	-14.47933		
_SULSEL-C	-7.849843		
_SULTRA-C	-5.602079		
_MALUKU-C	-5.362196		
_PAPUA-C	-0.718557		
R-squared	0.996386	Mean dependent var	13.23433
Adjusted R-squared	0.994614	S.D. dependent var	1.181104
S.E. of regression	0.086581	Sum squared resid	0.781406
F-statistic	562.2402	Durbin-Watson stat	1.555183
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 77 Elastisitas KBB terhadap PDRB Provinsi

Dependent Variable: LOG(KBB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 04:26

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
_ACEH-LOG(PDRB_ACEH)	-0.198512	0.721067	-0.275303	0.7836
_SUMUT-LOG(PDRB_SUMUT)	1.998051	0.662254	3.017047	0.0032
_SUMBAR-LOG(PDRB_SUMBAR)	2.914935	0.729015	3.998458	0.0001
_RIAU-LOG(PDRB_RIAU)	1.907787	0.888969	2.146067	0.0342
_JAMBI-LOG(PDRB_JAMBI)	3.115961	0.580273	5.369824	0.0000
_BENKL-LOG(PDRB_BENKL)	4.053660	0.634196	6.391807	0.0000
_SUMSEL-LOG(PDRB_SUMSEL)	4.705455	0.622141	7.563323	0.0000
_LAMPNG-LOG(PDRB_LAMPNG)	3.028887	0.750960	4.033355	0.0001
_JABAR-LOG(PDRB_JABAR)	1.860792	0.604343	3.079031	0.0027
_DKIJKT-LOG(PDRB_DKIJKT)	2.601959	0.742483	3.504400	0.0007
_JATENG-LOG(PDRB_JATENG)	1.283202	0.635265	2.019946	0.0460
_YOGYA-LOG(PDRB_YOGYA)	2.619284	0.730550	3.585358	0.0005
_JATIM-LOG(PDRB_JATIM)	0.688336	0.587953	1.170733	0.2444
_KALBAR-LOG(PDRB_KALBAR)	3.778739	0.820064	4.607857	0.0000
_KALTENG-LOG(PDRB_KALTENG)	4.592378	0.688275	6.672296	0.0000
_KALSEL-LOG(PDRB_KALSEL)	2.801606	0.761061	3.681187	0.0004
_KALTIM-LOG(PDRB_KALTIM)	2.080636	0.528610	3.936053	0.0001
_BALI-LOG(PDRB_BALI)	1.646193	0.775633	2.122386	0.0362
_NTB-LOG(PDRB_NTB)	3.084402	0.696604	4.427771	0.0000
_NTT-LOG(PDRB_NTT)	6.839760	0.767719	8.909192	0.0000
_SULUT-LOG(PDRB_SULUT)	4.747151	0.784711	6.049556	0.0000
_SULTENG-LOG(PDRB_SULTENG)	5.434465	0.759473	7.155575	0.0000
_SULSEL-LOG(PDRB_SULSEL)	5.002655	0.861576	5.806404	0.0000
_SULTRA-LOG(PDRB_SULTRA)	1.914536	0.588034	3.255626	0.0015
_MALUKU-LOG(PDRB_MALUKU)	4.814137	0.927242	5.191889	0.0000
_PAPUA-LOG(PDRB_PAPUA)	1.370573	0.587216	2.334019	0.0215
Fixed Effects				
_ACEH-C	14.68770			
_SUMUT-C	-24.79675			
_SUMBAR-C	-39.17245			
_RIAU-C	-23.69428			
_JAMBI-C	-40.74890			
_BENKL-C	-54.51958			
_SUMSEL-C	-73.64572			
_LAMPNG-C	-41.40062			
_JABAR-C	-24.90873			
_DKIJKT-C	-37.73157			
_JATENG-C	-11.01931			
_YOGYA-C	-32.59302			

_JATIM-C	-0.385364		
_KALBAR-C	-53.59386		
_KALTENG-C	-66.13094		
_KALSEL-C	-36.59129		
_KALTIM-C	-27.23891		
_BALI-C	-16.25202		
_NTB-C	-41.27293		
_NTT-C	-102.4201		
_SULUT-C	-68.50642		
_SULTENG-C	-78.69822		
_SULSEL-C	-77.46440		
_SULTRA-C	-21.34113		
_MALUKU-C	-63.99549		
_PAPUA-C	-13.69893		
R-squared	0.947428	Mean dependent var	11.10726
Adjusted R-squared	0.921648	S.D. dependent var	1.409690
S.E. of regression	0.394593	Sum squared resid	16.19318
F-statistic	36.74992	Durbin-Watson stat	2.842341
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 78 Elastisitas KPRE terhadap PDRB Provinsi

Dependent Variable: LOG(KPRE?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 04/05/09 Time: 04:14

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 26

Total panel (balanced) observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
_ACEH-LOG(PDRB_ACEH)	3.424590	0.530490	6.455516	0.0000
_SUMUT-LOG(PDRB_SUMUT)	3.209830	0.487222	6.588025	0.0000
_SUMBAR-LOG(PDRB_SUMBAR)	2.941736	0.536338	5.484856	0.0000
_RIAU-LOG(PDRB_RIAU)	3.734962	0.654017	5.710806	0.0000
_JAMBI-LOG(PDRB_JAMBI)	3.584327	0.426908	8.396018	0.0000
_BENKL-LOG(PDRB_BENKL)	2.110994	0.466580	4.524401	0.0000
_SUMSEL-LOG(PDRB_SUMSEL)	2.298541	0.457711	5.021819	0.0000
_LAMPG-LOG(PDRB_LAMPG)	3.365114	0.552483	6.090893	0.0000
_JABAR-LOG(PDRB_JABAR)	4.325954	0.444617	9.729621	0.0000
_DKIJKT-LOG(PDRB_DKIJKT)	3.023344	0.546247	5.534758	0.0000
_JATENG-LOG(PDRB_JATENG)	1.695828	0.467366	3.628477	0.0004
_YOGYA-LOG(PDRB_YOGYA)	3.907582	0.537468	7.270359	0.0000
_JATIM-LOG(PDRB_JATIM)	1.631265	0.432559	3.771198	0.0003
_KALBAR-LOG(PDRB_KALBAR)	3.241888	0.603323	5.373384	0.0000
_KALTENG-LOG(PDRB_KALTENG)	3.804394	0.506366	7.513132	0.0000
_KALSEL-LOG(PDRB_KALSEL)	2.696188	0.559914	4.815360	0.0000
_KALTIM-LOG(PDRB_KALTIM)	2.050648	0.388900	5.272951	0.0000
_BALI-LOG(PDRB_BALI)	2.748082	0.570635	4.815830	0.0000
_NTB-LOG(PDRB_NTB)	2.848931	0.512493	5.558966	0.0000
_NTT-LOG(PDRB_NTT)	3.277767	0.564813	5.803277	0.0000
_SULUT-LOG(PDRB_SULUT)	3.497283	0.577314	6.057856	0.0000
_SULTENG-LOG(PDRB_SULTENG)	3.436879	0.568746	6.151056	0.0000
_SULSEL-LOG(PDRB_SULSEL)	3.116754	0.633863	4.917076	0.0000
_SULTRA-LOG(PDRB_SULTRA)	3.204430	0.432618	7.407067	0.0000
_MALUKU-LOG(PDRB_MALUKU)	3.231404	0.682174	4.736920	0.0000
_PAPUA-LOG(PDRB_PAPUA)	-0.172647	0.432016	-0.399631	0.6902
Fixed Effects				
_ACEH-C	-37.94891			
_SUMUT-C	-35.59823			
_SUMBAR-C	-27.85600			
_RIAU-C	-46.40165			

_JAMBI-C	-38.10274
_BENKL-C	-13.35676
_SUMSEL-C	-18.45503
_LAMPG-C	-35.53577
_JABAR-C	-60.75132
_DKIJKT-C	-34.94868
_JATENG-C	-8.745608
_YOGYA-C	-43.58016
_JATIM-C	-8.421979
_KALBAR-C	-32.94081
_KALTENG-C	-43.36543
_KALSEL-C	-23.87775
_KALTIM-C	-15.56598
_BALI-C	-25.11674
_NTB-C	-27.51789
_NTT-C	-32.15070
_SULUT-C	-37.98203
_SULTENG-C	-35.17063
_SULSEL-C	-32.14243
_SULTRA-C	-30.03571
_MALUKU-C	-27.84525
_PAPUA-C	26.54645

R-squared	0.972296	Mean dependent var	22.26204
Adjusted R-squared	0.958711	S.D. dependent var	1.428676
S.E. of regression	0.290303	Sum squared resid	8.764693
F-statistic	71.56889	Durbin-Watson stat	2.172913
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 79 Elastisitas JKB terhadap PDRB Sumatera

Dependent Variable: LOG(JKB?)  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 05/13/09 Time: 14:35  
Sample: 2001 2006  
Included observations: 6  
Number of cross-sections used: 8  
Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.330179	0.072114	18.44541	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-10.16232			
_SUMUT-C	-10.23957			
_SUMBAR-C	-9.841260			
_RIAU-C	-11.04740			
_JAMBI-C	-9.243022			
_BENKL-C	-9.377703			
_SUMSEL-C	-10.59016			
_LAMPG-C	-9.996480			

R-squared	0.981428	Mean dependent var	13.21526
Adjusted R-squared	0.977618	S.D. dependent var	0.787999
S.E. of regression	0.117889	Sum squared resid	0.542012
F-statistic	257.6161	Durbin-Watson stat	0.983319
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 80 Elastisitas KBB terhadap PDRB Sumatera

Dependent Variable: LOG(KBB?)  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 05/13/09 Time: 14:36  
Sample: 2001 2006  
Included observations: 6  
Number of cross-sections used: 8  
Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	2.851026	0.307535	9.270556	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-39.33345			
_SUMUT-C	-40.60371			
_SUMBAR-C	-38.06890			
_RIAU-C	-41.24508			
_JAMBI-C	-36.33226			
_BENKL-C	-35.42594			
_SUMSEL-C	-40.52907			
_LAMPG-C	-38.31252			
R-squared	0.813110	Mean dependent var	11.16024	
Adjusted R-squared	0.774774	S.D. dependent var	1.059342	
S.E. of regression	0.502742	Sum squared resid	9.857248	
F-statistic	21.20991	Durbin-Watson stat	1.555565	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 81 Elastisitas KPRE terhadap PDRB Sumatera

Dependent Variable: LOG(KPRE?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 14:37

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 8

Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	3.027712	0.172702	17.53141	0.0000
Fixed Effects				
_ACEH-C	-30.91841			
_SUMUT-C	-32.22330			
_SUMBAR-C	-29.34061			
_RIAU-C	-33.24189			
_JAMBI-C	-28.82363			
_BENKL-C	-27.91105			
_SUMSEL-C	-31.55531			
_LAMPG-C	-29.67766			
R-squared	0.961858	Mean dependent var	22.52206	
Adjusted R-squared	0.954035	S.D. dependent var	1.316840	
S.E. of regression	0.282324	Sum squared resid	3.108575	
F-statistic	122.9385	Durbin-Watson stat	1.468601	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 82 Elastisitas JKB terhadap PDRB Jawa Bafi

Dependent Variable: LOG(JKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 14:43

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 6

Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	0.908671	0.067091	13.54383	0.0000
Fixed Effects				
_JABAR-C	-3.200335			
_DKIJKT-C	-2.227120			
_JATENG-C	-2.042617			
_YOGYA-C	-1.631465			
_JATIM-C	-2.383467			
_BALI-C	-1.513163			
R-squared	0.987069	Mean dependent var	14.77667	

Adjusted R-squared	0.984394	S.D. dependent var	0.777438
S.E. of regression	0.097121	Sum squared resid	0.273543
F-statistic	368.9496	Durbin-Watson stat	0.611857
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 83 Elastisitas KBB terhadap PDRB Jawa Bali

Dependent Variable: LOG(KBB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 14:44

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 6

Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.681430	0.245324	6.853925	0.0000
Fixed Effects				
_JABAR-C	-21.40414			
_DKIJKT-C	-19.59667			
_JATENG-C	-18.60688			
_YOGYA-C	-16.78047			
_JATIM-C	-19.81117			
_BALI-C	-16.85603			
R-squared	0.900878	Mean dependent var	12.50930	
Adjusted R-squared	0.880370	S.D. dependent var	1.026757	
S.E. of regression	0.355131	Sum squared resid	3.657418	
F-statistic	43.92803	Durbin-Watson stat	2.443466	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 84 Elastisitas KPRES terhadap PDRB Jawa Bali

Dependent Variable: LOG(KPRES?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 14:44

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 6

Total panel (balanced) observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	2.833824	0.277283	10.21996	0.0000
Fixed Effects				
_JABAR-C	-31.59629			
_DKIJKT-C	-31.21503			
_JATENG-C	-30.42814			
_YOGYA-C	-25.47622			
_JATIM-C	-31.96934			
_BALI-C	-26.58646			
R-squared	0.906885	Mean dependent var	23.29408	
Adjusted R-squared	0.887619	S.D. dependent var	1.197366	
S.E. of regression	0.401396	Sum squared resid	4.672435	
F-statistic	47.07356	Durbin-Watson stat	1.020990	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 85 Elastisitas JKB terhadap PDRB Kalimantan

Dependent Variable: LOG(JKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 14:46

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 4

Total panel (balanced) observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.500469	0.089031	16.85339	0.0000
Fixed Effects				
_KALBAR-C	-12.66567			
_KALTENG-C	-12.70788			
_KALSEL-C	-12.35839			
_KALTIM-C	-14.68118			
R-squared	0.972109	Mean dependent var	12.98959	
Adjusted R-squared	0.966237	S.D. dependent var	0.570483	
S.E. of regression	0.104824	Sum squared resid	0.208773	
Log likelihood	22.88020	F-statistic	165.5570	
Durbin-Watson stat	0.957693	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 86 Elastisitas KKB terhadap PDRB Kalimantan

Dependent Variable: LOG(KBB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 14:47

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 4

Total panel (balanced) observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	3.099594	0.322021	9.625432	0.0000
Fixed Effects				
_KALBAR-C	-41.94257			
_KALTENG-C	-41.26390			
_KALSEL-C	-41.68007			
_KALTIM-C	-46.26092			
R-squared	0.869982	Mean dependent var	11.11446	
Adjusted R-squared	0.842610	S.D. dependent var	0.955690	
S.E. of regression	0.379145	Sum squared resid	2.731268	
Log likelihood	-7.975070	F-statistic	31.78353	
Durbin-Watson stat	1.068850	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 87 Elastisitas JKB terhadap PDRB Kalimantan

Dependent Variable: LOG(KPRE?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 14:47

Sample: 2001 2006

Included observations: 6

Number of cross-sections used: 4

Total panel (balanced) observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	2.790602	0.275139	10.14252	0.0000
Fixed Effects				
_KALBAR-C	-25.19863			
_KALTENG-C	-26.47752			
_KALSEL-C	-25.49008			
_KALTIM-C	-29.37952			
R-squared	0.952842	Mean dependent var	21.89159	
Adjusted R-squared	0.942914	S.D. dependent var	1.355833	
S.E. of regression	0.323946	Sum squared resid	1.993860	
Log likelihood	-4.198870	F-statistic	95.97439	
Durbin-Watson stat	1.670885	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 88 Elastisitas JKB terhadap PDRB Timur

Dependent Variable: LOG(JKB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/13/09 Time: 14:51  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 8  
 Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	1.282018	0.085274	15.03411	0.0000
Fixed Effects				
_NTB-C	-9.013194			
_NTT-C	-9.233197			
_SULUT-C	-9.100083			
_SULTENG-C	-8.181389			
_SULSEL-C	-9.332271			
_SULTRA-C	-9.206460			
_MALUKU-C	-7.725376			
_PAPUA-C	-10.12488			
R-squared	0.968811	Mean dependent var	12.21901	
Adjusted R-squared	0.962414	S.D. dependent var	0.681483	
S.E. of regression	0.132121	Sum squared resid	0.680779	
F-statistic	151.4311	Durbin-Watson stat	1.333486	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 89 Elastisitas KBB terhadap PDRB Timur

Dependent Variable: LOG(KBB?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 05/13/09 Time: 14:53  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 8  
 Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	3.693374	0.411979	8.964953	0.0000
Fixed Effects				
_NTB-C	-51.52295			
_NTT-C	-51.04834			
_SULUT-C	-51.06450			
_SULTENG-C	-50.04189			
_SULSEL-C	-54.37974			
_SULTRA-C	-50.01296			
_MALUKU-C	-46.98137			
_PAPUA-C	-53.75569			
R-squared	0.764695	Mean dependent var	9.999142	
Adjusted R-squared	0.716428	S.D. dependent var	1.198665	
S.E. of regression	0.638307	Sum squared resid	15.89002	
F-statistic	15.84262	Durbin-Watson stat	1.628446	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 90 Elastisitas KPRE terhadap PDRB Timur

Dependent Variable: LOG(KPRE?)  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 05/13/09 Time: 14:53  
 Sample: 2001 2006  
 Included observations: 6  
 Number of cross-sections used: 8  
 Total panel (balanced) observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRB?)	2.581108	0.279266	9.242459	0.0000
Fixed Effects				
_NTB-C	-23.00997			
_NTT-C	-20.77618			

_SULUT-C	-22.81767		
_SULTENG-C	-21.08564		
_SULSEL-C	-22.69816		
_SULTRA-C	-19.98882		
_MALUKU-C	-17.97319		
_PAPUA-C	-21.94211		
R-squared	0.884001	Mean dependent var	21.41320
Adjusted R-squared	0.860206	S.D. dependent var	1.157255
S.E. of regression	0.432686	Sum squared resid	7.301481
F-statistic	37.15116	Durbin-Watson stat	1.395228
Prob(F-statistic)	0.000000		

